



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

LAPORAN KINERJA

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

2024





MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 - 13 TELP. 3843348, 3810361, 3457661
TORMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Urusan Administrasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 18 Februari 2024

Pereviu I

Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring
Biro Perencanaan dan Organisasi


Damara

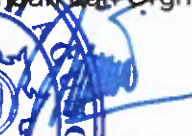
Pereviu II

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Biro Perencanaan dan Organisasi


Rustimah

Pereviu III

Kepala Sub Bagian Bimbingan dan
Monitoring Penyelenggaraan Program
Biro Perencanaan dan Organisasi


Tugan Waryuni



KATA PENGANTAR

Arah kebijakan dan strategi organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 ditetapkan untuk menjawab amanat agenda pembangunan nasional di bidang hukum dan peradilan. Pelaksanaannya tidaklah terlepas dari tugas dan fungsinya dalam mewujudkan visi Badan Peradilan Indonesia yang Agung, sehingga tentu saja memerlukan kontribusi dari seluruh unit kerja salah satunya adalah Badan Urusan Administrasi. Eksistensi Badan Urusan Administrasi sebagai *supporting unit* organisasi memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung beserta Badan Peradilan di bawahnya, terutama dalam hal pengelolaan *man, money, material* berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Urusan Administrasi Tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas maka Badan Urusan Administrasi menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai dasar pengukuran dan pemantauan kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut ditetapkan berdasarkan indikator-indikator sasaran kinerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing Unit Eselon II pada Badan Urusan Administrasi.

Pemantauan capaian Kinerja Badan Urusan Administrasi dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk memastikan tingkat keberhasilan dan kegagalan capaian guna membuat kebijakan-kebijakan berikutnya.

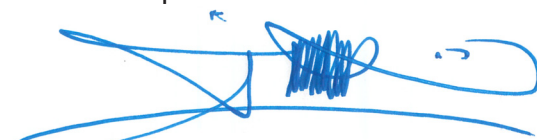
Hasil pemantauan tersebut dibuat dalam Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi yang merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Urusan Administrasi Tahun 2020-2024. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai laporan pengukuran kinerja namun juga sebagai wujud telah dilaksanakannya evaluasi atas kinerja tersebut dan acuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan untuk merumuskan perencanaan ke depannya dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Tahun 2024 ini masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun dalam

pencapaian target kinerja Badan Urusan Administrasi.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan dampak yang positif sebagai bentuk pertanggungjawaban publik tentang

Jakarta, 24 Februari 2025
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Sugiyanto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Urusan Administrasi berkomitmen kuat memberikan dukungan dalam hal pengelolaan *man, money, material* berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Urusan Administrasi Tahun 2020–2024 untuk mewujudkan *Good Governance*. Sehingga, akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan menyajikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Badan Urusan Administrasi dalam

kurun waktu tahun 2024.

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2024 sebanyak 4 (empat) sasaran strategis, terdiri dari: mewujudkan manajemen Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkesinambungan, meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel, mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik, serta mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1.	Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia profesional dan berkesinambungan	a. Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	83,81%
		b. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	113,00%
		c. Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	100,40%
		d. Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	96,69%
		e. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	142,86%
	Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1		107,35%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
2.	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	a. Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	85,23%
		b. Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKAKL	100,00%
		c. Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	129,80%
		d. Opini WTP	100,00%
		e. Persentase kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara	105,26%
		f. Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	121,75%
		g. Persentase realisasi anggaran belanja mahkamah Agung	102,50%
		h. Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan negara	115,00%
		i. Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	98,28%
		j. Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada	94,79%
		k. Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	117,65%
		l. Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	117,65%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 2			107,32%
3.	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	171,43%
		b. Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “BB”	112,00%
		c. Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan	114,29%
		d. Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah diputus	103,70%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 3			125,35%
4.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	160,00%
		b. Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	183,88%
		c. Jumlah Pengguna aplikasi e-library	106,27%
		d. Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	100,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
		e. Persentase penyelesaian distribusi surat	100,00%
		f. Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan Pimpinan dengan tepat waktu	100,00%

Capaian Kinerja Badan Urusan Administrasi secara keseluruhan pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini dibuktikan rata-rata nilai capaian seluruh sasaran strategis yaitu sebesar 115,58%. Terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan capaian yang terlampau tinggi yaitu sasaran strategis “Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Baik” dengan capaian sebesar 125,35% dan sasaran strategis “Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan yang Prima” dengan capaian sebesar 122,28%. Indikator Kinerja yang terlampau tinggi capaiannya perlu segera direvisi, yaitu:

1. Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media dengan capaian sebesar 183,88%.
2. Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun dengan capaian sebesar 171,43%.
3. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan dengan capaian sebesar 160,00%.
4. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental dengan capaian sebesar 142,86%.
5. Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dengan capaian sebesar 141,10%.
6. Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan dengan capaian sebesar 129,80%.

Selain itu, terdapat Indikator Kinerja dengan capaian di bawah 100% sehingga perlu dipertimbangkan untuk menurunkan targetnya. Indikator tersebut adalah:

1. Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan dengan capaian sebesar 83,81%.
2. Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif dengan capaian sebesar 85,23%.
3. Persentase sarana dan prasarana pengadilannya sesuai standarisasi yang ada dengan capaian sebesar 94,79%.
4. Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu dengan capaian sebesar 96,69%.
5. Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui dengan capaian sebesar 98,28%.

Daftar Isi

		I	Pendahuluan	1
Kata Pengantar	IV	A.	Latar Belakang	3
Ringkasan Eksekutif	VIII	B.	Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi	3
Daftar Isi	XII	C.	Isu Strategis di Lingkungan Mahkamah Agung	4
Daftar Tabel	XIII			
Daftar Gambar	XVI			
		II	Perencanaan Kinerja	6
		A.	Rencana Strategis Tahun 2020-2024	6
		B.	Rencana Kerja Tahun 2024	11
		C.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
		D.	Pengukuran Kinerja	15
		III	Akuntabilitas Kinerja	16
		A.	Pengukuran Capaian Kinerja	18
		B.	Evaluasi Dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	113
		C.	Realisasi Anggaran	114
		IV	Penutup	116
			Lampiran	120

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Capaian Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2024	VIII
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Badan Urusan Administrasi	9
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2024	11
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2024	13
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja BUA Tahun 2024	18
Tabel 3.2	Mewujudkan Manajemen Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berkesinambungan	21
Tabel 3.3	Jumlah Pegawai Yang Direkrut dan Pengisian Jabatan	22
Tabel 3.4	Rincian Jumlah Pegawai yang Direkrut dan Pengisian Jabatan	22
Tabel 3.5	Tabel Penetapan Kebutuhan dan pelamar yang mendaftar CPNS pada Mahkamah Agung Tahun 2024	23
Tabel 3.6	Hasil Rekrutmen PPPK Tahun Anggaran 2024	25
Tabel 3.7	Tabel Seleksi Terbuka JPT Pratama Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 Batch I	27
Tabel 3.8	Tabel Seleksi Terbuka JPT Pratama Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 Batch II	27
Tabel 3.9	Pegawai yang Telah Mengikuti Pemetaan Kompetensi Sebagai Dasar dalam Pengembangan Pegawai	28
Tabel 3.10	Kegiatan Pemetaan Unit Penilaian Kompetensi (UPK)	29
Tabel 3.11	Persentase Tingkat Kelengkapan Data Pegawai	32
Tabel 3.12	Persentase Tingkat Kelengkapan Data Pegawai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024	33
Tabel 3.13	Tingkat Kelengkapan Data Pegawai Tahun 2023	33
Tabel 3.14	Persentase Layanan Kepegawaian yang Selesai Tepat Waktu	34
Tabel 3.15	Realisasi Masing-Masing Layanan Kepegawaian Tahun 2024	34
Tabel 3.16	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pembinaan Rohani dan Mental	41
Tabel 3.17	Meningkatnya Layanan Perencanaan, Keuangan dan BMN yang Akuntabel	42
Tabel 3.18	Tabel Perbandingan Usulan Renja dengan Pagu Indikatif	44
Tabel 3.19	Persentase Terpenuhinya Usulan Rencana Kerja dalam Pagu Indikatif	45
Tabel 3.20	Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Rencana Kerja dengan RKA K/L	46
Tabel 3.21	Realisasi Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah Yang Telah Disahkan	49
Tabel 3.22	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah Yang Telah Disahkan	50
Tabel 3.23	Opini WTP	50
Tabel 3.24	Persentase Kerugian Negara yang Dikembalikan ke Kas Negara	56

Tabel 3.25	Tabel Perbandingan Kerugian Negara Yang Dikembalikan ke Kas Negara	56
Tabel 3.26	Sisa Kerugian Negara yang Dilimpahkan Penagihannya ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang NTB	59
Tabel 3.27	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	65
Tabel 3.28	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	65
Tabel 3.29	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	66
Tabel 3.30	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	66
Tabel 3.31	Potensi PNBP Denda Tilang Mahkamah Agung	67
Tabel 3.32	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung	68
Tabel 3.33	Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Jenis Kegiatan	68
Tabel 3.34	Persentase Kepatuhan Satker terhadap Regulasi Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	72
Tabel 3.35	Persentase Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui	73
Tabel 3.36	Persentase Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui Tahun 2024	74
Tabel 3.37	Pengadilan dengan 4 (empat) Pilar Tampak Depan Gedung Kantor (K1)	75
Tabel 3.38	Pengadilan dengan Layanan Peradilan bagi Penyandang Disabilitas (K2)	75
Tabel 3.39	Pengadilan dengan Standar Minimal Pelayanan Peradilan (K3)	76
Tabel 3.40	Persentase Sarana Dan Prasarana Pengadilan Sesuai Standarisasi Yang Ada	77
Tabel 3.41	Persentase Nilai Penatausahaan BMN yang Ditindaklanjuti	78
Tabel 3.42	Persentase Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan	79
Tabel 3.43	Persentase Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan	80
Tabel 3.44	Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Baik	81
Tabel 3.45	Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	81
Tabel 3.46	Jumlah satker yang mendapatkan nilai LKjIP “BB”	84
Tabel 3.47	Rekapitulasi Nilai AKIP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun 2020-2023 (Pelaksanaan Tahun 2020-2024)	85
Tabel 3.48	Jumlah Perancangan dan Harmonisasi Kebijakan Mahkamah Agung Yang Telah Diselesaikan	87
Tabel 3.49	Jumlah Perancangan Dan Harmonisasi Kebijakan Mahkamah Agung Yang Telah Diselesaikan Tahun 2024	88
Tabel 3.50	Rekapitulasi Jumlah Perancangan Dan Harmonisasi Kebijakan Mahkamah Agung Yang Telah Diselesaikan Tahun 2020-2024	90
Tabel 3.51	Persentase Bantuan Hukum kepada Mahkamah Agung yang Telah Diputus	91
Tabel 3.52	Rekapitulasi Jumlah Gugatan pada Tahun 2020-2024	91
Tabel 3.53	Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan yang Prima	92
Tabel 3.54	Jumlah Aplikasi yang Telah Diselesaikan	93
Tabel 3.55	Jumlah Berita tentang Mahkamah Agung yang Dimuat Media	95
Tabel 3.56	Daftar berita yang dimuat di Media Internal Tahun 2022-2024	95
Tabel 3.57	Jumlah Pengguna aplikasi e-Library	96
Tabel 3.58	Jumlah Pengguna Aplikasi e-Library Tahun 2024 (Per Triwulan)	97

Tabel 3.59	Persentase Pengadilan yang Mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	99
Tabel 3.60	Rekapitulasi Berdasarkan Jenis Surat	102
Tabel 3.61	Rekapitulasi Surat Dinas Berdasarkan Wilayah Agenda	103
Tabel 3.62	Rekapitulasi Surat berbentuk Laporan Bulanan berdasarkan Wilayah Agenda	103
Tabel 3.63	Persentase Penyelesaian Distribusi Surat	104
Tabel 3.64	Persentase Tindaklanjut Surat pada Kesekretariatan Pimpinan dengan Tepat Waktu	105
Tabel 3.65	Rekapitulasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan A	105
Tabel 3.66	Tabel Rekapitulasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan B	106
Tabel 3.67	Rekapitulasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan C	106
Tabel 3.68	Klasifikasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan D	107
Tabel 3.69	Klasifikasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan E	107
Tabel 3.70	Jumlah Dukungan Keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung	108
Tabel 3.71	Jumlah Dukungan Keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2024	109
Tabel 3.72	Jumlah Dukungan Layanan Kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung	110
Tabel 3.73	Reviu Indikator Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	111
Tabel 3.74	Realisasi Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	112
Tabel 3.75	Jumlah Laporan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung Tahun 2024	112
Tabel 3.75	Nilai Laporan Hasil Evaluasi AKIP BUA 2020 & 2023	113
Tabel 3.76	Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi Tahun 2024	114
Tabel 3.77	Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi Tahun 2020-2024	115

Daftar Gambar

Gambar 3.1	Tahapan Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024	12
Gambar 3.2	Capaian Kinerja Penyelesaian Kerugian Negara	12
Gambar 3.3	Aplikasi Persuratan MARI	12
Gambar 3.4	Letak Quick Response Code (Kode QR)	12
Gambar 3.5	Tiga jenis Kode QR	12
Gambar 3.6	Jumlah Laporan Keluhan Penggunaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2023-2024	12



Bab I Pendahuluan

- A. Tugas dan Fungsi Badan Urusan Administrasi
- B. Struktur Organisasi
- C. Sistematika Laporan

Bab I
Pendahuluan

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* menurut UU nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan salah satu bentuk akuntabilitas adalah berupa laporan kinerja.

Laporan kinerja Badan Urusan Administrasi tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024 berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja ini mengacu kepada Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4505/SEK/OT.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP serta berpedoman kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud akuntabilitas tersebut sebagai pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. TUGAS DAN FUNGSI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Urusan Administrasi (BUA) mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam membina dan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung. Badan Urusan Administrasi menyelenggarakan fungsi:

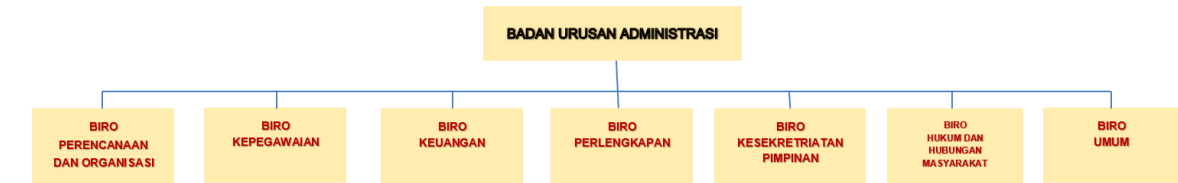
- a. Koordinasi dan pembinaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di semua lingkungan peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- b. Pelaksanaan urusan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di semua lingkungan peradilan, serta kehumasan dan keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung, Pasal 367 struktur organisasi pada Badan Urusan Administrasi terdiri dari:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi.

- b. Biro Kepegawaian.
- c. Biro Keuangan.
- d. Biro Perlengkapan.
- e. Biro Sekretariat Pimpinan.
- f. Biro Hukum dan Humas.
- g. Biro Umum.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian laporan kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan.
Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi Badan Urusan Administrasi.
2. Bab II Perencanaan Kinerja.
Pada bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja serta diuraikan mengenai mekanisme pengukuran kinerja organisasi tahun 2024.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja.
Pada bab ini diuraikan realisasi capaian kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

4. Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari laporan kinerja Badan Urusan Administrasi 2024.

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis 2020-2024
- B. Rencana Kinerja Tahun 2024
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- D. Pengukuran Kinerja

Bab II
Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis Badan Urusan Administrasi Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, pembinaan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Rencana Strategis Badan Urusan Administrasi telah mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi dan tujuan yang dijadikan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

Visi Badan Urusan Administrasi “Badan Urusan Administrasi mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”.

Untuk mencapai visi Badan Urusan Administrasi yang selaras dengan visi Mahkamah Agung, maka Badan Urusan Administrasi menetapkan misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
2. Meningkatkan kelembagaan/ organisasi dan tata laksana peradilan yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai.
5. Meningkatkan pengelolaan anggaran

secara akuntabel dan transparan.

6. Meningkatkan penatausahaan aset negara.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
8. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan professional

Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka Badan Urusan administrasi menetapkan tujuan:

- a. Terwujudnya dukungan man, money dan material atas pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
- b. Terlaksananya layanan rumah tangga Mahkamah Agung.

Dalam rangka mencapai tujuan, ditetapkan 4 sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Badan Urusan Administrasi :

1. Mewujudkan manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel.
3. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik.
4. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan prima.

Penjabaran sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur mencapai keberhasilan kinerja Badan Urusan Administrasi.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Badan Urusan Administrasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	UNIT PENANGGUNGJAWAB
1.	Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia profesional dan berkesinambungan	a. Jumlah pegawai yag direkrut dan pengisian jabatan	Biro Kepegawaian
		b. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	Biro Kepegawaian
		c. Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	Biro Kepegawaian
		d. Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	Biro Kepegawaian
		e. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	Biro Umum
2.	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	a. Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	Biro Perencanaan dan Organisasi
		b. Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKAKL	Biro Perencanaan dan Organisasi
		c. Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	Biro Perencanaan dan Organisasi
		d. Opini WTP	Biro Keuangan
		e. Persentase kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara	Biro Keuangan
		f. Persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak Mahkamah Agung	Biro Keuangan
		g. Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	Biro Keuangan
		h. Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan negara	Biro Keuangan
		i. Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	Biro Perlengkapan
		j. Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada	Biro Perlengkapan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	UNIT PENANGGUNGJAWAB
3.	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	k. Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	Biro Perlengkapan
		l. Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	Biro Perlengkapan
		a. Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	Biro Perencanaan dan Organisasi
		b. Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “BB”	Biro Perencanaan dan Organisasi
4.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	c. Jumlah Perancangan dan Harmonisasi Kebijakan MA yang telah diselesaikan	Biro Hukum dan Humas
		d. Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus	Biro Hukum dan Humas
		a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	Biro Hukum dan Humas
		b. Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	Biro Hukum dan Humas
		c. Jumlah Pengguna aplikasi e-library	Biro Hukum dan Humas
		d. Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	Biro Hukum dan Humas
		e. Persentase penyelesaian distribusi surat dan berkas perkara	Biro Umum
		f. Persentase tindaklanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	Biro Sekretariat Pimpinan
		g. Jumlah dukungan keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung	Biro Umum
		h. Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung	Biro Umum
		i. Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	Biro Umum

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja Badan Urusan Administrasi melalui berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yang diukur berdasarkan 4 (empat) sasaran strategis dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia profesional dan berkesinambungan	a. Jumlah pegawai yag direkrut dan pengisian jabatan	14.270 Orang
		b. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagawi dasar dalam pengembangan pegawai	1.500 Pegawai
		c. Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	99,6%
		d. Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	e. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70 Pegawai
		a. Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	70%
		b. Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKAKL	100%
		c. Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	500 Dokumen
		d. Opini WTP	WTP
		e. Persentase kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara	95%
		f. Persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak Mahkamah Agung	100%
		g. Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	95%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		h. Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan negara	80%
		i. Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	100%
		j. Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada	85%
		k. Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%
		l. Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%
3.	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	7 Regulasi
		b. Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “BB”	700 Satker
		c. Jumlah Perancangan dan Harmonisasi Kebijakan MA yang telah diselesaikan	35 Dokumen
		d. Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus	75%
4.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi
		b. Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	800 Berita
		c. Jumlah Pengguna aplikasi e-library	10.000 Pengguna
		d. Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	100%
		e. Persentase penyelesaian distribusi surat dan berkas perkara	100%
		f. Persentase tindaklanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100%
		g. Jumlah dukungan keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung	160 kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		h. Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung	11.000 Layanan
		i. Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	146 Laporan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan penetapan dari rencana kinerja tahunan yang menjadi dasar pernyataan komitmen untuk mempresentasikan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat mengukur capaian kinerja yang dilaksanakan secara terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Tujuan perjanjian kinerja, antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran pada Badan Urusan Administrasi sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Badan Urusan Administrasi telah disusun dan ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung, selanjutnya telah dijabarkan (casecading) menjadi kinerja seluruh unit sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perjanjian Kinerja mencakup sasaran, indikator kinerja dan target, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia profesional dan berkesinambungan	a. Jumlah pegawai yag direkrut dan pengisian jabatan	14.270 Orang
		b. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	1.500 Orang
		c. Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	99,6%
		d. Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%
		e. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70 Pegawai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	a. Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	70%
		b. Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKAKL	100%
		c. Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	500 Dokumen
		d. Opini WTP	WTP
		e. Persentase kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara	95%
		f. Persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak Mahkamah Agung	100%
		g. Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	95%
		h. Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan negara	80%
		i. Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	100%
		j. Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada	85%
		k. Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%
		l. Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%
3.	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	7 Regulasi
		b. Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “BB”	700 Satker
		c. Jumlah Perancangan dan Harmonisasi Kebijakan MA yang telah diselesaikan	35 Dokumen
		d. Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus	75%
4.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		b. Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	800 Berita
		c. Jumlah Pengguna aplikasi e-library	10.000 Pengguna
		d. Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	100%
		e. Persentase penyelesaian distribusi surat dan berkas perkara	100%
		f. Persentase tindaklanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100%
		g. Jumlah dukungan keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung	160 kegiatan
		h. Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung	11.000 Layanan
		i. Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	146 laporan

D. PENGUKURAN KINERJA

Badan Urusan Administrasi melakukan pengukuran kinerja setiap triwulan oleh seluruh unit eselon II. Hal ini dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja secara periodik. Adapun tujuan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilakukan Badan Urusan Administrasi, sebagai berikut:

- 1. Informasi terhadap perkembangan capaian kinerja.
- 2. Identifikasi kendala tercapai/tidak tercapai capaian kinerja.
- 3. Sebagai sumber data dalam penyusunan Laporan Kinerja.
- 4. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja pada periode berikutnya.



Bab III

Akuntabilitas

Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

Bab III
Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Badan Urusan PAdministrasi Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum target indikator kinerja sasaran telah tercapai, hanya terdapat beberapa indikator yang belum tercapai.

Terhadap sasaran maupun indikator kinerja yang belum tercapai, maka akan dilakukan evaluasi dan analisis dalam rangka perbaikan kinerja berikutnya. Adapun hasil pengukuran kinerja Badan Urusan Administrasi tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja BUA Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan	a. Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	14.270 Orang	11.959 Orang	83.81%
		b. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	1.500 Orang	1.695 Orang	113.00%
		c. Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	99,6%	100%	100.40%
		d. Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%	96,69%	96,69%
		e. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70 Pegawai	100 Pegawain	142,86%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	a. Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	70%	59,66%	85,23
		b. Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKAKL	100%	100%	100%
		c. Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	500 Dokumen	649 Dokumen	129,80%
		d. Opini WTP	WTP	WTP	100%
		e. Persentase kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara	95%	100%	105,26%
		f. Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100%	121,75%	121,75%
		g. Persentase realisasi anggaran belanja mahkamah Agung	95%	97.37%	102.50%
		h. Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan negara	80%	92.00%	115.00%
		i. Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	100%	98.28%	98.28%
		j. Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada	85%	80.57%	94.79%
		k. Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%	100%	117.65%
		l. Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%	100%	117.65%
3.	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Jumlah reglasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	7 Regulasi	12 Regulasi	171.43%
		b. Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “BB”	700 Satker	784 Satker	112.00%
		c. Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan	35 Dokumen	40	114.29%
		d. Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah diputus	75%	77.78%	103.70%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi	16 Aplikasi	160.00%
		b. Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	800 Berita	1,471 Berita	183.88%
		c. Jumlah Pengguna aplikasi e-library	10.000	10,627 Pengguna	106.27%
		d. Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	100%	100%	100%
		e. Persentase penyelesaian distribusi surat	100%	100%	100%
		f. Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan Pimpinan dengan tepat waktu	100%	100%	100%
		g. Jumlah dukungan keprotokolan dan keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung	160 kegiatan	162 kegiatan	101.25%
		h. Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung	11.000 layanan	11,884 Layanan	108.04%
		i. Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	146 Laporan	206 Laporan	141.10%

Sasaran 1

Mewujudkan Manajemen Sumber Daya Manusia Professional dan Berkesinambungan

Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkesinambungan, Badan Urusan Administrasi melakukan pengelolaan manajemen SDM menggunakan metode yang berkaitan dengan penilaian kompetensi yang objektif dan dapat diterima oleh organisasi maupun SDM pendukungnya atau yang lebih dikenal sebagai pendekatan kompetensi dengan kriteria objektif. Hal ini sejalan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010 – 2035 tentang Arah Pengelolaan SDM. Kinerja organisasi yang baik dipengaruhi

oleh sistem manajemen SDM yang terstruktur dimana dibutuhkan ketersediaan data kepegawaian, pelayanan kepegawaian yang transparan dan objektif, serta keterlibatan aktif dari SDM yang berada di dalamnya.

Merujuk pada konsep Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) dengan kriteria objektif, Badan Urusan Administrasi melaksanakan pengelolaan kepegawaian meliputi penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan pegawai secara objektif dan transparan, penempatan sesuai dengan kompetensinya dan pengembangan pegawai

berbasis kompetensi. Pengembangan pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dilakukan melalui pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja sebagai salah satu bahan pertimbangan karir untuk penataan ASN dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya.

Manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan erat kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi yang komprehensif, terintegrasi, dan akuntabel. Badan Urusan Administrasi memberikan kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur yang professional, berkualitas, dan kompeten agar mampu

menyelenggarakan pemerintahan secara bersih, jujur dan transparan melalui pembangunan dan pengembangan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi yaitu dengan mengembangkan sistem informasi pengelolaan data kepegawaian. Adanya sistem tersebut mendukung ketersediaan dan keakuratan data pegawai sehingga integrasi sistem informasi manajemen kepegawaian beserta sub sistemnya, dan penerapan layanan *paperless* akan sangat mempercepat proses pelayanan kepegawaian.

Sasaran strategis ini diukur berdasarkan 5 indikator kinerja dengan capaian tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Mewujudkan Manajemen Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berkesinambungan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian
Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan	Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	14.270 Orang	11.959 Orang	83.81%
	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	1.500 Orang	1.695 Orang	113.00%
	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	99,6%	100%	100.40%
	Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%	96,69%	96,69%
	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70 Pegawai	100 Pegawai	142.86%

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-1

Jumlah Pegawai yang Direkrut dan Pengisian Jabatan

Rekrutmen pegawai adalah proses mencari, menyaring, dan mempekerjakan calon pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rekrutmen merupakan bagian penting dalam membangun kebutuhan pegawai yang berkualitas dan berkontribusi pada tujuan organisasi. Mahkamah Agung sebagai lembaga penegak hukum, telah melaksanakan rekrutmen untuk dapat memenuhi kebutuhan pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Rekrutmen yang terencana dan sistematis merupakan elemen kunci dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di

Mahkamah Agung. Dengan merancang proses rekrutmen yang mempertimbangkan kebutuhan aktual akan keterampilan dan keahlian khusus, Mahkamah Agung dapat menjamin bahwa setiap posisi diisi oleh individu yang tepat. Analisis terhadap kondisi pegawai yang sudah ada sangat penting agar rekrutmen selanjutnya dapat menutupi kesenjangan keterampilan dan memenuhi kebutuhan jabatan. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, tetapi juga memungkinkan Mahkamah Agung untuk bergerak selaras dengan visi dan misinya, menjadikan lembaga lebih responsif terhadap tantangan dan tuntutan masyarakat dalam menjalankan fungsi kehakiman.

Tabel 3.3
Jumlah Pegawai Yang Direkrut dan Pengisian Jabatan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	14.270 Orang	11.959 Orang	83,81%	135,29	135,71	-	-

Berdasarkan nota dinas Kepala Biro Kepegawaian kepada Kepala Biro Perencanaan Dan Organisasi nomor 233/BUA.2/KP3.4.1/IX/2024 tanggal 23 September 2024, tentang Hasil Reviu Target Indikator Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2024, indikator ini dijabarkan ke dalam 4 (empat) sub indikator, target masing - masing sub indikator pada tahun 2024 diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Rincian Jumlah Pegawai yang Direkrut dan Pengisian Jabatan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	SATUAN
Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	14270	11.959	orang
Jumlah CPNS yang direkrut tahun 2024	4940	3.687	orang
Jumlah PPPK yang direkrut tahun 2024	9276	8.240	orang
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi yang direkrut tahun 2024	8	8	orang
Rekrutmen Hakim Ad Hoc 2024	46	24	orang

1. Jumlah CPNS Yang Direkrut Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen pegawai melalui pembukaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 4940 (empat ribu sembilan ratus empat puluh) formasi untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pelaksanaan rekrutmen CPNS dilaksanakan sesuai dengan tahapan

sebagaimana ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional sesuai dengan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 5900/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024. Tahapan seleksi ditampilkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.1 Tahapan Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024

Pada pelaksanaannya terdapat jabatan yang tidak terpenuhi kebutuhannya yaitu Jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, Arsiparis Ahli Pertama, Dokumentalis Hukum, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, dan Teknisi Sarana dan Prasarana.

Tabel 3.5
Tabel Penetapan Kebutuhan dan pelamar yang mendaftar CPNS pada Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Nama Jabatan	Penetapan Kebutuhan	Jumlah Pelamar	Lolos Seleksi Administrasi	Mengikuti SKB
1	Auditor Terampil	20	146	126	60
2	Dokumentalis Hukum	3.060	3.400	3.048	1.828
3	Perawat Terampil	6	90	67	18
4	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6	44	39	18

No	Nama Jabatan	Penetapan Kebutuhan	Jumlah Pelamar	Lolos Seleksi Administrasi	Mengikuti SKB
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	27	197	182	70
6	Analisis Perkara Peradilan	827	14.909	14.379	2.480
7	Arsiparis Ahli Pertama	21	17	16	14
8	Auditor Ahli Pertama	40	876	815	120
9	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	85	862	770	247
10	Penata Keprotokolan	52	356	344	154
11	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	6	993	856	18
12	Teknisi Sarana dan Prasarana	782	2378	2.257	1.349
13	Widyaiswara Ahli Pertama	5	151	132	15
14	Dokter Gigi Ahli Pertama - Dokter Gigi (Umum)	3	23	22	9
TOTAL		4.940	24.442	23.053	6.400

*) Data per tanggal 31 Desember 2024

Sampai dengan akhir tahun 2024, pelaksanaan seleksi CPNS telah memasuki tahapan Seleksi Kompetensi Bidang. Pada tahun ini, Seleksi Kompetensi Bidang terdiri dari Computer Assisted Test (CAT), Wawancara dan Kesamaptaan yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia diikuti sejumlah 6.400 peserta. Proses Integrasi nilai menunjukkan bahwa sejumlah 3.687 (tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh) peserta lulus Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 yang akan diumumkan pada Kamis, 9 Januari 2025 laman resmi www.mahkamahagung.go.id dan <https://sscasn.bkn.go.id/>.

Adapun 1.253 (seribu dua ratus lima puluh tiga) formasi yang belum terpenuhi akan diusulkan kembali ke Kementerian PAN RB sebagai bagian dari usulan penetapan kebutuhan Tahun 2025.

2. Jumlah PPPK Yang Direkrut Tahun 2024

Pelaksanaan rekrutmen Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan bagian dari upaya penataan tenaga Non-ASN di lingkungan pemerintahan untuk mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024. Sejalan dengan kebijakan pemerintah, pelaksanaan rekrutmen ini mengacu pada peraturan dan panduan teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Plt. Kepala BKN Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024. Secara umum, tujuan dari pelaksanaan seleksi ini adalah untuk

memastikan terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas dalam mendukung kinerja birokrasi yang profesional. Selain itu, pelaksanaan rekrutmen PPPK bertujuan menyelesaikan isu ketenagakerjaan Non-ASN dengan memberikan status kepegawaian yang lebih pasti melalui skema PPPK. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik dengan menempatkan tenaga kerja profesional sesuai kebutuhan organisasi serta mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi melalui pengisian formasi dengan tenaga kerja yang kompeten.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/1007/M.SM.01.00/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Persetujuan

Prinsip Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024, rekrutmen ini membuka kesempatan untuk 9.276 formasi yang tersebar di seluruh unit kerja Mahkamah Agung RI. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, pengadaan PPPK di Lingkungan Mahkamah Agung diperuntukkan bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data (Database) BKN. Rekrutmen PPPK sudah dilaksanakan dengan hasil sebagaimana terlampir. Namun sebagaimana terlihat dalam tabel, masih terdapat kekosongan sebanyak 1.036.

Tabel 3.6
Hasil Rekrutmen PPPK Tahun Anggaran 2024

No	Nama Jabatan	Formasi	Jumlah Pelamar	Lolos Seleksi	Lolos Tahap Seleksi Kompetensi
1.	Penata Layanan Operasional	3.750	3.653	3646	3641
2.	Pengelola Layanan Operasional	429	383	383	383
3.	Operator Layanan Operasional	4.383	3.705	3.703	3703
4.	Pengadministrasi Perkantoran	440	301	300	297
5.	Pengelola Umum Operasional	274	214	214	216
TOTAL		9.276	8.256	8.246	8.240

Untuk mengatasi kekosongan sejumlah 1.036 tersebut, tahap kedua rekrutmen dibuka bagi tenaga Non-ASN yang masih aktif bekerja di lingkungan Mahkamah Agung. Tahap ini bertujuan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja sesuai kebutuhan formasi yang tersisa.

Jika seluruh Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan

Mahkamah Agung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan timbul beberapa konsekuensi dalam pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran. Salah satu dampak signifikan adalah perlunya perubahan dalam penyediaan layanan operasional tertentu yang saat ini ditangani oleh PPNPN, seperti pengemudi, tenaga keamanan, dan

petugas kebersihan.

Pengangkatan semua PPNPN menjadi PPPK akan mengubah status hubungan kerja mereka menjadi lebih formal dan sesuai dengan perjanjian kerja yang tunduk pada ketentuan aparaturnegara. Hal ini berarti Mahkamah Agung tidak lagi dapat langsung mempekerjakan tenaga operasional tersebut secara mandiri. Sebagai gantinya, akan diperlukan penggunaan mata anggaran khusus untuk pengadaan layanan melalui vendor atau pihak ketiga. Konsekuensi penganggaran ini meliputi:

- 1. Peningkatan belanja operasional untuk kontrak layanan eksternal: Pengemudi, tenaga keamanan, dan petugas kebersihan harus disediakan oleh perusahaan penyedia jasa yang sesuai dengan standar pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 2. Pengaturan ulang pengelolaan anggaran: Perlu dialokasikan mata anggaran baru atau penyesuaian mata anggaran yang ada untuk membiayai kontrak vendor, yang mencakup biaya layanan dan keuntungan penyedia jasa.
- 3. Pengawasan kualitas layanan: Dengan bergantung pada pihak ketiga, Mahkamah Agung perlu menetapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan.

Perubahan ini memerlukan perencanaan strategis yang matang agar tidak mengganggu kelancaran operasional, serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan pengelolaan sumber daya

manusia yang efisien dan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

3. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Yang Direkrut Tahun 2024

a. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang lowong pada Mahkamah Agung dengan memperhatikan sistem merit dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjamin terpilihnya pejabat yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi dalam menduduki jabatan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan salah satu program Percepatan Reformasi Birokrasi, yakni Program Sistem Promosi PNS secara terbuka. Sepanjang tahun 2024, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan seleksi terbuka pengisian JPT sebanyak 2 (dua) kali dengan total keseluruhan formasi yang diisi sebanyak 8 (delapan) JPT Pratama melalui rekrutmen seleksi terbuka. Tahapan seleksi terbuka terdiri dari seleksi administrasi, *assessment center* (tes kompetensi manajerial dan sosio kultural) dan seleksi kompetensi bidang yang meliputi penulisan makalah, presentasi makalah, dan wawancara kompetensi teknis.

b. Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 Batch I dilaksanakan tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024 untuk mengisi 4 JPT Pratama terdiri dari:

Tabel 3.7
Tabel Seleksi Terbuka JPT Pratama Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 Batch I

No	Jabatan	Eselon	Formasi
1.	Kepala Biro Kepegawaian	Ila	1
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Ila	1
3.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	Ilb	1
4.	Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus	Ilb	1

Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 Batch II dilaksanakan tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 untuk mengisi 4 JPT Pratama terdiri dari:

Tabel 3.8
Tabel Seleksi Terbuka JPT Pratama Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 Batch II

No	Jabatan	Eselo
1.	Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan	Ila
2.	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Ila
3.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Ilb
4.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang	Ilb

4. Rekrutmen Hakim Ad Hoc Tahun 2024

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hakim terutama untuk menangani perkara-perkara tertentu, dilakukan rekrutmen hakim ad hoc. Pada Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan rekrutmen hakim ad hoc tipikor (tindak pidana korupsi) sebanyak 2 tahap.

Rekrutmen Hakim ad hoc tahap pertama di tahun 2024 merupakan lanjutan dari pelaksanaan rekrutmen tahapan sebelumnya

yaitu tahap ke XXI. Pada pelaksanaan Rekrutmen tahap XXI ini bekerjasama dengan PPSDM Consultant. Peserta yang mendaftar pada tahap XXI ini banyak 412 pelamar, setelah verifikasi dan validasi dokumen, maka yang lulus seleksi administrasi sebanyak 336 pelamar, setelah proses seleksi berupa asesmen, wawancara dan penulisan makalah maka yang lulus sebanyak 12 orang. Pada Rekrutmen tahap XXI ini anggaran yang dipergunakan sebesar Rp. 1.668.282.060 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan

juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam puluh rupiah).

Rekrutmen Hakim ad hoc tahap kedua di tahun 2024 merupakan lanjutan dari pelaksanaan rekrutmen tahapan sebelumnya yaitu tahap ke XXII. Pada pelaksanaan Rekrutmen tahap XXII ini bekerjasama dengan PPSPDM Consultant. Peserta yang mendaftar pada tahap XXII ini banyak 512 pelamar, setelah verifikasi dan validasi dokumen, maka yang lulus seleksi administrasi sebanyak 427 pelamar, setelah proses seleksi berupa asesmen, wawancara dan penulisan makalah maka yang lulus sebanyak 12 orang. Pada Rekrutmen tahap XXII ini anggaran yang dipergunakan sebesar Rp. 2.298.883.303 (dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus

delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah). Jadi total anggaran yang dialokasi untuk rekrutmen calon hakim ad hoc tahun 2024 seluruhnya sebesar Rp.3.967.165.363 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

Besarnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan rekrutmen calon hakim ad hoc tipikor ini memang tidak sebanding dengan hasil yang dicapai sebanyak 12 orang pelamar yang benar-benar lulus seleksi. Hal itu mencerminkan bahwa Mahkamah Agung telah benar-benar menyaring dengan sangat hati-hati terhadap peserta yang melamar. Sehingga hasilnya didapat peserta pelamar yang benar-benar berkualitas

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pemetaan Kompetensi Sebagai Dasar dalam Pengembangan Pegawai

Pemetaan Kompetensi merupakan satu bentuk kegiatan mendokumentasikan keterampilan, pengetahuan, perilaku, dan atribut yang dibutuhkan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan. Pemetaan kompetensi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode asesmen,

seperti psikotes, penulisan proposal, diskusi, dan wawancara. Dalam hal ini pemetaan pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dilakukan oleh Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung yang secara Struktur melekat di Biro Kepegawaian MA.

Tabel 3.9

Pegawai yang Telah Mengikuti Pemetaan Kompetensi Sebagai Dasar dalam Pengembangan Pegawai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pemetaan Kompetensi Sebagai Dasar dalam Pengembangan Pegawai	1.500 Orang	1.695 Orang	113,00	68,43	59,03	48,23	45,76

Sebagai lembaga penilaian kompetensi yang sudah memiliki akreditasi A, UPK (AC) Mahkamah

Agung tentu melaksanakan beberapa kegiatan yang telah tertuang dalam target kinerjanya. Pelaksanaan ini menjadi sangat penting karena ini menjadi salah satu bagian dari pemetaan yang dilakukan untuk

pengisian jabatan yang berada di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Untuk tahun 2024, UPK AC telah melakukan asesmen terhadap 1695 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10

Kegiatan Pemetaan Unit Penilaian Kompetensi (UPK)

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan Pemetaan (Unit Kerja)	Hadir	Tidak Hadir
1	29 s.d 31 Januari 2024	Penilaian Kompetensi Calon Auditor Ahli Madya	5	0
2	13 s.d 17 Mei 2024	Pemetaan Kompetensi Pegawai Wilayah Banjarmasin	56	2
3	27 s.d 31 Mei 2024	Fit and Proper Test Calon Hakim Militer Utama	3	0
4	27 s.d 31 Mei 2024	Fit and Proper Test Calon Hakim Militer Tinggi	14	0
5	27 s.d 31 Mei 2024	Fit and Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Militer Tingkat Banding	16	0
6	27 s.d 31 Mei 2024	Fit and Proper Test Calon Wakil Kepala Pengadilan Militer Tipe B	6	0
7	24 s.d 28 Juni 2024	Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional	50	0
8	27 s.d 28 Juni 2024	Fit and Proper Test Calon Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh	19	0
9	1 s.d 3 Juli 2024	Fit and Proper Test Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA	44	1
10	16 Juli 2024	Penilaian Potensi Pegawai Mutasi Dari Badan Peradilan ke Mahkamah Agung	29	2
11	23 s.d 25 Juli 2024	Pemetaan Kompetensi Pegawai Wilayah Medan	76	1
12	30 Juli s.d 1 Agustus 2024	JPTP	27	0
13	21 Agustus 2024	Penilaian Peripindahan Antar Instansi dan Mutasi Pusat	48	0
14	23 s.d 26 September 2024	Pemetaan Kompetensi Pegawai Badilum	39	2
15	30 September dan 3, 8 s.d 10 Oktober 2024	Pemetaan Kompetensi Pegawai Wilayah Jawa Tengah	128	0
16	13 s.d 14 November 2024	Seleksi Kepala Sub Bagian Kepeg dan IT Dilmiltama	3	0
17	18 s.d 22 November 2024	Seleksi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas II	76	1

18	25 s.d 28 November 2024	Pelaksanaan Pemetaan Pegawai Pelaksana November 2024	1056	83
Jumlah			1.695	92

Dari tabel tersebut diketahui bahwa jumlah pegawai yang semula di assesmement adalah sebanyak 1787 pegawai , namun yang hadir pada kegiatan hanya sebanyak 1695 pegawai (94,85%).

Angka tersebut memang lebih tinggi dari target semula yakni 1500 pegawai. hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah pegawai yang dipetakan pada tingkatan jabatan pelaksana, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pemetaan pegawai.

Dalam pemetaan kompetensi pegawai ada beberapa hal yang menjadi aspek penting yang dapat mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan dari proses pemetaan tersebut.

a. Perencanaan dan Pengaturan Waktu

1. Penjadwalan yang Optimal: Sebelum dilakukan pemetaan kompetensi, Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung RI akan menginformasikan surat Sekretaris Mahkamah Agung tentang pelaksanaan pemetaan kompetensi kepada Unit Pengguna dan peserta yang meliputi tanggal dan jadwal pelaksanaan pemetaan kompetensi. Hal ini untuk menghindari konflik jadwal peserta dengan kegiatan kedinasan lainnya.
2. Durasi Penilaian: Durasi penilaian individual pemetaan kompetensi kurang lebih 1 bulan untuk diserahkan kepada Pimpinan Unit Pengguna. Penentuan durasi tersebut tidak terlalu panjang atau terlalu singkat, sehingga efektif dan efisien.

b. Penggunaan Teknologi

Platform Digital: Menggunakan platform online untuk penilaian potensi, sehingga dapat mengurangi biaya perjalanan dan waktu yang dihabiskan untuk logistik. Contohnya, penggunaan Aplikasi *Assessment Center*.

c. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

1. Pelatihan Asesor dan Tenaga pendukung: Mengikutsertakan Asesor dan tenaga pendukung untuk mengikuti pelatihan, baik yang diadakan oleh Kementerian/Lembaga (BKN) maupun pihak ketiga. Asesor dan tenaga pendukung yang terlatih dengan baik akan lebih efisien dalam melaksanakan tugas pemetaan kompetensi, sehingga meminimalkan kebutuhan untuk banyak asesor dan tenaga pendukung.
2. Delegasi Tugas: Pembagian tugas berdasarkan keahlian masing-masing pegawai untuk memastikan bahwa setiap pegawai melakukan tugas yang sesuai dengan kompetensinya. Misalnya pranata komputer ditugaskan untuk melakukan batching aplikasi. Hal tersebut akan dituangkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.

d. Penggunaan Sumber Daya Material

1. Material yang Relevan: Materi yang digunakan dalam pemetaan kompetensi relevan dan tidak berlebihan disesuaikan tujuan pemetaan dan tupoksi peserta, sehingga tidak membuang-buang

sumber daya. Sebelum pemetaan kompetensi dilaksanakan, Asesor akan melakukan diskusi dengan narasumber dari Unit Pengguna agar pemberian materi yang digunakan relevan.

2. Mengurangi penggunaan kertas: dalam pemberian beberapa simulasi dengan menggunakan aplikasi. Misalnya simulasi Analisa kasus dilakukan dengan menggunakan aplikasi, sehingga mengurangi pemborosan kertas dan alat tulis.

e. Evaluasi dan Feedback

Setelah pemetaan kompetensi dilakukan, Tim UPK AC MA akan melakukan analisis untuk menilai efisiensi proses yang telah dilakukan. Hal ini akan membantu dalam perbaikan sistem di masa depan. Misalnya ketika proses pemetaan kompetensi masih dilakukan secara luring (offline), maka dibuat aplikasi *Assessment Center* untuk tes potensi dan untuk tes kompetensi bisa dilakukan secara daring supaya lebih efisien.

Dalam pelaksanaan ini ada beberapa catatan dalam penyelenggaran program ini.

1. Kegiatan pelatihan Sumber Daya Manusia (Asesor dan Tenaga pendukung) di Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kompetensi SDM.
2. Kegiatan penugasan Asesor UPK AC MA untuk membantu

kegiatan penilaian kompetensi pada Kementerian/Lembaga lain dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan menambah wawasan Asesor.

3. Kegiatan studi banding atau benchmarking yang telah dilakukan dengan Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) untuk meningkatkan inovasi dan kerjasama serta untuk mengetahui cara-cara terbaik dalam pencapaian kinerja.
4. Kegiatan rapat Monitoring dan Evaluasi untuk meninjau kembali capaian kinerja (jumlah target pemetaan pegawai), mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi, dan memastikan bahwa pegawai dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Dari beberapa catatan tersebut, diperoleh bahwa dukungan terhadap peningkatan kualitas SDM yang melaksanakan pemetaan pegawai mutlak menjadi titik sentral dalam keberhasilan organisasi. Keterlibatan tim asesor dalam kegiatan diluar UPK AC MA Ri juga memberikan pelajaran dan warna bagi pelaksanaan di internal. Sehingga dari hal utama tersebut, target yang akan diajukan untuk tahun berikutnya adalah peningkatan kompetensi bagi pengelola UPK AC agar memiliki kualitas dan standar yang sama dengan pengelola AC yang berada di luar MA.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3

Persentase Tingkat Kelengkapan Data Pegawai

Data pegawai merupakan bagian dari HRIS (*Human Resources Information System*) yang digunakan untuk penyelesaian layanan kepegawaian. Data pegawai yang akurat sangat diperlukan untuk mendukung proses layanan kepegawaian. Beberapa contoh layanan kepegawaian yang menggunakan sumber data pegawai yang valid dan lengkap adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan produk - produk kepegawaian, seperti Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan Promosi dan Mutasi, Surat Keputusan Kenaikan Gaji Pegawai, Surat Keputusan Pemberhentian dan Pensiun, dan sebagainya.
2. Prediksi pelayanan kepegawaian, seperti prediksi pegawai yang akan mendapatkan satya lencana, prediksi pegawai yang akan naik pangkat, prediksi pegawai yang

akan pensiun, dan sebagainya.

3. Monitoring pelaksanaan pelayanan kepegawaian, seperti monitoring Kenaikan Pangkat Otomatis, monitoring penerbitan surat tugas dan ijin belajar.

Indikator persentase tingkat kelengkapan data pegawai menggunakan data yang bersumber dari aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung yang diukur dengan formulasi dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah data pegawai yang valid}}{\text{Jumlah seluruh data pegawai Mahkamah Agung}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 99,6% dan perbandingan capaian tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Persentase Tingkat Kelengkapan Data Pegawai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Tingkat Kelengkapan Data Pegawai	99,6%	100%	100,40	99,45	99,09	98,55	97,78

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa persentase kelengkapan data Pegawai mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini karena adanya peningkatan fitur - fitur di SIKEP, baik itu pada front end dan back end. Komponen indikator kelengkapan data pegawai dapat dilihat dari kesesuaian antara data dan dokumen elektronik dari setiap komponen data pegawai dan data antara

SIKEP MA RI dengan data SIASN BKN. Adapun komponen indikator validitas data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nama lengkap
2. Gelar pendidikan
3. NIP/NRP
4. Tempat dan tanggal lahir

5. Pangkat pegawai terakhir
6. Jabatan pegawai terakhir
7. Satuan kerja pegawai

Tabel 3.12
Persentase Tingkat Kelengkapan Data Pegawai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

No	Tahun	Jumlah Data Pegawai yang Valid	Capaian
1	2021	30.023	98,55%
2	2022	32.893	99,09%
3	2023	31.814	99,45%
4	2024	32.731	100,40%

Persentase kelengkapan data pegawai pada SIKEP pada tahun 2024 telah mencapai 100% dengan target sebesar 99,6%. Jumlah kelengkapan data pegawai setiap bulan pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.13
Tingkat Kelengkapan Data Pegawai Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Data Pegawai yang Valid
1	Januari	31,995
2	Februari	31,982
3	Maret	31,923
4	April	31,789
5	Mei	33,385
6	Juni	33,372
7	Juli	33,189
8	Agustus	33,082
9	September	32,973
10	Oktober	32,948
11	November	32,829
12	Desember	32,731

Seluruh data pegawai pada SIKEP di Tahun 2024 telah lengkap 100%. Hal ini dikarenakan telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data dokumen dilakukan langsung dari sumber produsen produk kepegawaian seperti Surat Keputusan Promosi Mutasi, Pemberhentian Pensiun dan Kenaikan Gaji Berkala
2. Satuan kerja melakukan pemantauan dan pemutakhiran kelengkapan data dan dokumen masing-masing pegawai pada satuan kerja secara berkala

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4

Persentase Layanan Kepegawaian yang Selesai Tepat Waktu

Layanan kepegawaian yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian harus dilaksanakan tepat waktu karena merupakan hak pegawai yang harus dipenuhi oleh instansi. Indikator persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah layanan kepegawaian yang tepat waktu}}{\text{Jumlah layanan kepegawaian}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 810/SEK/SK/XIII/2020 tanggal 28 Desember 2020, tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, sumber data yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut berasal dari:

- a. Jumlah SK KP
- b. Jumlah SK Promosi
- c. Jumlah SK Mutasi
- d. Jumlah SK Pensiun
- e. Jumlah KGB
- f. Jumlah SK CPNS
- g. Jumlah SK PNS
- h. Jumlah SK JFT
- i. Jumlah Satya Lencana
- j. Jumlah izin belajar
- k. Jumlah Ujian Dinas dan PI

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 100% dan perbandingan capaian tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Persentase Layanan Kepegawaian yang Selesai Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%	96,69%	96,69	100	100	96,95	95,82

Rangkuman keseluruhan layanan kepegawaian per bulan selama tahun 2024 ditampilkan pada tabel dibawah ini

Tabel 3.15
Realisasi Masing-Masing Layanan Kepegawaian Tahun 2024

NO	NAMA LAYANAN KEPEGAWAIAN	Jumlah Layanan Tepat Waktu	Jumlah Total Layanan	Persentase Layanan Kepegawaian Yang Tepat Waktu
1	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat	382	389	98.20%
2	Penerbitan SK Promosi	0	0	0.00%
3	Penerbitan SK Mutasi	0	0	0.00%
4	Penerbitan SK Pensiun	1141	1141	100.00%

5	Kenaikan Gaji Berkala	451	451	100.00%
6	SK CPNS	1525	1593	95.73%
7	SK PNS	6	6	100.00%
8	SK Jabatan Fungsional Tertentu	0	0	0.00%
9	Satya Lencana	2310	2310	100.00%
10	Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri	544	544	100.00%
11	Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah	830	830	100.00%
12	Cuti	1023	1229	83.24%
TOTAL		8212	8493	96.69%

Layanan kepegawaian yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian mencakup kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

Dasar Hukum terbaru yaitu Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan atas Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS. Selain itu, mengacu pula kepada SOP yang terkait yaitu SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat dan SOP Pencetakan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat.

Kenaikan pangkat terdiri dari 6 Periode, yaitu 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober dan 1 Desember. untuk timeline tahap penetapan kenaikan pangkat pada setiap periode sudah ditentukan pada Surat Edaran Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS. Kenaikan Pangkat dikatakan tepat waktu jika Surat Keputusan Kenaikan Pangkat telah ditetapkan sebelum Periode Kenaikan Pangkat yang ditentukan (tgl SK Kenaikan Pangkat sebelum Periode Kenaikan Pangkat yang ditentukan).

Jumlah total layanan kenaikan pangkat sebanyak 389 layanan dan yang tepat waktu sebanyak 382 layanan, sehingga realisasinya sebesar 98,20%. Beberapa kendala dalam pelaksanaan kenaikan pangkat, antara lain:

- a) Masih kurang nya pemahaman Pengadilan Tingkat Banding tentang proses pengusulan Kenaikan Pangkat melalui aplikasi SIASN.
- b) Data pegawai di SIASN masih banyak yang belum update. Pengadilan Tingkat Banding tidak mengupdate secara berkala data pegawai di SIASN.
- c) Dokumen kelengkapan di SIKEP masih ada yang belum lengkap.
- d) Permasalahan SKP pada E-Kinerja.
- e) Template SK yang bervariasi tetapi BKN hanya menyediakan 1 (satu) format, sehingga menyebabkan format SK kurang sesuai.

Sehingga, diperlukan beberapa strategis yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain:

- a) Mengembangkan sistem yang lebih optimal pada SIKEP. SIKEP Menyediakan sistem pengusulan

data KP yang lebih optimal.

- b) SIKEP yang terintegrasi dengan SIASN BKN. Data dan Dokumen Pertek serta SK KP yang ada di SIASN bisa langsung terintegrasi di SIKEP
- c) Melakukan peremajaan data secara berkala pada SIKEP dan SIASN
- d) Melakukan Integrasi Sistem

2. Penerbitan Surat Keputusan Promosi dan Mutasi Pegawai

Dasar hukum pelaksanaan Promosi dan Mutasi mengacu kepada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, namun demikian belum dapat didefinisikan mengenai standar tepat waktunya karena SOP yang belum lengkap.

3. Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai

Dasar hukum penetapan pensiun mengacu kepada:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya.
- d) Peraturan BKN Nomor 2 Tahun

2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

- e) Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Nomor Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Selain itu, mengacu pula kepada SOP yang terkait yaitu SOP Penerbitan Surat Keputusan Pensiun. Indikasi tepat waktu adalah apabila Surat Keputusan Pensiun diterima oleh PNS sebelum memasuki Batas Usia Pensiun. Sebanyak 1.141 Surat Keputusan Pensiun yang diterbitkan, seluruhnya diterima tepat waktu dengan realisasi 100%.

Salah satu kendala pada pelayanan ini adalah terkait SOP Pencetakan Surat Keputusan MPP. Proses terakhirnya adalah Penerbitan SK MPP, namun pada SIKEP belum ada menu upload SK MPP, sementara status di SIKEP pegawai yang sedang menjalankan MPP sudah tidak aktif sehingga pengelola kepegawaian kadang lupa mengusulkan pensiun, hal ini dapat menyebabkan terhambatnya pegawai yang menjalankan MPP mendapatkan hak pensiunnya yang dibayarkan oleh PT. Taspen.

Sehingga, diperlukan beberapa strategis yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain:

- a) Untuk membantu kelancaran proses usulan MPP perlu adanya menu laporan MPP Pegawai pada aplikasi SIKEP, agar pengelola kepegawaian tidak lupa pegawai yang sedang menjalankan MPP diusulkan pensiunnya.
- b) Mengembangkan sistem yang lebih optimal pada SIKEP, untuk data pegawai yang menjalankan MPP statusnya aktif namun sudah tidak bekerja, dibedakan dengan pegawai yang memang sudah berhenti bekerja dengan status tidak aktif (ada perbedaan warna di SIKEP).
- c) Melakukan peremajaan data secara berkala pada SIKEP dan SIASN.
- d) Melakukan Integrasi Sistem.

4. Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala

Dasar hukum pelayanan ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Implementasinya berdasarkan SOP KGB III/d ke bawah dan SOP KGB IV/a ke atas di lingkungan Badan Urusan Administrasi dan Kepaniteraan. Indikasi Tepat Waktu untuk layanan ini adalah apabila Surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) diterima oleh PNS sebelum TMT KGB.

Sebanyak 451 Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala, seluruhnya disampaikan tepat waktu kepada pegawai yang bersangkutan dengan realisasi 100%. Kendala pada pelaksanaan layanan ini adalah kurangnya informasi terkait

data PNS yang mengajukan PMK, data pegawai yang mutasi antar instansi/ mutasi dari satker ke pusat atau sebaliknya, sehingga KGB yang telah terbit dilakukan perbaikan. Beberapa strategi yang perlu dilakukan antara lain:

- a) Penerbitan KGB 4 bulan sebelum TMT.
- b) Penambahan menu pada SIKEP untuk mencetak KGB melalui SIKEP.
- c) Notifikasi pada SIKEP untuk operator KGB terkait pegawai yang mengajukan PMK, data pegawai yang mutasi antar instansi/mutasi dari satker ke pusat atau sebaliknya.

5. Penerbitan Surat Keputusan CPNS

Dasar hukum pelayanan ini mengacu kepada Undang Undang No 20 Tahun 2023, Permenpan RB No 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan ASN. Implementasinya berdasarkan SOP Pencetakan SK CPNS. Indikasi Tepat Waktu untuk layanan ini adalah SK CPNS diterima satker yang bersangkutan sebelum TMT pengangkatan CPNS dijadikan sebagai dasar pemanggilan tugas (SMPT). Sebanyak 1.525 SK CPNS diterima tepat waktu oleh satker yang bersangkutan dari jumlah total sebanyak 1.593 SK CPNS Tahun 2024, sehingga realisasinya sebesar 95,37%.

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan layanan adalah banyaknya jumlah SK CPNS yang harus distribusikan di SIKEP di waktu tertentu (sebelum TMT CPNS), diperlukan strategi dan cara khusus untuk mengentri secara masal kedalam sistem kepegawaian hingga dapat diakses dan

ditindaklanjuti dengan penerbitan SPMT oleh pengelola kepegawaian di satuan kerja.

Strategi yang selama ini dilakukan dalam pelaksanaan layanan adalah Mengembangkan optimalisasi fungsi sistem aplikasi yang ada di MA dan saling terkoneksi satu sama lain, serta sistem tidak hanya sekedar mengenerate dokumen, tapi bisa mendeliver dokumen ke sistem layanan lain.

Saran untuk peningkatan efisiensi layanan adalah Melakukan pengintegrasian antar sistem yang ada di MA dan SIASN BKN untuk dokumen SK CPNS yang selesai ditandatangani secara elektronik, sehingga proses lebih cepat dan efisien, serta SK dapat diakses pihak yang berkepentingan.

6. Penerbitan Surat Keputusan PNS

Dasar hukum pelayanan ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020. Indikasi Tepat Waktu untuk layanan ini adalah SK PNS diterima satker yang bersangkutan setahun setelah TMT CPNS. Sebanyak 6 SK PNS, seluruhnya diterima tepat waktu oleh satker yang bersangkutan dengan realisasi 100%.

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan layanan ini adalah masih terdapat Pelatihan dasar CPNS yang belum dilakukan dalam rentang waktu 1 tahun setelah TMT CPNS sehingga menyebabkan CPNS tersebut menjadi terlambat untuk diangkat menjadi PNS

Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Verifikasi dan monitoring data CPNS yang akan

diangkat menjadi PNS dipastikan sudah selesai mengikuti Pelatihan dasar sebelum 1 tahun semenjak TMT CPNS nya

Saran untuk peningkatan efisiensi layanan adalah melakukan koordinasi dengan penyelenggara Pelatihan dasar agar CPNS dapat terlaksana sebelum 1 Tahun semenjak TMT CPNS

7. Penganugerahan Tanda Kehormatan

Perubahan dasar hukum pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Aturan tersebut belum tercantum pada SOP Pengusulan Penganugerahan Tanda Kehormatan maupun pada Dokumen Identifikasi Kebutuhan, namun demikian SOP Pengusulan Penganugerahan Tanda Kehormatan telah memenuhi proses bisnis untuk layanan kepegawaian dalam penganugerahan tanda kehormatan.

Indikasi tepat waktu untuk layanan ini adalah pengusulan tanda penghargaan sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan oleh Setmilpres. Adapun usulan tanda penghargaan harus diajukan paling lambat pada bulan Maret. Seluruh penganugerahan satya lencana dilaksanakan tepat waktu 100% sebanyak 2.310 layanan. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan layanan ini adalah sebagai berikut:

- Masih terdapat Dokumen yang diunggah pegawai pada SIKEP tidak sesuai dengan persyaratan
- Terdapat Verifikator dari Satuan Kerja Pertama dan Banding yang kurang

teliti dalam melakukan verifikasi

- Data Hukuman Disiplin yang tidak diunggah/tidak ada, sehingga verifikator tidak mengetahui jika pegawai tersebut memiliki riwayat terkena hukuman disiplin.

Strategi yang dilakukan dalam melaksanakan layanan ini adalah dengan menerbitkan edaran yang berisi himbauan kepada satuan kerja pengusul untuk melakukan peremajaan data di SIKEP. Saran untuk peningkatan efisiensi layanan adalah sebagai berikut:

- Perlu melakukan Monev rutin untuk menghindari adanya TMS (Tidak Memenuhi Syarat) berulang
- Perlu melakukan koordinasi langsung dengan Setmilpres terkait kekurangan dokumen persyaratan pegawai yang diusulkan

8. Penerbitan Surat Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri

Dasar hukum pelayanan ini mengacu kepada:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sebagaimana diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020).
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

Selain itu, pelaksanaan layanan ini berdasarkan SOP Penerbitan Surat Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri. Indikasi tepat waktu untuk layanan ini adalah sejak usulan ditarik dari surat dispo/usulan SIKEP masuk dengan tanggal upload surat tugas belajarnya sesuai dengan SOP. Layanan penerbitan Surat Tugas Belajar dan Surat Tugas Belajar Mandiri pada tahun 2024 sebanyak 544 layanan yang seluruhnya dilaksanakan tepat waktu sehingga realisasinya sebesar 100%.

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan layanan adalah adanya keterbatasan pemanfaatan sistem digital secara penuh, di mana sebagian proses masih memerlukan pengecekan manual, sehingga efisiensi kerja belum optimal. Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan layanan adalah:

- Memperluas pemanfaatan teknologi informasi dengan mengoptimalkan aplikasi seperti SIKEP untuk seluruh tahapan, mulai dari pengajuan hingga penerbitan surat.
- Menetapkan indikator kinerja, seperti target waktu penyelesaian dan tingkat kepuasan pemohon, untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas SOP secara berkala.
- Saran untuk peningkatan efisiensi layanan adalah sebagai berikut:
 - Detailkan Kelengkapan Berkas**
Tambahkan persyaratan rinci dalam proses pengajuan.
 - Hindari Duplikasi Proses**
Sederhanakan langkah verifikasi yang melibatkan lebih dari satu

- pelaksana untuk efisiensi.
- **Tambahkan Lampiran Format Surat**
Sertakan format baku surat tugas belajar untuk keseragaman.
 - **Masukkan Indikator Keberhasilan**
Contoh: waktu penyelesaian sesuai target, tingkat kepuasan pemohon.
 - **Evaluasi SOP Secara Berkala**
Misalnya, setiap 2 tahun untuk penyesuaian dengan regulasi atau teknologi baru.

9. Layanan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Dasar hukum pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah adalah Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59/SEK/SK/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang implementasinya berdasarkan SOP Penyelesaian Ujian Dinas Elektronik dan Ujian Penyesuaian Ijazah. Indikasi tepat waktu pada pelaksanaan layanan ini adalah sesuai dengan batas pengusulan ujian dinas pada SOP, mulai dari pengumuman, pembukaan pendaftaran ujian dinas hingga sertifikat terupload di SIKEP membutuhkan waktu 28 hari.

Sebanyak 830 usulan ujian dinas, seluruhnya terlaksana tepat waktu sehingga realisasinya sebesar 100%. Kendala yang dialami selama pelaksanaan layanan adalah penetapan jadwal pelaksanaan yang masih membutuhkan jadwal kosong dari BSDK terkait *e-learning*, data dan *e-doc*

persyaratan pada SIKEP yang isinya masih tidak sesuai padahal telah dilakukan validasi dan verifikasi dari Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan layanan adalah menerbitkan panduan tata cara peremajaan data dan dokumen terkait persyaratan. Saran untuk peningkatan efisiensi layanan adalah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan *e-exam* setiap tahunnya bersama tim *e-learning*, melakukan pembaruan soal ujian.

10. Layanan Cuti Pegawai

Dasar hukum pelaksanaan cuti pegawai mengacu kepada Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 dan Edaran Sesma Nomor 13 Tahun 2019 sedangkan untuk cuti PPPK mengacu kepada SK Sekma Nomor 212/SEK/SK.KP5.3/II/2024 yang implementasinya berdasarkan SOP Cuti di Lingkungan BUA kewenangan Karo, SOP Cuti di Lingkungan BUA kewenangan Sesma, SOP Cuti Luar Negeri, SOP Cuti Luar Tanggungan Negara, dan SOP SK Cuti Luar Tanggungan Negara.

Indikasi tepat waktu pada pelaksanaan layanan apabila izin cuti tahunan, cuti besar, dan cuti di luar tanggungan negara (CLTN) terbit sebelum yang bersangkutan melaksanakan cuti. Jumlah total layanan cuti sebanyak 1.229 layanan, sedangkan yang tepat waktu sebanyak 1.023 layanan, sehingga realisasinya sebesar 83,24%. Kendala yang dialami selama pelaksanaan layanan adalah sebagai berikut:

- a) Masih ada pegawai yang mengajukan

- cuti yang sifatnya tidak mendesak setelah melaksanakan cuti seharusnya cuti yang sifatnya tidak mendesak, diajukan sesuai dengan aturan surat edaran sesma no. 13 tahun 2019.
- b) Belum terintegrasi data cuti pada SIKEP dengan komdanas.
- c) Sehingga, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut perlu dilakukan beberapa hal, antara lain:
- d) Diintegrasikannya menu ketidakhadiran pada SIKEP dengan komdanas
- e) Integrasi data persuratan bagian pensiun dan TU Karo Kepegawaian
- f) Penambahan menu pengajuan cuti pada SIKEP dengan terintegrasi komdanas
- g) Tersedianya aplikasi pengajuan cuti

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pembinaan Rohani dan Mental

Indikator ini untuk mengukur jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 70 pegawai dan perbandingan capaian tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.16
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pembinaan Rohani dan Mental

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70 pegawai	100 pegawai	142,86	100	107,14	100	100

Realisasi indikator kinerja ini dilaksanakan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dikarenakan pelaksanaannya diadakan tidak menggunakan anggaran Tahun 2024 dan dilakukan secara sederhana serta pembinaannya dilakukan oleh Kepala Biro Umum langsung. Pembinaan tersebut dihadiri oleh 100 pegawai dengan target 70 pegawai sehingga capaiannya sebesar 143%.

Sasaran 2
Meningkatnya Layanan Perencanaan, Keuangan dan BMN Yang Akuntabel

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu didukung sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel serta sistem kinerja yang ideal. Salah satu tugas dan fungsi Badan Urusan Administrasi adalah melaksanakan dukungan di bidang perencanaan, keuangan dan penatausahaan aset Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

di bawahnya. Hal ini dapat dilihat dengan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana. Dalam setiap proses pelaksanaannya urusan perencanaan program dan anggaran harus melibatkan semua unsur yang ada pada Lembaga Peradilan, sama halnya dengan pengelolaan data BMN secara akurat yang bersifat terperinci, serta penataan keuangan dan

aset yang transparan dan akuntabel. Hal ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan terkait alokasi anggaran untuk perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan aset.

Sasaran strategis ini diukur berdasarkan 12 indikator kinerja dengan capaian tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.17
Meningkatnya Layanan Perencanaan, Keuangan dan BMN yang Akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	a. Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	70%	59.66%	85.23
	b. Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKAKL	100%	100%	100
	c. Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	500 Dokumen	649	129.80
	d. Opini WTP	WTP	WTP	100
	e. Persentase kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara	95%	100.00%	105.26
	f. Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100%	121.75%	121.75
	g. Persentase realisasi anggaran belanja mahkamah Agung	95%	97.37%	102.50
	h. Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan negara	80%	92.00%	115.00
	i. Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	75%	98.28%	98.28

j.	Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada	85%	80.57%	94.79
k.	Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%	100%	117.65
l.	Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%	100%	117.65

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-1
Persentase Terpenuhinya Usulan Rencana Kerja dalam Pagu Indikatif

Bermula dari adanya kebutuhan belanja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka Mahkamah Agung dipandang perlu mengusulkan besaran rencana kebutuhan anggaran tersebut melalui usulan baseline atau angka kebutuhan dasar, yang akan digunakan Kementerian Keuangan melakukan assessment kebutuhan anggaran Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas tentang besaran pagu indikatif Mahkamah Agung. Sehingga untuk mengukur realisasi indikator ini dilakukan dengan membandingkan antara jumlah pagu indikatif dengan jumlah usulan rencana kerja. Pagu indikatif Mahkamah Agung digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Prioritas dan Tema Pembangunan.
- a) Prioritas pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor

18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

b) Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya 2025-2029. Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif

- dan Berkelanjutan” dipandang sebagai upaya untuk memenuhi target-target sasaran akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.
2. Tema kebijakan fiskal tahun 2024.

Postur makro fiskal tahun 2024 diarahkan konsolidatif, tetapi tetap fleksibel untuk memberi ruang bagi pencapaian prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi, dengan mempertimbangkan (i) penyelesaian agenda pembangunan, Major Project, dan janji Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara; serta (ii) penyelenggaraan pemilihan Presiden Republik Indonesia (pelaksanaan tahun politik).
3. Pokok-pokok kebijakan belanja K/L
- Tahun Anggaran 2021 yang bertujuan untuk mencapai Sasaran Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam RKP tahun 2021 dengan cara mendorong reformasi belanja dalam rangka penyehatan fiskal sekaligus penguatan efektifitas belanja dalam menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Rincian pagu indikatif belanja Mahkamah Agung TA. 2024 terdiri dari 4 lampiran sebagai berikut:

a) Rincian Program yang disusun menurut sumber dana.

b) Rincian Prioritas Kementerian/ Lembaga yang disusun menurut Program, Kegiatan, Output/Proyek, Target, dan Alokasi.

c) Rincian rencana penarikan proyek yang dibiayai pinjaman dan hibah luar negeri serta pinjaman dalam negeri.

d) Rincian rencana penarikan proyek yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Tabel 3.18
Tabel Perbandingan Usulan Renja dengan Pagu Indikatif

Dalam Ribuan

Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
Usulan Rencana Kerja (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Usulan Rencana Kerja (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Usulan Rencana Kerja (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Usulan Rencana Kerja (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)
13.800.181.460	10.644.847.386	16.680.352.795	11.570.133.400	17.659.865.389	11.816.709.390	20.369.794.180	12.152.558.495

Mahkamah pada tanggal 18 Maret 2024 mengusulkan kebutuhan anggaran untuk tahun 2025 melalui usulan *baseline* kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas sebesar Rp20.369.794.180.000, namun berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan RI Nomor S-346/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Bappenas Nomor B.201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024 hal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi

Tabel 3.19
Persentase Terpenuhinya Usulan Rencana Kerja dalam Pagu Indikatif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	70%	59,66%	85,23	89,41	95,71	99,09	110,20

Capaian kinerja yang tidak mencapai target pada indikator ini dikarenakan Kementerian Keuangan dalam hal ini Pemerintah Indonesia masih fokus untuk pembangunan IKN seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 serta program Presiden baru yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, sehingga berdampak pada alokasi anggaran yang terbatas bagi seluruh Kementerian/Lembaga selain Mahkamah Agung pada tahun anggaran 2024.

Khusus TA 2025, Mahkamah Agung mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp12.152.558.495.000,00. Berdasarkan surat keputusan tersebut maka capaian atas Indikator Persentase Terpenuhinya Usulan Rencana Kerja Dalam Pagu Indikatif Pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 59,66%, kurang dari target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 70%.

Mahkamah Agung pada awal tahun sebelum pagu indikatif terbit telah berupaya mendapatkan pagu indikatif yang sesuai dengan kebutuhan dengan bersurat resmi kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 95/KMA/RA1.6/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Permohonan Usulan Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025. Pada surat tersebut telah merinci kebutuhan anggaran Mahkamah Agung Tahun 2024 berikut dengan data dukung yang lengkap, hingga usulan tersebut ditelaah oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-2

Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Rencana Kerja dengan RKA K/L

Salah satu dokumen penganggaran adalah RKA-KL yang terdiri dari rencana kerja dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja dimaksud. Indikator ini untuk mengukur kesesuaian rencana kerja yang akan tertuang dalam RKAKL dengan tepat sasaran sesuai dengan target capaian yang tertuang dalam Rencana Strategis maupun dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran.

Dalam pentahapannya Rencana Kerja Anggaran terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran Mahkamah Agung, proses penyusunan anggaran dimulai dari Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, sampai dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran yang bersifat final dengan proses penyelesaian melalui pendampingan dan proses penelaahan lebih lanjut. Dalam menyusun rencana program dan anggaran usulan *baseline* dijadikan sebagai bahan acuan

dalam menentukan besaran pagu indikatif Mahkamah Agung. Formulasi perhitungan yang dipergunakan untuk mengukur realisasi adalah:

$$\frac{\text{Jumlah program dan kegiatan yang tersusun dalam aplikasi KRISNA}}{\text{Jumlah program dan kegiatan yang tersusun dalam aplikasi SAKTI}} \times 100\%$$

Proses Perencanaan dan Penganggaran di lingkup Mahkamah Agung RI, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tahapan yang meliputi :

- 1. Penyusunan Renja.
- 2. Penyusunan RKA.
- 3. Penyusunan rancangan daftar isian Pelaksanaan anggaran (DIPA).

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 100% dan perbandingan capaian tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20
Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Rencana Kerja dengan RKA K/L

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKA K/L	100%	100%	100	100	100	100	100

Mahkamah Agung memiliki 2 program dan 34 kegiatan, dimana program pertama (Program Penegakan dan Pelayanan Hukum) memiliki 9 kegiatan dan program kedua (Program dukungan Manajemen) memiliki 25 kegiatan. Secara keseluruhan, dari 2 program dan 34 kegiatan yang dimiliki Mahkamah Agung, tersusun pada “Aplikasi KRISNA” sebanyak “2 program dan 34 kegiatan” dan pada “Aplikasi SAKTI”, jumlah program dan kegiatan yang tersusun sebanyak “2 program dan 34 kegiatan”.

Begitu juga dengan unit Badan Urusan Administrasi memiliki 1 Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan 8 Kegiatan. Program dan kegiatan pada Badan Urusan Administrasi yang telah tersusun dalam Aplikasi Sakti telah sesuai dengan penyusunan rencana kerja dalam Aplikasi Krisna sehingga secara keseluruhan capaian kinerja pada indikator persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKA-KL mencapai 100%.

Capaian kinerja ini diukur berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan informasi kinerja yang meliputi sasaran strategis dan indikatornya, program dan sasaran program beserta indikatornya, dan kegiatan dan sasaran kegiatan beserta indikatornya. Oleh karena itu perlu adanya kesesuaian antara rencana kerja dengan RKAKL.

Proses penyusunan RKAKL pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi memerlukan proses pendampingan penyusunan rencana anggaran untuk menghasilkan rencana kerja anggaran yang sesuai dengan peraturan dan kaidah penganggaran yang berlaku. Selain menyusun rencana kerja anggaran yang sesuai dengan peraturan dan kaidah penganggaran, penyusunan rencana kerja

anggaran juga harus efisien dan efektif, sehingga apa yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di satuan kerja.

Badan Urusan Administrasi melalui Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan pendampingan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran pada 923 satuan kerja daerah dan 7 unit satuan kerja pusat eselon I, hal ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan fase anggaran sepanjang tahun. Pendampingan tersebut dilakukan dengan cara melakukan rapat koordinasi dan konsultasi di setiap Pengadilan Tingkat Banding beserta Pengadilan Tingkat Pertama dibawahnya serta unit Eselon II di bawah Badan Urusan Administrasi.

Adapun kendala dalam proses pendampingan penyusunan anggaran TA 2024, Biro Perencanaan dan Organisasi melalui Bagian penyusunan rencana anggaran tidak melakukan pendampingan penyusunan RKA-K/L ke daerah sehingga pendampingan dilakukan melalui virtual *zoom meeting*. Namun dengan adanya kendala-kendala tersebut, tidak menghambat jalannya proses pendampingan penyusunan anggaran, karena sistem pendampingan juga didampingi dan direviu oleh APIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi dan keabsahan informasi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran. Apabila dalam reviu ditemukan kekeliruan atau kelemahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, maka tim reviu berkewajiban untuk menyampaikan kekeliruan tersebut kepada penyusun untuk kemudian dilakukan perbaikan atau penyelesaian. Reviu Rencana Kerja Anggaran oleh APIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung dilaksanakan pada saat Penyusunan Rencana Kerja Anggaran berdasarkan Pagu Anggaran pada bulan Juli, serta pada saat

dilakukan penyesuaian Rencana Kerja Anggaran dengan alokasi anggaran pada bulan Oktober. Reviu dan penelitian Rencana Kerja Anggaran diprioritaskan pada rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.

Sedangkan dalam penyesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja (Krisna) dan

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-3

Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah yang telah Disahkan

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Mahkamah Agung dengan Pemberi Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan hibah, setiap penerimaan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang telah disahkan.

Pelaksanaan hibah di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dipersyaratkan tidak akan mempengaruhi independensi Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hibah yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

RKA-KL (SAKTI), tidak mengalami kendala yang begitu signifikan, hal ini dikarenakan penginputan program dan kegiatan yang ada pada aplikasi SAKTI berbasis data yang ada pada aplikasi KRISNA (tersistem). Oleh karena itu secara sistem aplikasi SAKTI sudah berdasarkan aplikasi KRISNA, sehingga program dan kegiatan antara aplikasi SAKTI dan Aplikasi Krisna sudah sesuai

adalah hibah barang, uang dan jasa. Hibah tersebut secara keseluruhan diterima dari pemberi hibah dalam negeri dan dipergunakan untuk menunjang tugas fungsi peradilan dalam melakukan pelayanan publik.

Mahkamah Agung pada Tahun Anggaran 2024 telah menetapkan target kinerja penatausahaan hibah sebanyak 500 dokumen hibah. Seiring berjalannya waktu dari periode Januari sampai dengan Desember tahun 2024 Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya telah menerima hibah sebanyak 649 dokumen dengan nilai perolehan sebesar **Rp.180.372.572.754,00**. Hibah tersebut dapat dikelompokkan menjadi: Hibah Barang Rp.138.370.912.348,00 (603 dokumen), Hibah Uang Rp.212.524.000,00 (9 dokumen) dan Hibah Jasa Rp.35.789.136.406,00 (37 dokumen). Namun dalam total nilai perolehan tersebut, terdapat hibah tahun anggaran yang lalu (TAYL) yang disahkan pada tahun anggaran 2024 ini sebesar Rp.60.546.353.945,00 (105 dokumen). Berikut capaian kinerja pada tahun anggaran 2024.

Tabel 3.21
Realisasi Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah Yang Telah Disahkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah yang telah Disahkan	500 Dokumen	649 Dokumen	129,80	136,90	110,86	126,29	99,71

Sumber : Aplikasi Sehati Per 4 Januari 2024

Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan sebagaimana tersebut dalam matrik di atas dapat dijelaskan bahwa hibah yang disahkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada tahun anggaran 2024 sebanyak 649 dokumen (realisasi), dengan target sebanyak 500 dokumen sehingga capaian kinerjanya melebihi dari target yang ditetapkan atau 130%.

Keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini dikarenakan peran seluruh satuan kerja pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang semakin sadar akan tanggung jawab kerja terkait pelaporan setiap hibah yang diterima di Satuan Kerja masing-masing, serta banyak pemberi hibah yang memberikan hibah kepada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di tahun 2024. Seperti diketahui bahwa penerimaan hibah adalah pemberian yang diberikan oleh pemberi hibah kepada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan suka rela tanpa ada klausul apapun juga, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya selaku

penerima hibah bersifat pasif, satuan kerja tidak disarankan untuk meminta apapun kepada pihak lain dalam bentuk uang, barang dan jasa sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi agar tidak mengganggu independensi peradilan dalam mewujudkan kepastian hukum.

Meskipun pencapaian kinerja ini melebihi target yang ditetapkan, terdapat beberapa kendala dalam pencapaian kinerja ini, diantaranya:

- 1. Masih banyak satuan kerja yang belum tepat waktu dalam pengesahan hibah.
- 2. Karena hibah bersifat pasif, maka banyak pemerintah daerah memberikan hibah di akhir tahun sehingga menyulitkan satker dalam proses pengesahannya.
- 3. Masih kurang patuh satker dalam pelaporan hibah.
- 4. Masih terdapat satuan kerja yang belum memahami alur pengadministrasian hibah.

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja "Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan" selama tahun 2020-2024:

Tabel 3.22
Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah Yang Telah Disahkan

Indikator Kinerja	Realisasi				
	2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	649 Dokumen	538 Dokumen	392 Dokumen	434 Dokumen	346 Dokumen

Selama periode 2020 s.d 2024, jumlah dokumen yang disahkan tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah 649 Dokumen, peningkatan kinerja ini disebabkan karena terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Nomor Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 920/SEK/SK/

VII/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Barang/Jasa dari Mitra Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1170/SEK/OT.01.1/6/2023 hal Pemberitahuan Usulan Izin Persetujuan Hibah Melalui Aplikasi e-IPLANS sehingga satuan kerja penerima hibah menatausahakan hibahnya sesuai aturan yang berlaku.

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-4
Opini WTP

Laporan Keuangan Mahkamah Agung yang berkualitas disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja dan Pendapatan, Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Laporan Keuangan Mahkamah Agung disajikan dengan handal, bebas dari kesalahan penyajian yang material, dan didukung dengan adanya pengungkapan

catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara keseluruhan (full disclosure), hal ini guna mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah WTP dan perbandingan capaian tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.23
Opini WTP

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Opini WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100

Opini WTP diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja dan Pendapatan, Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta adanya kecukupan pengungkapan yang memadai (*adequate disclosure*) sesuai SAP. Kekurangan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual adalah relatif lebih kompleks dibanding basis kas maupun basis kas menuju akrual sehingga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi akuntansi yang memadai.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP dari BPK pada tahun 2024 tidak terlepas dari kegiatan yang telah dilakukan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sebagai berikut.

1. Monitoring saldo awal (LRA, Neraca, LO, dan LPE), koreksi kesalahan penyajian data keuangan tahun berjalan (LRA, Neraca, LO, dan LPE), dan monitoring penyusunan laporan keuangan satuan kerja, koordinator wilayah dan Unit Eselon I melalui kegiatan Pendampingan maupun kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan.
2. Monitoring data PNBPN, Kas Di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang PNBPN, Persekot Barang, Pendapatan Diterima Dimuka, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Persediaan, Aset, Hibah dan Transaksi Resiprokal.
3. Pemantauan dan telaah data aplikasi MonSAKTI, aplikasi SAKTI, Aplikasi Komdanas, serta Aplikasi e-BIMA.

4. Koreksi data (LRA, Neraca, LO, dan LPE) sesuai temuan pemeriksaan BPK, serta mencantumkan hasil koreksi tersebut dalam Berita Acara Asersi Final (Tripartit) yang ditandatangani oleh BPK, Kementerian Keuangan, dan Mahkamah Agung.
5. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 sesuai dengan rencana aksi.
6. Menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu Badan Pengawasan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023, Semester I Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2024.
7. Melaksanakan *Entry Meeting* dan *Exit Meeting* atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Pendahuluan dan Lanjutan tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBN, Keuangan Perkara, dan Uang Titipan Pihak Ketiga.
8. Melaksanakan kegiatan pendampingan BPK atas pemeriksaan PDTT, pemeriksaan Interim, dan pemeriksaan Laporan Keuangan.
9. Penyusunan atas pemutakhiran Revisi Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang berisi kebijakan-kebijakan akuntansi sebagai berikut:
 - Kebijakan Umum
 - Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO
 - Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban
 - Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara

Kas • Kebijakan Akuntansi Piutang • Kebijakan Akuntansi Persediaan • Kebijakan Akuntansi Aset Tetap • Kebijakan Akuntansi Properti Investasi • Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya • Kebijakan Akuntansi Penyusutan dan Amortisasi • Kebijakan Akuntansi Kewajiban • Kebijakan Akuntansi Ekuitas • Kebijakan Akuntansi Hibah • Kebijakan Laporan Keuangan Konsolidasian • Kebijakan Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Peristiwa Luar Biasa • Kebijakan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan • Kebijakan Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga Revisi pedoman ini akan dilanjutkan pada tahun 2025 karena menunggu kebijakan baru sesuai arahan Pembina Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan.	I Tahun 2024, Triwulan II Tahun 2024, Semester I Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2024 untuk Satuan kerja BUA.
10. Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua	11. Melaksanakan kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semesteran, dan Tahunan.
Bagian Akuntansi menyusun Laporan Keuangan <i>Unaudited</i> Tahun 2023, Laporan Keuangan <i>Audited</i> Tahun 2023, Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024, Triwulan III Tahun 2024 untuk Laporan Keuangan Mahkamah Agung dan Eselon I BUA, serta Laporan Keuangan <i>Unaudited</i> Tahun 2023, Laporan Keuangan <i>Audited</i> Tahun 2023, Laporan Keuangan Triwulan	12. Melaksanakan kegiatan konsolidasi laporan keuangan Triwulanan III secara online melalui aplikasi zoom meeting.
	13. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi internal maupun eksternal sebagai berikut:
	• Kegiatan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN Jakarta VI (satuan kerja BUA); • Kegiatan rekonsiliasi internal antara Operator Modul GLP Satuan kerja BUA dengan Bendahara Penerimaan (satuan kerja BUA); • Kegiatan rekonsiliasi internal antara Operator Modul GLP Satuan kerja BUA dengan Bendahara Pengeluaran (satuan kerja BUA); • Kegiatan rekonsiliasi internal antara Operator Modul GLP dengan Operator Aset Tetap dan Operator Persediaan (satuan kerja BUA); • Kegiatan rekonsiliasi internal Data Aset (BMN) Tingkat Lembaga; • Kegiatan rekonsiliasi internal Data Hibah Tingkat Lembaga; • Kegiatan rekonsiliasi internal Data TP/TGR Tingkat Lembaga; • Kegiatan rekonsiliasi internal Data PNBPN, Piutang PNBPN Tingkat Lembaga; • Kegiatan rekonsiliasi internal Data Persekot Barang (Belanja Dibayar Dimuka), Utang Pihak Ketiga (Belanja

Yang Masih Harus Dibayar) Tingkat Lembaga; • Kegiatan rekonsiliasi internal Data Uang Titipan Pihak Ketiga Tingkat Lembaga.	Minimum Kapitalisasi Aset Tetap, Hibah Langsung Belum Disahkan, Belanja Dibayar Dimuka (Persekot Barang), koreksi data Laporan Operasional (LO) atas Belanja yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 dan kesalahan pembebanan akun, serta pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); • Sosialisasi update terbaru fitur-fitur MonSAKTI dan telaah mandiri data Modul GLP berdasarkan data MonSAKTI; • Helpdesk pemasalahan dibidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
14. Koordinasi bagian akuntansi dengan unit-unit terkait meliputi:	Adapun langkah-langkah serta upaya mempertahankan opini WTP dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien sebagai penunjang keberhasilan antara lain:
• Pelaporan keuangan (data PNBPN, data PNBPN yang belum disetorkan dan membentuk Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang PNBPN, Pendapatan Diterima Dimuka, data Persekot Barang, data Belanja yang Masih Harus Dibayar, data Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, data Aset, data Hibah, data Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satuan kerja BUA, serta pelaporan pengelolaan biaya proses dan uang titipan pihak ketiga); • Koordinasi dengan Pembina Bimbingan Akuntansi Instansi Dit. APK Kementerian Keuangan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan; • Sosialisasi Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2022 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya; • Sosialisasi current issues penyusunan laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) Tahun 2024 yang meliputi Perubahan Nilai	1. Meningkatkan komitmen dan integritas pimpinan hingga staf dalam mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang sehat, efisien, akurat, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Melakukan pembinaan, asistensi, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan secara berkala dan berkesinambungan atas pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan kepada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. 3. Menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi yang intensif secara berjenjang antar unit organisasi tingkat K/L, tingkat eselon I, tingkat wilayah, dan tingkat satuan kerja serta unit internal pada bagian masing-masing. 4. Menerapkan slogan kerja keras, kerja

cerdas, kerja tuntas, dan kerja bersama dalam mengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang efisien, akurat, akuntabel, dan transparan serta tepat saji.

5. Memanfaatkan menu *to do list*, monitoring, dan daftar/perincian pada aplikasi MonSakti untuk memantau dan menindaklanjuti kualitas data laporan keuangan agar tidak dikenai sanksi administratif dari KPPN/Kanwil DJPB penundaan pencairan anggaran apabila tidak menyelesaikan penginputan, pencatatan, koreksi data, dan rekonsiliasi yang sudah menjadi kewajiban satuan kerja.
6. Menyusun laporan keuangan dari tingkat satker, wilayah, eselon I, dan kementerian/ lembaga dengan tepat waktu.
7. Melakukan verifikasi dan melaporkan

saldo kas keuangan perkara, beserta saldo keuangan perkara di rekening pemerintah lainnya (RPL) yang berada dalam penguasaan Bendahara Penerimaan (termasuk saldo RPL) setiap bulan sebagai Lembar Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan ke KPPN, serta mengungkapkannya pada penjelasan pos-pos neraca dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

8. Meminimalisir temuan berulang BPK atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bahwa masih terdapat temuan ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan dan belum berjalannya sistem pengendalian internal (SPI) secara memadai.
9. Mengimplementasikan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK).

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-5

Persentase Kerugian Negara yang Dikembalikan ke Kas Negara

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Proses tuntutan yang dilakukan terhadap Bendahara disebut Tuntutan Perbendaharaan (TP), sedangkan proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri (bukan Bendahara) dan Pejabat Lain disebut Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara.

Kerugian negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 3 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013

tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya diketahui dari informasi temuan pemeriksaan dan kerugian negara yang berasal dari:

1. Laporan hasil pemeriksaan BPK;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
3. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan;
4. Pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Kantor/Satker;
5. Hasil monitoring, evaluasi, supervisi oleh Tim atau Pejabat yang diberikan

kewenangan melakukan verifikasi;

6. Perhitungan *ex officio*;
7. Yang bersangkutan.

Laporan yang diterima oleh Sekretaris MA dari Satker selanjutnya didisposisi kepada Kepala Biro Keuangan c.q Bagian Verifikasi dan TGR selaku Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara bersama Tim Penyelesaian Kerugian Negara Satker untuk penetapan TP atau TGR sesuai dengan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara, adapun tugas Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara sebagai berikut:

1. Menatausahakan Penyelesaian Kerugian Negara pada Tingkat Lembaga;
2. Membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam segala hal pelaksanaan kewenangan selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN);
3. Membantu Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara dalam dukungan administratif dan pelaksanaan sidang;
4. Menyelenggarakan dukungan administratif, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan penyelesaian Kerugian Negara pada Tingkat Lembaga.

Penatausahaan pada Tingkat Lembaga dilaksanakan dengan:

1. Membuat rekapitulasi data Kerugian Negara;
2. Melaksanakan rekonsiliasi data Kerugian Negara;
3. Mencatat Kerugian Negara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Memantau perkembangan Tindak Lanjut

Kerugian Negara;

5. Membuat laporan Penyelesaian Kerugian Negara;
6. Menyimpan dan mengamankan semua dokumen dan alat bukti yang terkait Kerugian Negara.

Indikator ini untuk mengukur kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara sebagaimana yang disampaikan dalam Laporan Penyelesaian Kerugian Negara. Persentase kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara diukur dengan dengan formulasi sebagai berikut:

Jumlah kerugian negara yang telah disetor ke kas negara
Jumlah kerugian negara

X 100%

- Jumlah kerugian negara yang telah disetorkan ke kas negara adalah seluruh jumlah kerugian negara yang disetorkan ke kas negara pada tahun 2024;
- Jumlah kerugian negara adalah jumlah kerugian negara yang jatuh tempo pada tahun 2024, pada kasus TGR pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon terdapat kerugian negara sebesar Rp29.980.000,00 yang diangsur selama 24 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp1.249.166,00, angsuran dimulai di bulan April 2024 sampai dengan Maret 2026, sehingga formulasi perhitungan jumlah kerugian negara adalah sebesar Rp11.242.494,00 yang berasal dari Rp1.249.166,00 x 9 bulan (terhitung April sampai dengan Desember 2024).

Pada tahun 2024 tercapai target sebesar 100% dengan perbandingan capaian tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum pada

tabel di bawah ini:

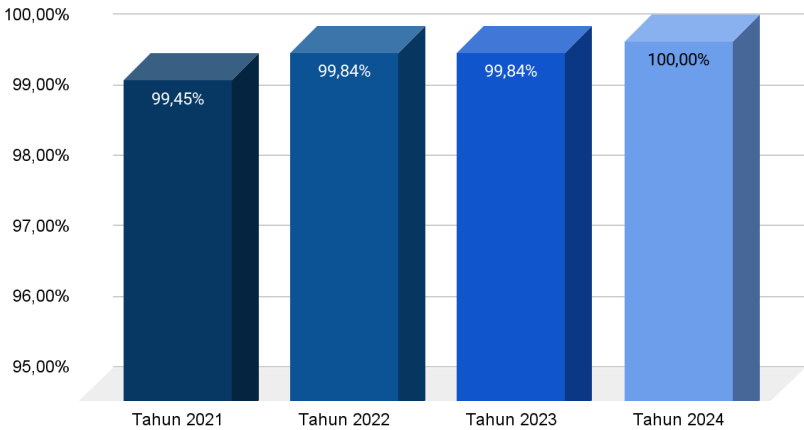
Tabel 3.24
Persentase Kerugian Negara yang Dikembalikan ke Kas Negara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Kerugian Negara yang Dikembalikan ke Kas Negara	95%	100%	105,26	99,84	99,84	107,19	103,06

Tabel 3.25
Tabel Perbandingan Kerugian Negara Yang Dikembalikan ke Kas Negara

TAHUN	HASIL TEMUAN BPK DAN TUNTUTAN GANTI RUGI/TUNTUTAN PERBENDAHARAAN		
	JUMLAH KERUGIAN	SETOR KE KAS NEGARA	Realisasi (%)
2024	29.935.174.757,74	29.935.174.757,74	100%
2023	29.900.932.264,00	29.852.180.038,00	99,84
2022	29.874.382.264,00	29.825.630.038,00	99,84
2021	29.884.013.264,00	29.721.101.810,00	99,45

Capaian Kinerja Penyelesaian Kerugian Negara



Gambar 3.2 Capaian Kinerja Penyelesaian Kerugian Negara

Capaian Penyelesaian Kerugian Negara Tahun 2024 mencapai 105,26 %, 10 (sepuluh) kasus kerugian negara dapat dipulihkan dan disetorkan ke kas negara, antara lain:

1. Kasus Kerugian Negara Sebelum Tahun 2024

Adapun perkembangan kasus TP telah dilakukan penyelesaian dan dikeluarkan dari Daftar Kerugian Negara, serta kasus TGR dalam kualitas Piutang Macet telah dilakukan pelunasan, penjelasan terinci sebagai berikut:

a. Pengadilan Agama Pekalongan:

- Pelaksanaan Penggalian Data dan Informasi pada tanggal 21 September 2023 sesuai Surat Undangan Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Nomor 65/S/XIII/09/2023 tanggal 20 September 2023 dengan agenda penggalian data dan informasi atas kasus kerugian negara terhadap Bendahara a.n Sdri. Rohmawati Bendahara Pengeluaran pada PA Pekalongan, yang bertujuan untuk menghapuskan kewajiban Penetapan Tuntutan Perbendaharaan oleh BPK karena telah terjadi pelunasan atas kerugian negara;
- Surat Plh Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara selaku Panitera Majelis Tuntutan Perbendaharaan Nomor 84/S/MTP/05/2024

perihal Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara pada MA tanggal 28 Mei 2024 yang menyatakan pihak telah membayar kerugian negara sehingga kerugian negara telah dipulihkan, atas kasus tersebut dapat dikeluarkan dari Daftar Kerugian Negara.

b. Pengadilan Negeri Pandeglang

- Pengalihan penagihan TGR a.n Sjamsuddin UP, SH. kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Serang sesuai Keputusan PUPN Serang Nomor: PJPNC-85/PUPNC.14.01/2017 tanggal 6 Juli 2017 dengan sisa hutang yang masih tercatat sebesar Rp12.500.000,00;
- PUPN Serang menyatakan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) Nomor: PSBDT 01/PUPNC.14.01/2018 tanggal 23 April 2018 mengingat Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya;
- Sekretaris Mahkamah Agung mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi penghapusan secara bersyarat piutang negara atas nama Sjamsudin UP, S.H., M.H. kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dengan Nomor 691A/SEK/KU.02/3/2022 tangga; 7 Maret 2022;
- Pelaksanaan Penggalian Data

- dan Informasi dalam rangka Pembahasan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara dengan Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK pada tanggal 30 November 2022 sesuai Undangan Nomor 175/S/XIII/11/2022 tanggal 15 November 2022 tentang Penggalan Data dan Informasi dalam rangka Pembahasan Penghapusan secara Bersyarat Piutang Negara;
- Pelunasan ke kas negara sesuai bukti penerimaan negara (BPN) sebesar Rp13.750.000,00 NTPN B42B16U8EU7PKOMR tanggal 7 Februari 2024;
 - Pemberitahuan pelunasan kasus kerugian negara kepada Kepala Direktur Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa atas nama Sjamsudin UP, S.H., M.H. telah melakukan pelunasan ke kas negara tanggal 2 April 2024, sesuai surat Sekretaris MA Nomor 2917/SEK/KU1.3/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;
 - Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemulihan kasus kerugian negara atas nama Sjamsudin UP, S.H., M.H. sesuai dengan Surat Wakil BPK Nomor 25/S/II/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 untuk selanjutnya
- Mahkamah Agung dapat menerbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas;
- Sekretaris Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sesuai Surat Sekretaris MA Nomor 3/SEK/SKET.KU1.3/II/2024 tanggal 23 Februari 2024.
- c. Pengadilan Negeri Sumbawa Besar (Pihak Ketiga)
- Kerugian negara senilai Rp64.973.646,78 telah diangsur sebesar Rp6.746.000,00, sehingga sisa kerugian negara yang dilimpahkan penagihannya ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang NTB adalah sebesar Rp58.227.646,78, dan telah dicantumkan dalam Surat Kesanggupan Membayar tanggal 4 Januari 2016;
 - Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk meminta PUPN Cabang NTB menerbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) atas CV. WIDYA KENCANA. Adapun CV. DWI TUNGGAL, dan CV. ANA JAYA telah diterbitkan PSBDT (terlampir), sedangkan CV. TANJUNG ALANG, dan CV. AS. SYIFA telah melakukan pelunasan piutang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.26
Sisa Kerugian Negara yang Dilimpahkan Penagihannya ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang NTB

Debitur	Sisa Kerugian	Angsuran	Sisa Kerugian
CV. TANJUNG ALANG	15.822.403,00	15.822.403,00	-
CV. WIDYA KENCANA	6.475.000,00	-	6.475.000,00
CV. AS. SYIFA	3.754.850,00	3.754.850,00	-
CV. DWI TUNGGAL	4.300.000,00	-	4.300.000,00
CV. ANA JAYA	27.875.393,78	2.398.168,00	25.477.225,78
Total	58.227.646,78	21.975.421,00	36.252.225,78

- Pengajuan Permohonan Rekomendasi Penghapusan Piutang Negara secara Bersyarat ke Ketua BPK atas nama I Made Subagio Wiryo pada PN Sumbawa Besar, berdasar Surat Sekretaris MA Nomor 2631/SEK/KU.02/11/2022 tanggal 15 November 2022;
- Pengadilan Negeri Sumbawa telah menyerahkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) atas CV. WIDYA KENCANA dengan Nomor PSBDT 17/PUPNC21.02/2016;
- Setelah seluruh PSBDT diperoleh, Sekretaris Mahkamah Agung akan mengajukan Permohonan Penerbitan Rekomendasi Penghapusan secara Bersyarat Piutang Negara kepada BPK;
- Pengajuan Permohonan Rekomendasi Penghapusan Piutang Negara secara Bersyarat ke Ketua BPK atas nama I Made Subagio Wiryo pada PN Sumbawa Besar, berdasar Surat Sekretaris MA Nomor 2631/SEK/KU.02/11/2022 tanggal 15 November 2022;
- Pelaksanaan Penggalan Data dan Informasi dalam rangka Pembahasan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara dengan Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK pada tanggal 30 November 2022 sesuai Undangan Nomor 175/S/XIII/11/2022 tanggal 15 November 2022 tentang Penggalan Data dan Informasi dalam rangka Pembahasan Penghapusan secara Bersyarat Piutang Negara;
- Pelunasan ke kas negara sesuai bukti penerimaan negara (BPN) sebesar Rp36.252.226,00 NTPN 63B533CIFK424MAD tanggal 2 April 2024;
- Pemberitahuan pelunasan kasus kerugian negara kepada Kepala Direktur Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa atas nama I Made Subagio Wiryo telah melakukan pelunasan ke kas negara tanggal

- 2 April 2024, sesuai surat Sekretaris MA Nomor 2917/SEK/KU1.3/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;
- Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemulihan kasus kerugian negara atas nama I Made Subagio Wiryo sesuai dengan Surat Wakil BPK Nomor 25/S/II/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 untuk selanjutnya Mahkamah Agung dapat menerbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas;
 - Sekretaris Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sesuai Surat Sekretaris MA Nomor 8/SEK/SKET.KU1.3/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.
2. Kasus Kerugian Negara Tahun 2024
- a) Penyelesaian Kerugian Negara pada Pengadilan Agama Muara Tebo:
- 1) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 82/KPA.W5-A9/ SKET. PL.06/I/2024 tanggal 24 Januari 2024;
 - 2) Pelunasan ke Kas Negara berdasarkan bukti NTPN 792937QLU ONN3CFA tanggal 24 Januari 2024;
 - 3) Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) Nomor 2/SEK/SKET. KU1.3/II/2024 tanggal 22 Februari 2024.
- b) Penyelesaian Kerugian Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
- 1) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 34.KPTUN. W8-TUN4.PL.2.1/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
 - 2) Pelunasan ke Kas Negara berdasarkan bukti NTPN 74EE861QV 3M0DDKJ tanggal 29 Februari 2024;
 - 3) Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) Nomor 5/SEK/SKET. KU1.3/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 .
- c) Penyelesaian Kerugian Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon:
- Nilai kerugian negara sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 34.KPTUN.W8-TUN4.PL.2.1/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 yaitu senilai Rp29.980.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 - Kerugian negara senilai Rp29.980.000,00 akan diangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp1.249.166,00, telah dilakukan angsuran melalui pemotongan Surat Perintah Membayar (SPM) selama 9 bulan (April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember) tahun 2024 sehingga sisa kerugian negara yang harus dikembalikan sebesar Rp18.737.506,00 (29.980.000,00-11.242.494,00).
- d) Penyelesaian Kerugian Negara pada Pengadilan Agama Dompu

- 1) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 161/KPA.W22-A6/PL1.2.3/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;
 - 2) Pelunasan ke Kas Negara berdasarkan bukti NTPN C8B7E6U8EUK3 NVJH tanggal 20 Juni 2024;
 - 3) Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) Nomor 7/SEK/SKET. KU1.3/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024.
- e) Penyelesaian Kerugian Negara pada Pengadilan Negeri Watampone
- 1) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 636/SEK. PN.W22-U6/KU1.2/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024;
 - 2) Pelunasan ke Kas Negara berdasarkan bukti NTPN 8B60361QV44KO81K tanggal 18 Juli 2024 ;
 - 3) Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) Nomor 8A/SEK/SKET. KU1.3/VII/2024 tanggal 31 Juni 2024.
- f) Penyelesaian Kerugian Negara pada Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB
- 1) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 1743/KPN. W11.U12/KU1.3/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024;
 - 2) Pelunasan ke Kas Negara berdasarkan bukti NTPN 31C886U8 EUQBKQE1 tanggal 29 Agustus 2024;
 - 3) Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) Nomor 12/SEK/SKET. KU1.3/IX/2024 tanggal 10 September 2024.
- g) Penyelesaian Kerugian Negara pada Pengadilan Agama Pangkalpinang:
- 1) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 326/SEK. W28-A1/PL1.2.3/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024;
 - 2) Pelunasan ke Kas Negara berdasarkan bukti NTPN 605C855DF9 RBD000 tanggal 23 Oktober 2024;
 - 3) Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) Nomor15/SEK/ SKET.KU1.3/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024.
- h) Penyelesaian Kerugian Negara pada Pengadilan Tinggi Jakarta:
- 1) Berita Acara Rekonsiliasi Data Mahkamah Agung (MA) pada KPKNL Jakarta IV Semester I Tahun 2024 Nomor: BAR-23/2024.1/REKON/MA/KN.4/2024;
 - 2) Pelunasan ke Kas Negara berdasarkan bukti NTPN AD1BA55DFA 1E6HNQ tanggal 27 Desember 2024;
 - 3) Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas Nomor SPPNL-4/PUPNC. 10.04/2025 tanggal 6 Januari 2025.
- Bagian Verifikasi dan TGR Biro Keuangan pada Tahun 2024 mengelola anggaran sejumlah Rp963.168.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Dalam anggaran

tersebut terdapat sejumlah anggaran yang menjadi Automatic Adjustment sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga pagu anggaran tahun 2024 menjadi sebesar Rp856.168.00,00 (delapan ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Dari seluruh anggaran tersebut telah terealisasi sejumlah Rp855.536.954,00 (delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) atau 99,93%. Anggaran tersebut dioptimalkan untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, penyelesaian kerugian negara, koordinasi tuntutan ganti rugi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, serta penyusunan laporan perkembangan kerugian negara dan laporan perkembangan TL LHP BPK.

Selain itu, Bagian Verifikasi dan TGR menggunakan teknologi informasi yang tersedia melalui penggunaan aplikasi ZOOM Meeting, penggunaan fitur chat pada aplikasi Whatsapp, monitoring data melalui aplikasi KOMDANAS, implementasi Modul Piutang aplikasi SAKTI, implementasi Aplikasi SIPTL, dan implementasi Aplikasi SIKAD untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Aplikasi tersebut mencakup penyampaian materi, sosialisasi, pemecahan solusi hingga diskusi yang bersifat daring/online;

Selain efisiensi sumber daya, juga terdapat kegiatan lain yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Bagian Verifikasi dan TGR seperti dari pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Bimbingan Teknis (Pembinaan ASN Biro Keuangan), maupun bimbingan teknis yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, serta kegiatan lainnya yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

seperti:

1. Monitoring dan evaluasi yang diimplementasikan dalam bentuk:
 - a) Penyederhanaan draft peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - b) Monitoring angsuran piutang tuntutan ganti rugi setiap bulan sampai dengan lunas, menatausahakan dokumen penyelesaiannya dalam Komdanas dan *gdrive*, hingga penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL).
2. Penyelesaian Kerugian Negara yaitu:
 - Penetapan kerugian negara sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebanyak 10 kasus pada Tahun 2024.
3. Koordinasi Bagian Verifikasi & TGR dengan:
 - a) Satuan Kerja atas dasar laporan adanya informasi kerugian negara;
 - b) Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam rangka rapat koordinasi pengelolaan dan penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara;
 - c) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang Jakarta IV dalam rangka bimbingan teknis dan rekonsiliasi data piutang negara periode semester I tahun 2024;

- d) Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan BPK terkait tuntutan perbendaharaan;
- e) Bagian Akuntansi dalam rangka rekonsiliasi data TP/TGR dan penyusunan Pengungkapan Penting Lainnya tentang penyelesaian kerugian negara dan TL LHP BPK pada CaLK dalam rangka mendukung penyusunan LK Mahkamah Agung dan Satker Badan Urusan Administrasi triwulanan dan semesteran;
- f) Tim Pemantauan TL LHP BPK dalam rangka Rekonsiliasi TL LHP per semester, melalui penyusunan matrik pemantauan tindak lanjut, serta pemantauan melalui SIPTL dan SIKAD;
- g) Satuan Kerja untuk TL rekomendasi atas LHP BPK secara face to face dengan mendatangi Satuan Kerja.
4. Penyusunan Laporan Perkembangan Kerugian Negara

Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara menyusun dan menyerahkan laporan kepada Sekretaris MA, Kepala Badan Pengawasan (Bawas) dan Ketua BPK, sesuai Peraturan MA Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 45 laporan tersebut adalah Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara yang merupakan laporan perkembangan berupa pengembalian sejumlah uang untuk disetorkan ke kas negara akibat adanya kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti

jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (bersifat material), penyusunan laporan dilakukan pada periode sebagai berikut:

- a) Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun 2024;
- b) Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara Triwulan III Tahun 2024;
- c) Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara Triwulan IV Tahun 2024.

Adapun beberapa kendala-kendala yang ditemukan dalam penyelesaian kerugian negara antara lain:

- a) Kepala Satuan Kerja dan/atau Pihak Yang Merugikan (pihak yang dikenai kerugian negara) tidak melaporkan adanya kerugian negara dan/atau tidak memahami Langkah-langkah penatausahaan penyelesaian kerugian negara;
- b) BMN yang telah lama hilang baru dilaporkan sehingga Pihak Kepolisian kesulitan dalam melakukan pemeriksaan fakta lapangan, pihak dealer sulit menentukan harga taksiran, dan kesulitan dalam memperoleh nilai buku;
- c) Kerugian Negara yang telah diberikan Surat Penagihan (SPn) ke-3 dan dialihkan pelunasannya ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan tidak dapat terselesaikan dan Mahkamah Agung perlu melakukan penagihan kembali pada pihak yang merugikan, pengampu, yang memperoleh hak,

- dan/atau ahli waris;
- d) Proses penghapusan piutang TP/TGR memerlukan persetujuan/rekomendasi dari BPK, penghapusan piutang TP/TGR secara bersyarat pada Kementerian Keuangan memerlukan waktu 2 tahun masa tunggu, untuk selanjutnya dapat diajukan penghapusan piutang TP/TGR secara mutlak.

Untuk mengatasi kendala - kendala dalam hal penyelesaian kerugian negara strategi yang dilaksanakan Bagian Verifikasi dan TGR adalah sebagai berikut:

- a) Pembentukan Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara (TAPKN) untuk kelancaran penyelesaian kerugian di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya yang bertugas menatausahakan seluruh proses penyelesaian kerugian negara secara kronologis, lengkap dan tertib;
- b) Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara (MPPKN) yang terdiri dari Pimpinan, Pejabat yang terkait, Pihak yang terkait serta Badan Pengawasan yang

- bertugas memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Mahkamah Agung sebagai PPKN apabila terjadi sanggah/wanprestasi/dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh;
- c) Pelaksanaan asistensi penyelesaian kerugian negara kepada satuan kerja sesuai tata cara penyelesaian kerugian negara, dan penagihan piutang TGR kepada pihak yang merugikan, pengampu, yang memperoleh hak, dan/atau ahli waris;
- d) Penggunaan IT untuk mencatat aktifitas penyelesaian kerugian negara dalam bentuk matrik maupun tabel rekapitulasi yang akan memudahkan monitoring dan evaluasi;
- e) Perbaikan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya yang dapat meminimalisir adanya kerugian negara yang tidak dapat dipulihkan;
- f) High Level Meeting berupa kebijakan Pimpinan.

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-6

Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung

Indikator realisasi penerimaan negara bukan pajak Mahkamah Agung diukur berdasarkan sumber data pada aplikasi SIMARI (PNBP MA) dan aplikasi SIMPONI dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan bukan pajak Mahkamah Agung}}{\text{Target PNBP MA}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 100% dan perbandingan capaian tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.27
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100%	121,75%	121,75	118,09	132.39	131.56	111.58

Kinerja PNBP Mahkamah Agung terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini mencerminkan sinergi optimal antara seluruh pihak yang terlibat, mulai dari tingkat pusat sebagai pembina hingga satuan kerja (satker) di daerah yang menjalankan pengelolaan dan pemungutan PNBP dengan penuh dedikasi. Pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata komitmen Mahkamah Agung dalam mengelola PNBP secara akuntabel dan transparan.

1. Target dan Capaian PNBP Tahun 2024

Target PNBP pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp86.905.618.000,00, dengan realisasi mencapai Rp105.803.612.870,00 (121,75%). Realisasi ini melampaui target yang ditetapkan, berkat penguatan sistem monitoring, pembinaan, dan optimalisasi teknologi informasi.

PNBP Mahkamah Agung terus meningkat setiap tahunnya berkat dukungan regulasi seperti PP No. 5 Tahun 2019 dan SK KMA No. 57/KMA/SK/III/2019, serta peran aktif satker dalam pengelolaan PNBP.

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2023	86.622.707.000	102.286.786.891	118,08
2024	86.905.614.000	105.803.612.870	121,75

2. Pengelolaan Akun PNBP Utama

PNBP Mahkamah Agung berasal dari 5 akun utama, dengan kontribusi terbesar dari Pendapatan Ongkos Perkara dan Pendapatan

Uang Meja (Leges). Pencapaian target 2024 menjadi tonggak penting untuk memastikan kesinambungan penerimaan di tahun-tahun mendatang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Akun	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Pertumbuhan (%)
425131 - Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	8.931.658.089	9.742.958.080	9,09
425231 - Pengesahan Surat di Bawah Tangan	15.632.393.869	20.916.694.677	33,79
425232 - Uang Meja (Leges)	77.721.624.933	75.143.960.113	-3,31
425233 - Ongkos Perkara	55.821.453.000	60.123.453.000	7,72
425239 - Pendapatan Lainnya	2.130.237.000	2.458.237.000	15,42

Peningkatan Pengelolaan PNBPN tidak terlepas dari Inovasi dan Teknologi dalam Pengelolaan PNBPN yaitu:

- Dashboard Real-Time:** Website **pnpb-ma-online** yang *up to date* memungkinkan monitoring realisasi penerimaan tanpa login, memastikan transparansi di semua tingkatan.
- Aplikasi SIMARI:** Penatausahaan PNBPN dilakukan melalui SIMARI dan SAKTI Kemenkeu, memungkinkan pelaporan real-time dengan integrasi ke aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).
- Peningkatan Komunikasi:** Jalur komunikasi pusat-daerah diperkuat melalui grup WhatsApp dan fitur pesan siaran di SIMARI, mempercepat

penyampaian informasi dan diskusi.

Atas hal tersebut, pengelolaan PNBPN Mahkamah Agung sudah memanfaatkan teknologi informasi sebagai daya dorong serta optimalisasi PNBPN yang diterima pada tahun 2024.

3. Pengelolaan Akun PNBPN Utama

a) Peningkatan Persentase Izin Penggunaan Dana PNBPN

Pada Tahun 2024 Mahkamah Agung mendapatkan peningkatan izin penggunaan dana PNBPN dari **21% menjadi 40%**, hal ini menunjukkan apresiasi pemerintah terhadap kinerja Mahkamah Agung dengan realisasi penggunaan dana mencapai **82,15%** pada 2024.

Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Ditjen Badilag	22.636.550.000	17.209.105.194	76,02
Ditjen Badilum	7.816.746.000	7.813.144.122	99,85
Ditjen Badilmiltun	356.740.000	316.789.000	88,8
Kepaniteraan	62.192.000	23.088.000	37,12
Total	30.872.228.000	25.362.126.316	82,15

b) Potensi Penggunaan Dana PNBPN yang Bersumber Dari Denda Tilang dan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pada tahun 2024 Mahkamah Agung beserta Kejaksaan Agung dan Kepolisian bersama-sama mendapat persetujuan penggunaan kembali PNBPN yang bersumber dari denda tilang dan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2024. Penggunaan PNBPN ini guna mendukung pelayanan prima melalui Integrated Criminal Justice System.

Mahkamah Agung bersama Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung pada tahun 2024 telah melaksanakan berbagai koordinasi, sinergi serta kolaborasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal, sehingga potensi penggunaan Dana PNBPN yang bersumber dari denda tilang dan pelanggaran lalu lintas dan

angkutan jalan dapat dialokasikan sebesar Rp47.551.281.000,00 pada tahun 2025, yang merupakan 30% dari total rencana Target penerimaan PNBPN yang bersumber dari denda tilang dan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sebesar 158 Milyar bersama Aparat Penegak Hukum Lain (APH) yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga mendapat 30% dan Kejaksaan Agung sebagai Koordinator mendapat porsi 40%. Detail Pembagian dana dari denda tilang adalah sebagai berikut:

- Mahkamah Agung:** 30%
- Kepolisian:** 30%
- Kejaksaan:** 40% (Koordinator)

Adapun Potensi PNBPN dari Denda Tilang untuk Tahun 2026-2029 juga telah diproyeksikan untuk Mahkamah Agung mendapatkan sebesar:

Tabel 3.31
Potensi PNBPN Denda Tilang Mahkamah Agung

Tahun Anggaran	Target (Rp)
2026	54.851.852.000
2027	56.006.073.000
2028	56.839.639.000
2029	57.711.330.000

Capaian ini menegaskan pencapaian luar biasa Mahkamah Agung dalam pengelolaan PNBPN. Dengan tren yang terus meningkat dan inovasi berbasis teknologi, Mahkamah

Agung siap menghadapi tantangan di masa mendatang, khususnya dalam mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari denda tilang dan sumber lainnya.

Sasaran 2 - Indikator Kinerja ke-7
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung

Realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung merupakan kinerja penyerapan anggaran dari seluruh satuan kerja (satker) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

berada di bawahnya berdasarkan pengelolaan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024. Capaian anggaran belanja Mahkamah Agung diukur

dengan membandingkan antara persentase jumlah realisasi anggaran belanja dengan persentase jumlah target anggaran Mahkamah Agung.

Dalam merealisasikan anggaran Mahkamah Agung Tahun 2024 total pagu awal Mahkamah Agung sebesar Rp11.903.768.112.000 dan mengalami penyesuaian anggaran (*refocusing*) sebesar Rp886.688.954.000 kemudian mendapatkan hibah sebesar Rp6.212.524.000 penggunaan dana PNPB sebesar Rp30,872,228,000. sehingga total

Tabel 3.32
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung	95%	97,37%	102,50	110,61	112,59	98,44	95,92

Pencapaian realisasi anggaran yang telah melampaui target di tahun 2024 yaitu sebesar 97,37%:

1. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-717/MK.2/2024 tanggal 29 Juli 2024 perihal Penyampaian Relaksasi Blokir Automatic Adjustment Mahkamah Agung RI Tahun 2024, telah disetujui pembukaan blokir sebesar Rp.871.547.083.000 (belanja pegawai,

pagu menjadi Rp11,925,492,498,000 dan realisasi Rp11.611.923.187.337 (97,37%) sisa anggaran sebesar Rp313.569.310.663 (2,63%).

Pada tahun 2024, Badan Urusan Administrasi menetapkan target pada indikator persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung sebesar 95%, terealisasi 97,37%, sehingga capaian kinerja sebesar 102,50%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 – 2024, tergambar pada tabel dibawah ini:

- belanja barang operasional kantor, belanja barang non operasional kantor, dan belanja modal).
2. Adanya kenaikan belanja pegawai sebagai pemenuhan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Tabel 3.33
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Jenis Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara	15.773.175.000	15.126.510.524	95,90%	646.664.476	4,10%
2	1046-Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	2.971.635.000	3.064.642.232	103,13%	-93.007.232	-3,13%

3	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	84.604.575.000	81.911.158.743	96,82%	2.693.416.257	3,18%
4	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	71.758.038.000	70.173.961.804	97,79%	1.584.076.196	2,21%
5	1056-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyariahan	709.123.000	688.874.099	97,14%	20.248.901	2,86%
6	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	5.776.495.000	5.674.225.511	98,23%	102.269.489	1,77%
7	1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	3.665.680.000	3.498.667.150	95,44%	167.012.850	4,56%
8	1061-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer	1.125.000	1.125.000	100,00%	0	0,00%
9	1062-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (TUN)	1.125.000	1.125.000	100,00%	0	0,00%
10	1064-Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	60.173.951.000	59.059.568.659	98,15%	1.114.382.341	1,85%
11	1065-Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	7.718.881.000	7.431.863.895	96,28%	287.017.105	3,72%
12	1066-Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.304.923.693.000	3.169.569.234.079	95,90%	135.354.458.921	4,10%
13	1067-Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	13.962.927.000	12.666.866.149	90,72%	1.296.060.851	9,28%
14	1068-Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	5.964.602.000	5.827.704.927	97,70%	136.897.073	2,30%

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

15	1069-Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	23.681.438.000	22.630.024.025	95,56%	1.051.413.975	4,44%
16	1070-Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung	220.108.186.000	219.911.872.772	99,91%	196.313.228	0,09%
17	1071-Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1.071.362.524.000	1.051.297.079.172	98,13%	20.065.444.828	1,87%
18	1073-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan	108.676.631.000	104.922.089.094	96,55%	3.754.541.906	3,45%
19	1074-Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	14.085.330.000	13.862.282.366	98,42%	223.047.634	1,58%
20	1075-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	89.028.527.000	86.371.131.068	97,02%	2.657.395.932	2,98%
21	1076-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	38.037.523.000	34.904.986.074	91,76%	3.132.536.926	8,24%
22	1077-Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV	25.568.129.000	25.383.441.970	99,28%	184.687.030	0,72%
23	1079-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	62.445.033.000	57.855.040.935	92,65%	4.589.992.065	7,35%
24	6242-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	206.233.722.000	205.485.029.003	99,64%	748.692.997	0,36%

25	6243-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	53.382.164.000	51.704.295.171	96,86%	1.677.868.829	3,14%
26	6244-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	57.100.477.000	51.317.557.858	89,87%	5.782.919.142	
27	6245-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	18.963.093.000	18.559.449.881	97,87%	403.643.119	2,13%
28	6627-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	5.521.388.000	5.504.933.935	99,70%	16.454.065	0,30%
29	6630-Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	2.754.620.000	2.766.553.876	100,43%	-11.933.876	-0,43%
30	6631-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama	3.012.969.000	3.018.700.054	100,19%	-5.731.054	-0,19%
31	6983-Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama	2.624.557.000	2.513.750.800	95,78%	110.806.200	4,22%
32	6984-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	1.135.166.000	1.134.235.177	99,92%	930.823	0,08%
33	6985-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara	1.618.469.000	1.618.099.149	99,98%	369.851	0,02%
34	6986-Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	6.342.147.527.000	6.216.467.107.185	98,02%	125.680.419.815	1,98%
Total		11.925.492.498.000	11.611.923.187.337	97,37%	313.569.310.663	2,63%

Berdasarkan <https://monsakti.kemenkeu.go.id/> per 21 Januari 2024

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-8

Persentase Kepatuhan Satker terhadap Regulasi Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Indikator ini untuk mengukur kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan negara berdasarkan laporan hasil pembinaan dan penilaian perbendaharaan dan aplikasi

SAKTI, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah satker yang sudah patuh terhadap regulasi}}{\text{Jumlah seluruh satker}} \times 100\%$$

Tabel 3.34

Persentase Kepatuhan Satker terhadap Regulasi Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Kepatuhan Satker terhadap Regulasi Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	80%	92%	115,00	106,25	105,87	100	100

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 80% dari 25 satuan kerja yang ditetapkan menjadi target pembinaan. Sedangkan realisasi Jumlah Satuan Kerja yang Sudah Patuh pada Regulasi sebanyak 23 Satuan Kerja (92%) dengan rata-rata nilai pada kertas kerja evaluasi pembinaan melebihi 90% atau telah mencukupi kategori patuh terhadap regulasi.

Perubahan jumlah satuan kerja yang sebelumnya adalah keseluruhan jumlah satuan kerja yang berada pada empat lingkungan Mahkamah Agung kemudian hanya ditetapkan sebanyak 25 satuan kerja yang menjadi target pembinaan dikarenakan sesuai dengan amanah Kepala Biro Keuangan untuk memprioritaskan satuan kerja baru yang diresmikan di tahun 2018 dengan harapan satuan kerja yang baru di resmikan

dapat memiliki Bendahara Pengeluaran yang memiliki pengetahuan terhadap regulasi yang memadai.

Beberapa hal yang menjadi Indikator Kepatuhan Regulasi Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yaitu:

1. Kepatuhan terhadap Regulasi dalam menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Negara.
2. Kepatuhan terhadap Regulasi dalam ketepatan waktu penyelesaian SPM.
3. Kepatuhan terhadap Regulasi dalam penatausahaan kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan negara.
4. Kepatuhan terhadap regulasi kesesuaian kas di Bendahara Pengeluaran dengan

Aplikasi SAKTI.

5. Kepatuhan terhadap regulasi dalam penatausahaan kelengkapan pertanggungjawaban Tunjangan Khusus

Kinerja dan Transportasi Hakim.

6. Perbandingan capaian tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada tabel di atas.

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-9

Persentase Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dengan perencanaan kebutuhan BMN yang diusulkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, bahwa perencanaan kebutuhan BMN yang diusulkan oleh seluruh satuan kerja diajukan 2 tahun sebelum dianggarkan dalam penganggaran. Perencanaan Kebutuhan BMN menggunakan sumber data yang berasal dari:

- b. Aplikasi SIMAN
c. Aplikasi e-Sadewa

Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui}}{\text{Jumlah usulan perencanaan kebutuhan BMN yang diusulkan melalui RKBMN}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 75% dan perbandingan capaian tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

- a. Aplikasi SAKTI

Tabel 3.35

Persentase Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui	100%	98,28%	98,28	130,86	180,78	459,35	264,47

Pencapaian ini dihitung berdasarkan perbandingan antara total usulan RKBMN dari satuan kerja yang diajukan ke Mahkamah Agung dengan total usulan RKBMN yang disetujui oleh DJKN Kementerian Keuangan. Pada tahun 2024, capaian usulan RKBMN dari satuan kerja di bawah Mahkamah Agung yang disetujui oleh DJKN mengalami penurunan sebesar 49,98%. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan target capaian, yaitu dari 85% pada tahun 2023 menjadi

100% pada tahun 2024. Perubahan target ini tentu berdampak pada nilai capaian yang dihasilkan.

Selain itu, penambahan kriteria penilaian usulan melalui RKBMN juga mempengaruhi realisasi indikator tersebut. Pada tahun 2023, usulan hanya memenuhi dua kriteria, yaitu pengadaan BMN dan pemeliharaan BMN. Namun, pada tahun 2024, jumlah kriteria meningkat menjadi lima, yaitu pengadaan

BMN, pemeliharaan BMN, pemanfaatan BMN, pemindahtanganan BMN, dan penghapusan BMN. Penambahan kriteria ini menjadi tantangan baru bagi satuan kerja di bawah Mahkamah Agung. Banyak satuan kerja yang belum memahami secara menyeluruh proses bisnis pengajuan usulan, sehingga banyak usulan yang diajukan tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Tabel 3.36
Persentase Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui Tahun 2024

No.	Kriteria	Usulan Satuan Kerja	Usulan yang disetujui DJKN	Persentase
1	Pengadaan	1.187	310	26,12%
2	Pemeliharaan	122.124	120.918	99,01%
3	Pemanfaatan	63	59	93,65%
4	Pemindahtanganan	241	214	88,80%
5	Penghapusan	2.030	1.980	97,54%
Total		125.645	123.481	98,28%

Sasaran 2 - Indikator Kinerja ke-10

Persentase Sarana Dan Prasarana Pengadilan Sesuai Standarisasi Yang Ada

Indikator persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi diukur berdasarkan sumber data dari laporan supervisi data dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pengadilan yang telah sesuai standarisasi}}{\text{Jumlah seluruh pengadilan}} \times 100\%$$

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima sebagai dukungan layanan manajemen bagi para pencari keadilan. Untuk mengukur

Kondisi ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Biro Perlengkapan, baik dari sisi penetapan target maupun realisasi capaian, agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. Berikut ini adalah rincian realisasi usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui pada tahun 2024 untuk anggaran tahun 2026

indikator ini ada beberapa kriteria yang dijadikan standar dalam mengukur terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung pengadilan. Ketiga kriteria tersebut, yaitu (1) terbangunnya 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor, (2) terpenuhinya standar sarana dan prasarana layanan peradilan bagi penyandang disabilitas, dan (3) terpenuhinya kebutuhan utama pelayanan peradilan.

Berdasarkan kriteria pertama, yaitu terbangunnya 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan, berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.37
Pengadilan dengan 4 (empat) Pilar Tampak Depan Gedung Kantor (K1)

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Pengadilan yang Memenuhi Kriteria
1.	Peradilan Umum	415
2.	Peradilan Agama	432
3.	Peradilan Militer	22
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	37
Jumlah		906

Sumber: aplikasi E-SADEWA dan SIMAN

Berdasarkan data di atas, dari total 923 satuan kerja di seluruh Indonesia, terdapat 906 satuan kerja atau sebesar 98,16% yang telah memiliki kriteria 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan.

Selanjutnya untuk kriteria kedua, Mahkamah Agung terus berkomitmen untuk melanjutkan pemenuhan layanan peradilan bagi semua orang, terutama bagi yang berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Layanan peradilan bagi penyandang disabilitas yang merupakan salah satu penunjang layanan pada gedung kantor pengadilan diukur berdasarkan ada tidaknya standar layanan minimal bagi penyandang disabilitas, antara lain tersedianya ruang parkir khusus, guiding blocks untuk disabilitas netra, jalur landai (ram) dan pegangan, kursi roda, kruk, dan tongkat untuk disabilitas daksa, dan toilet khusus. Berdasarkan kriteria kedua ini, berikut data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.38
Pengadilan dengan Layanan Peradilan bagi Penyandang Disabilitas (K2)

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Pengadilan yang Memenuhi Kriteria
1.	Peradilan Umum	219
2.	Peradilan Agama	162
3.	Peradilan Militer	17
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	11
Jumlah		409

Sumber: aplikasi E-SADEWA dan SIMAN

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengadilan yang telah memiliki layanan minimal penyandang disabilitas adalah sebanyak 409 satuan kerja dari 923 satuan kerja di seluruh Indonesia atau sebesar 44,31%.

Berdasarkan kriteria ketiga, Mahkamah Agung terus berupaya mewujudkan Badan Peradilan yang Agung dengan pelayanan modern dan profesional secara berkelanjutan dengan terus meningkatkan layanan peradilan dan memastikan terpenuhinya standar minimal pelayanan peradilan. Pelayanan

peradilan yang merupakan pelayanan publik bagi pencari keadilan diukur berdasarkan tersedianya layanan publik seperti: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pojok E-Court, Fasilitas e Banking, Ruang Laktasi, Ruang Ramah Anak, Ruang Bermain Anak, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Ruang Mediasi dan Ruang *Teleconference*. Penghitungan terpenuhinya layanan peradilan didasarkan pada penilaian tersedianya ruang atau tempat untuk layanan dimaksud meskipun dari sisi kelayakan, belum sepenuhnya layak atau memenuhi kriteria tertentu. Berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.39
Pengadilan dengan Standar Minimal Pelayanan Peradilan (K3)

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Pengadilan yang Memenuhi Kriteria
1.	Peradilan Umum	413
2.	Peradilan Agama	442
3.	Peradilan Militer	23
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	38
Jumlah		916

Sumber: aplikasi E-SADEWA dan SIMAN

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengadilan yang telah memiliki standar minimal pelayanan peradilan adalah sebanyak **916** satuan kerja dari **923** satuan kerja di seluruh Indonesia atau sebesar **99,24%**.

Indikator kinerja persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah perbandingan antara jumlah pengadilan yang memiliki

gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup ketiga kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan jumlah pengadilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Capaian pada indikator Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.40
Persentase Sarana Dan Prasarana Pengadilan Sesuai Standarisasi Yang Ada

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Sarana Dan Prasarana Pengadilan Sesuai Standarisasi Yang Ada	85%	80,57%	94,79	89,48	85,48	82,35	75,29

Sumber: aplikasi E-SADEWA dan SIMAN

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target 85% dihitung berdasarkan rata-rata capaian 3 (tiga) kriteria, yaitu: 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan (K1), layanan bagi penyandang disabilitas (K2) dan pelayanan peradilan (K3).

Dapat diketahui bahwa dari target persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima sebesar 85%, di tahun 2024 sudah tercapai sebesar 80,57% { (K1+K2+K3) : 3} berdasarkan 3 (tiga) kriteria di atas pada 923 satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah realisasi terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima mencapai 80,57% dari 85% yang ditargetkan sehingga capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 94,79%. Angka ini menunjukkan terdapat kenaikan sebesar 4,43% dari tahun 2023. Berdasarkan kesimpulan diatas, pada tahun 2024 terdapat peningkatan capaian sebesar 4,43% dari Tahun 2023. Peningkatan capaian kinerja tersebut di setiap kriteria (K1, K2 dan K3) terjadi karena kebijakan dan program Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan layanan peradilan yang memadai

dan modern melalui pembangunan pengadilan baru berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 hingga Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru, yang mencakup total 85 pengadilan dengan standar prototipe. Pembangunan ini dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2020. Selain itu, Mahkamah Agung juga melaksanakan renovasi, rehabilitasi, dan penambahan fasilitas pendukung di gedung-gedung pengadilan pada beberapa satuan kerja, sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, sebanyak 13 gedung pengadilan baru telah selesai dibangun, memenuhi standar bangunan serta sarana dan prasarana yang telah ditentukan.

2. Mahkamah Agung terus meningkatkan upaya sosialisasi terhadap pedoman dan aturan yang berkaitan dengan Zona Integritas, Akreditasi Penjaminan Mutu, serta Pelayanan Publik. Langkah ini mendorong seluruh pengadilan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan layanan peradilan bagi masyarakat sesuai dengan pedoman, standar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Secara khusus, dalam upaya meningkatkan layanan bagi penyandang

disabilitas, telah dialokasikan tambahan anggaran pada tahun 2024 untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan disabilitas di sejumlah pengadilan. Alokasi ini didasarkan pada Surat Kepala Biro Perencanaan dan

Organisasi Badan Urusan Administrasi Nomor 261/BUA.1/RA1.4/VIII/2024 tentang Permohonan Data Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Disabilitas Tahun Anggaran 2024, tertanggal 13 Agustus 2024

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-11

Persentase Nilai Penatausahaan BMN yang Ditindaklanjuti

Indikator ini merupakan perbandingan antara nilai penatausahaan BMN yang ditetapkan dengan nilai BMN secara keseluruhan berdasarkan sumber data yang berasal dari:

- Aplikasi SIMAK BMN
- Aplikasi SIMAN
- Laporan Tahunan Biro Perlengkapan

Persentase nilai penatausahaan BMN yang

ditindaklanjuti diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nilai penatausahaan BMN yang ditetapkan}}{\text{Jumlah nilai BMN keseluruhan}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 85% dan perbandingan capaian tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.41
Persentase Nilai Penatausahaan BMN yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Nilai Penatausahaan BMN yang Ditindaklanjuti	85%	100%	117,65	119,26	126,15	131,33	125,33

Sumber: aplikasi E-SADEWA dan SIMAN

Jumlah nilai BMN secara keseluruhan sebesar Rp2,368,263,870,260,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah) yang seluruhnya telah ditetapkan sehingga realisasi sebesar 100%. Nilai penatausahaan yang diukur dalam indikator ini adalah nilai Penetapan Status Penggunaan (PSP) terhadap seluruh BMN yang digunakan oleh satuan kerja baik yang ditetapkan oleh Pengguna Barang maupun oleh Pengelola

Barang. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti melebihi target yang ditetapkan.

Capaian persentase nilai penatausahaan BMN yang ditetapkan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 karena target yang ditetapkan lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu dari 75% menjadi 85%. Penurunan target ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 yang

capaiannya sudah sangat tinggi (lebih dari 120%) sehingga target harus diturunkan untuk menjaga akurasi, kewajaran dan kredibilitas pelaporan kinerja. Namun demikian, secara teknis usulan penatausahaan BMN yang

ditetapkan masih tidak banyak perubahan dan bahkan saat ini lebih mudah karena semua sudah dapat diajukan melalui aplikasi SIMAN milik Kementerian Keuangan.

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-12

Persentase Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan

Indikator ini merupakan perbandingan antara nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan dengan nilai pengelolaan BMN yang diusulkan. Bentuk pengelolaan yang diukur dalam indikator ini meliputi pemanfaatan BMN, pemindahtanganan BMN dan Penghapusan BMN.

Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti diukur dengan menggunakan

formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan}}{\text{Jumlah nilai pengelolaan BMN yang diusulkan}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 85% dan perbandingan capaian tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.42
Persentase Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan	85%	100%	117,65	132,70	153,85	226	135

Capaian persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 karena target yang ditetapkan lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu dari 75% menjadi 85%. Penurunan target ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 yang capaiannya sudah saat tinggi (lebih dari 120%) sehingga target harus diturunkan untuk menjaga

akurasi, kewajaran dan kredibilitas pelaporan kinerja. Selain itu, target juga diturunkan untuk menghindari overestimasi atau target yang realistis. Namun demikian, secara teknis usulan pengelolaan BMN yang ditetapkan masih tidak banyak perubahan dan bahkan saat ini lebih mudah karena semua sudah dapat diajukan melalui aplikasi SIMAN milik Kementerian Keuangan.

Tabel 3.43
Persentase Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan

Pengelolaan BMN	Nilai yang ditetapkan	Nilai yang diusulkan	Persentase
Sewa	3.244.829.852	3.244.829.852	100,00%
Penjualan	101.516.775.396	101.516.775.396	100,00%
Pemusnahan	1.255.968.426	1.255.968.426	100,00%
Hibah Keluar	3.417.721.000	3.417.721.000	100,00%
Hibah Masuk	0	0	0,00%
Penghapusan	113.505.806.323	113.505.806.323	100,00%
Total	222.941.100.997	222.941.100.997	100,00%

Pengajuan pengelolaan BMN yang menjadi wewenang Pengguna Barang dalam hal ini adalah Sekretaris Mahkamah Agung sudah dilakukan secara online menggunakan aplikasi e-Sadewa dan SIMAN. Pada tahun 2024, proses pengajuan ini mengalami perubahan karena adanya upgrade pada aplikasi SIMAN dari versi 1 yang berbasis aplikasi menjadi versi 2 berbasis web. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi proses

pengusulan, namun akhirnya dapat berjalan normal kembali.

Untuk meningkatkan kompetensi pada tingkat satuan kerja, Biro Perlengkapan secara terus menerus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada satuan kerja baik secara virtual dengan menggunakan aplikasi zoom meeting maupun secara langsung sebagai narasumber pada kegiatan bimbingan teknis.

Sasaran 3
Mewujudkan Regulasi dan Tatakelola yang Baik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, menegaskan akan pentingnya penerapan *clean government* dan *good governance* secara universal yang menjadi prinsip untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan 8 area perubahan.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung melakukan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi

pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Prinsip-prinsip di atas, sebagaimana yang dimuat di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, terkandung dalam visi Reformasi Birokrasi Nasional yang hendak dicapai Pemerintah pada Tahun 2025 yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.

Sasaran strategis ini diukur berdasarkan 4 indikator kinerja dengan capaian tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.44
Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)
Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1. Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	7 Regulasi	12 Regulasi	171.43%
	2. Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “BB”	700 Satker	784 Satker	112.00%
	3. Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan	35 Dokumen	40 Dokumen	114.29%
	4. Persentase bantuan kepada Mahkamah Agung yang telah diputus	75%	77.78%	103.70%

Sasaran 3 - Indikator kinerja ke-1
Jumlah Regulasi dan Kebijakan Tatalaksana yang Disusun

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah regulasi kebijakan tatalaksana yang telah dihasilkan pada tahun 2024 dan target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebanyak

7 regulasi dengan perbandingan capaian tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.45
Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	7 Regulasi	12 Regulasi	171,43	120	160	100	100

Demi kelancaran perwujudan visi Reformasi Birokrasi Nasional maka ditetapkan Road Map RB 2015-2019 sebagai pedoman pelaksanaan operasional grand design. Target capaian pada periode akhir road map adalah “Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Kinerja,” dan untuk itu dirumuskan tiga sasaran reformasi birokrasi yang harus diperhatikan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansinya:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Selama tahun 2024 Badan Urusan Administrasi telah menetapkan 13 (tiga belas) regulasi kebijakan tatalaksana, dengan target yang ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) regulasi kebijakan tatalaksana. Sehingga capaiannya jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 171,43% dan meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 dan 2022 yaitu sebesar 6 regulasi dan 8 regulasi. Regulasi dan kebijakan tatalaksana yang ditetapkan pada tahun 2024, antara lain:

1. Rancangan Perubahan Keenam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
2. Rancangan Perubahan atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada

Empat Lingkungan Peradilan.

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 260/KMA/SK.KP5/XII/2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
4. Penyusunan Pedoman Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya (sudah dilakukan harmonisasi dan menunggu penetapan perkembangan pimpinan) Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 117/SEK/SK.HK1.2.5/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
5. Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Penetapan Kenaikan Kelas Pengadilan pada 19 (sembilan belas) Pengadilan Negeri Kelas II Menjadi Kelas IB dan 17 (tujuh) Pengadilan Negeri Kelas IB Menjadi Kelas IA.
6. Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Penetapan Kenaikan Kelas Pengadilan pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas IB dan 8 (delapan) Pengadilan Agama Kelas IB Menjadi Kelas IA.
7. Rancangan Peraturan Pemerintah dalam rangka Pembentukan 2 (dua) Pengadilan Militer Tinggi dan 3 (tiga) Pengadilan Militer, setelah mendapatkan persetujuan oleh Presiden RI melalui surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-531/M/D-1/

HK.02.00/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 perihal Persetujuan Ijin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.
9. Perubahan Nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan menjadi Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1901/SEK/ SK.PW1/XII/2024 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Secara Mandiri Tahun 2024 pada 259 Satuan Kerja.
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 258/KMA/SK.OT2/XII/2024 tentang Penetapan Penyetaraan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang Berada di Bawahnya

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 260/KMA/SK.KP5/XII/2024 tentang Penetapan kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja ini dengan berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta regulasi dari intern Mahkamah Agung diantaranya:

1. Melakukan rapat dan koordinasi internal dengan Biro dan Ditjen terkait dari hasil aturan yang telah disusun Bagian Organisasi dan Tatalaksana pada Biro Perencanaan dan Organisasi;
2. Tahapan harmonisasi dilakukan dengan Biro Hukum dan Humas atas dasar pemakrasa dari Bagian Organisasi dan Tatalaksana pada Biro Perencanaan dan Organisasi;
3. Dilakukannya koordinasi, rapat dan FGD dengan pihak lain diluar Mahkamah Agung dengan Kementerian/Lembaga terkait guna terselesaikannya hasil rumusan yang telah ditentukan oleh beberapa stakeholder

Sasaran 3 - Indikator kinerja ke-2

Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “BB”

Satker di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berjumlah 930 satker, dimana setiap satker berkewajiban mempertanggungjawabkan kinerjanya masing-masing, melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaporkan setiap tahun.

Dalam pelaporan tersebut terdiri dari berbagai komponen dan sub komponen yang merupakan satu kesatuan kriteria yaitu:

1. Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian

- Kinerja Tahunan (PKT).
2. Pengukuran Kinerja.
 3. Pelaporan Kinerja.
 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dalam rangka pencapaian *good governance*, Mahkamah Agung berusaha mengembangkan SAKIP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya demi mewujudkan pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Biro Perencanaan dan Organisasi yang telah diamanahkan untuk mengembangkan

implementasi SAKIP di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, diantaranya melakukan sosialisasi dan konsolidasi penerapan SAKIP.

Dalam Perjanjian Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2024, menargetkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “BB” sebesar 700 satker, sebagai bahan perbandingan capaian kinerja tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.46
Jumlah satker yang mendapatkan nilai LKjIP “BB”

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah satker yang mendapatkan nilai LKjIP “BB”	700 Satker	784 Satker	112,00	120,87	122,64	133,45	125,34

Metode evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengalami perubahan pada periode penilaian Tahun 2021 atas implementasi AKIP Tahun 2020 dengan terbitnya kebijakan baru dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga terdapat beberapa perbedaan metode evaluasi yang memerlukan penyesuaian yaitu:

1. Terdapat komponen penilaian yang berbeda yaitu “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal”, sehingga masing-masing entitas perlu membuktikan bahwa Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan didukung *evidence* terkait upaya tindak lanjutnya. Berbeda dengan penilaian sebelumnya yang hanya fokus pada implementasi SAKIP berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan.
2. Terdapat metode penilaian yang berbeda, dengan dilakukannya penilaian mandiri terlebih dahulu oleh masing-masing entitas akuntabilitas kinerja disertai dengan berbagai *evidence* sesuai kategori

nilai yang diklaim pada masing-masing komponen dan subkomponen penilaian. Hasil penilaian mandiri tersebut menjadi dasar evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan secara berjenjang oleh:

- a. Badan Pengawasan Mahkamah Agung terhadap penilaian mandiri akuntabilitas kinerja Unit Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding.

- b. Pengadilan Tingkat Banding terhadap penilaian mandiri akuntabilitas kinerja Pengadilan Tingkat Pertama.

Berikut adalah rekapitulasi Nilai AKIP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun 2020-2023 (pelaksanaan penilaian di tahun 2024):

Tabel 3.47
Rekapitulasi Nilai AKIP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun 2020-2023 (Pelaksanaan Tahun 2020-2024)

No	Kategori	Nilai Angka	Jumlah Satker			
			2020 (Pelaksanaan Tahun 2021)	2021 (Pelaksanaan Tahun 2022)	2022 (Pelaksanaan Tahun 2023)	2023 (Pelaksanaan Tahun 2024)
1.	AA	>90-100 (Sangat Memuaskan)	1	5	0	0
2.	A	>80 – 90 (Memuaskan)	189	73	93	114
3.	BB	>70 – 80 (Sangat Baik)	600	648	622	670
Jumlah satker ≥ BB			790	726	715	784
4.	B	>60 – 70 (Baik)	116	179	186	132
5.	CC	>50 – 60 (Cukup)	2	4	10	10
6.	C	>30 – 50 (Kurang)	0	5	0	4
7.	D	0 – 30 (Sangat Kurang)	2	3	1	0
Jumlah Satker			917	917	930	930

Sumber data : Aplikasi e-SAKIP Komdanas

Jumlah Satker yang mendapat Nilai SAKIP minimal BB pada Tahun 2020 sebanyak 133,45% atau sebanyak 790 satker dari 592 satker yang ditargetkan. Namun capaian tersebut turun sangat drastis pada penilaian SAKIP Tahun 2021 sebagai dampak terbitnya kebijakan baru dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021

Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metodologi penilaian evaluasi terbaru menyajikan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan komponen dan subkomponen

penilaian yang mampu mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Badan Urusan Administrasi memiliki target nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “BB” untuk jangka menengah (tahun 2024) sebesar 592 satker, namun demikian capaian target kinerja tersebut telah melampaui target sejak tahun 2020, sehingga target Tahun 2024 direvisi menjadi 700 satker. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi sebagai upaya untuk terus memperbaiki implementasi SAKIP, diantaranya:

1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya, dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tanggal 27 Desember 2022.
2. Sosialisasi, Asistensi dan konsultasi mengenai implementasi SAKIP termasuk penyusunan dokumen-dokumen SAKIP pada empat lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung melalui zoom meeting/on line maupun off line.
3. Penyelarasan Perencanaan strategis (IKU, Renstra, RKT dan PKT), Pelaporan Kinerja dan Pengukuran Kinerja di lingkungan Badan Urusan Administrasi.
4. Penyempurnaan Aplikasi e-SAKIP berkelanjutan dalam rangka meningkatkan Manajemen Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya.

5. Pelaksanaan evaluasi atas efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran dalam rangka peningkatan Implementasi SAKIP untuk pengukuran kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Disamping keberhasilan capain kinerja ini, masih terdapat kendala dalam meningkatkan nilai AKIP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, diantaranya:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini sehingga terdapat perbedaan dalam menginterpretasikan indikator kinerja pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung.
2. Dokumen Perencanaan yang disusun tidak sepenuhnya didasari dengan data historik yang kuat, sehingga mempersulit pengukuran kinerja.
3. Perjanjian Kinerja yang disusun belum sepenuhnya dimonitor, dievaluasi secara periodik, hal ini dikarenakan belum berfungsinya sistem *reward* and *punishment* terhadap capaian kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Jajaran peradilan di bawahnya.
4. Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dijadikan tolak ukur keberhasilan dan kegagalan organisasi.
5. Belum optimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya.

Sasaran 3 - Indikator kinerja ke-3

Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan Mahkamah Agung yang telah diselesaikan

Salah satu kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung berhak membuat Peraturan yang mengatur hukum acara yang belum diatur dalam Undang-Undang untuk mengisi kekosongan hukum yang ada serta memberikan petunjuk baik teknis maupun administratif terhadap pelaksanaan kegiatan ataupun tugas bagi seluruh pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Indikator ini untuk mengukur jumlah kebijakan Mahkamah Agung yang dihasilkan oleh Badan Urusan Administrasi setelah dilaksanakannya harmonisasi baik secara

tata naskah maupun secara substansi yang terdiri dari:

1. Peraturan Mahkamah Agung
2. Surat Edaran Mahkamah Agung
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
5. Memorandum of Understanding (MoU) / Adendum

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 35 dokumen dengan perbandingan capaian tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.48
Jumlah Perancangan dan Harmonisasi Kebijakan Mahkamah Agung Yang Telah Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan	35 Dokumen	40 Dokumen	114,29	75,76	225	106	72

Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2024 sebesar 40 dokumen dengan capaian sebesar 114,29% lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan adanya revisi target yang semula sebesar 66 dokumen menjadi 35 dokumen. Jumlah harmonisasi kebijakan bergantung pada jumlah kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan yang dilakukan harmonisasi terlebih dahulu oleh Biro Hukum dan Humas, namun demikian masih terdapat beberapa kebijakan yang

disahkan tanpa melalui proses harmonisasi karena kurangnya sosialisasi kepada stakeholder terkait mengenai pentingnya proses harmonisasi tersebut. Perancangan dan harmonisasi kebijakan Mahkamah Agung yang telah diselesaikan tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 3.49

Jumlah Perancangan Dan Harmonisasi Kebijakan Mahkamah Agung Yang Telah Diselesaikan Tahun 2024

1	PERMA NOMOR 1 TAHUN 2024 Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	2	PERMA NOMOR 2 TAHUN 2024 Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
3	SEMA NOMOR 1 TAHUN 2024 Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik	4	SEMA NOMOR 2 TAHUN 2024 Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
5	07/KMA/SK.HM3.1.3/I/2024 Penetapan Tema, Waktu Dan Tempat Penyelenggaraan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023	6	13/KMA/SK.DL1/I/2024 Program Pendidikan Dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu
7	20/KMA/SK.KP1.1.3/I/2024 Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung RI	8	21/KMA/SK.KP1.1.3/I/2024 Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tahap XXI Dan XXII Tahun 2024
9	85/KMA/SK.KKA/III/2024 Akreditasi Kepada Persatuan Purnabakti Hakim Indonesia (PERPAHI) Sebagai Penyelenggara Pelatihan Dan Pendidikan Mediasi	10	92/KMA/SK.KP1.1/IV/2024 Peraturan Tata Tertib Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
11	93/KMA/SK.KP1.1/IV/2024 Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung RI	12	93A/KMA/SK.TI2/IV /2024 Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Mahkamah Agung
13	94/KMA/SK.KP1.1/IV/2024 Pengesahan Hasil Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial	14	94A/KMA/SK.KP1.1/IV/2024 Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Mahkamah Agung
15	117/KMA/SK.DL1.2/V/2024 Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Jinayat	16	147/KMA/SK.HK1.2.5/VI/2024 Pemberian Akreditasi Kepada Impartial Mediator Network (IMN) Sebagai Penyelenggara Pelatihan Dan Pendidikan Mediasi
17	148/KMA/SK.HK1.2.5/VI/2024 Pemberian Akreditasi Kepada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Sebagai Penyelenggara Pelatihan Dan Pendidikan Mediasi	18	151/KMA/SK.KP1.1.2/VI/2024 Kelompok Kerja Revisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/20217 Tentang Pola Prmosi Dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan

19	157/KMA/SK.HK1.2.5/VII/2024 Pemberian Akreditasi Kepada Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sebagai Penyelenggara Pelatihan Dan Pendidikan Mediasi	20	161/KMA/SK.KP1.1.3/VII/2024 Penambahan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tahap Ke XXI Tahun 2024
21	212/KMA/SK.KP1.1/X/2024 Tata Tertib Pemilihan Ketua Mahkamah Agung	22	213/KMA/SK.KP1.1/X/2024 Panitia Pemilihan Ketua Mahkamah Agung
23	246/KMA/SK.HM3.1.3/XII/2024 Penetapan Tema Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 Serta Waktu Dan Tempat Penyelenggaraan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024	24	247/KMA/SK.HM3.1.3/XII/2024 Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 Dan Penyusunan Buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024
25	249/KMA/SK.KP5/XII/2024 Perubahan Kelima Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 13/ KMA/SK/I/2020 Tentang Insentif Bagi Hakim Dan Pegawai Pada Unit Kerja Yang Memperoleh Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Di Lingkungan Mahkamah Agung	26	258/KMA/SK.OT2/XII/2024 Penetapan Penyetaraan Kelas Jabatan Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
27	260/KMA/SK.KPS/XII/2024 Penetapan Kelas Jabatan Dan Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya	28	193/SEK/SK.KU1.1.3/II/2024 Standar Biaya Honorarium Penanganan Perkara Kasasi Dan Peninjauan Kembali Bagi Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024
29	194/SEK/SK.KU1.1.3/II/2024 Petunjuk Teknis Pembayaran Honorarium Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024	30	212/SEK/SK.KP5.3/II/2024 Pedoman Pelaksanaan Cuti Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
31	805/SEK/SK.OT1.1/VI/2024 Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/ SK/III/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung	32	1436/SEK/SK.KA2/X/2024 Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
33	1696A/SEK/SK.HM3.1.3/XII/2024 Pembentukan Panitia Penyelenggara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024	34	1/SEK/NK.KU1.1/IV/2024 Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan antara Mahkamah Agung dan Bank Rakyat Indonesia
35	3/SEK/NK.KU1.1/VIII/2024 Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan antara Mahkamah Agung dan Bank Mandiri	36	4/SEK/NK.KU1.1/VIII/2024 Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan antara Mahkamah Agung dan Bank Syariah Indonesia

37	1/SEK/PKS.KU1.1/IV/2024	38	2/SEK/PKS.HM2.1/V/2024
	Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan antara Mahkamah Agung dan Bank Rakyat Indonesia		Penyelenggaraan Kegiatan Paralegal Justice Award Tahun 2024 antara Mahkamah Agung dan Badan Pembinaan Hukum Nasional
39	3/SEK/PKS.KU1.1/VIII/2024	40	5/SEK/NK.KU1.1/VIII/2024
	Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan antara Mahkamah Agung dan Bank Mandiri		Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan antara Mahkamah Agung dan Bank Syariah Indonesia

Pada tahun 2021 terdapat 64 kebijakan, tahun 2022 terdapat 135 kebijakan, tahun 2023 sebanyak 50 kebijakan serta pada tahun 2024 terdapat 40 kebijakan.

Perbedaan dan kenaikan jumlah dokumen harmonisasi kebijakan ini bergantung pada adanya permohonan dari pemrakarsa kebijakan tersebut namun disisi lain masih terdapat beberapa kebijakan yang disahkan tanpa melalui proses harmonisasi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi kepada stakeholder

terkait mengenai pentingnya proses harmonisasi tersebut.

Sebagai upaya yang dilakukan bagian Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai kinerja ini adalah melakukan sosialisasi kepada para stakeholder mengenai urgensi dari proses harmonisasi sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menjadi lebih berkualitas baik dari segi tata naskah maupun segi substansi.

Tabel 3.50
Rekapitulasi Jumlah Perancangan Dan Harmonisasi Kebijakan Mahkamah Agung Yang Telah Diselesaikan Tahun 2020-2024

TAHUN	JUMLAH HARMONISASI	JUMLAH HARMONISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	KEBIJAKAN MA YANG SEHARUSNYA DISELESAIKAN	KEBIJAKAN MA YANG TERSELESAIKAN			
2020	50 kebijakan	43 kebijakan	60 kebijakan	43 kebijakan	71,67%
2021	64 kebijakan	64 kebijakan	60 kebijakan	64 kebijakan	106,67%
2022	135 kebijakan	135 kebijakan	60 kebijakan	135 kebijakan	225,00%
2023	50 kebijakan	50 kebijakan	66 kebijakan	50 kebijakan	75,76%
2024	40 dokumen	40 dokumen	35 kebijakan	40 dokumen	114,29%

Sasaran 3 - Indikator kinerja ke-4

Persentase Bantuan Hukum kepada Mahkamah Agung yang Telah Diputus

Bantuan hukum yang dimaksud dalam indikator ini adalah pemberian advokasi bagi Mahkamah Agung dalam menghadapi gugatan. Dalam menghadapi gugatan tersebut, Mahkamah Agung menunjuk tim kuasa hukum pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi.

Indikator ini untuk mengukur persentase

bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus dari jumlah keseluruhan bantuan hukum pada tahun 2022 dengan formulasi sebagai berikut:

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 75% dengan perbandingan capaian tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.51
Persentase Bantuan Hukum kepada Mahkamah Agung yang Telah Diputus

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Bantuan Hukum kepada Mahkamah Agung yang Telah Diputus	75%	77,78%	103,70	424,24	366,67	458	333

$$\frac{\text{Jumlah Bantuan Hukum yang Telah Putus}}{\text{Jumlah Bantuan Hukum yang Masuk}} \times 100\%$$

Jumlah gugatan yang masuk selama tahun 2023 adalah sebanyak 18 perkara gugatan dan terdapat 14 gugatan yang telah selesai perkaranya (telah diputus/ dicabut gugatannya) sehingga realisasinya sebesar 77,78% dari target yang ditetapkan

sebesar 75% sehingga capaiannya sebesar 103,70%. Adanya revisi target pada tahun 2024 menyebabkan capaian indikator ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Revisi target diperlukan karena capaian selama tahun 2020 – 2023 terlampau tinggi dengan target yang terlampau rendah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.52
Rekapitulasi Jumlah Gugatan pada Tahun 2020-2024

TAHUN	JUMLAH GUGATAN MASUK	JUMLAH GUGATAN TELAH PUTUS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	5 Perkara gugatan	2 Perkara gugatan	12%	40%	333,33%
2021	9 Perkara gugatan	5 Perkara gugatan	12%	55%	458,33%
2022	11 Perkara gugatan	6 Perkara gugatan	15%	55%	366,67%

2023	11 Perkara gugatan	7 Perkara gugatan	15%	64%	424,24%
2024	18 Perkara gugatan	14 Perkara gugatan	75%	77,78%	103,70%

Pada tahun 2021, jumlah gugatan yang telah putus sebanyak 5 perkara, pada tahun 2022 sebanyak 6 perkara, pada tahun 2023 sebanyak 7 perkara, dan pada tahun 2024 sebanyak 14 perkara. Peningkatan atau penurunan jumlah gugatan tidak bisa diukur, karena selain faktor yang tidak dapat diprediksi jumlah gugatan yang masuk, setiap perkara yang telah diproses memiliki waktu penyelesaian yang berbeda-beda. Sebagai upaya yang dilakukan oleh Badan Urusan Administrasi untuk mencapai kinerja ini adalah mengusahakan agar setiap perkara gugatan yang masuk dapat diproses lebih cepat dan mengupayakan upaya damai jika memang memungkinkan

Sasaran 4

Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan yang Prima

Sasaran strategis ini diukur untuk melihat sejauh mana pelayanan kesekretariatan terlaksana dengan prima berdasarkan 9 indikator kinerja dengan capaian kinerja tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.53

Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan yang Prima

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)
Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	1. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi	16 Aplikasi	160.00
	2. Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	800 Berita	1,471 Berita	183.88
	3. Jumlah Pengguna aplikasi e-library	10.000 Pengguna	10,627 Pengguna	106.27
	4. Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	100%	100%	100
	5. Persentase penyelesaian distribusi surat	100%	100%	100
	6. Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan Pimpinan dengan tepat waktu	100%	100%	100

7.	Jumlah dukungan keprotokolan dan keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung	160 kegiatan	162 kegiatan	101.25
8.	Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung	11.000 layanan	11,884 layanan	108.04
9.	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	146 Laporan	206 Laporan	141.10

Sasaran 4 - Indikator Kinerja ke-1

Jumlah Aplikasi yang Telah Diselesaikan

Salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung yaitu memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, perlu adanya penerapan teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi di lingkungan Mahktamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Penerapan teknologi informasi di Badan Peradilan mempertimbangkan dinamika dan perubahan.

Tabel 3.54

Jumlah Aplikasi yang Telah Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah Aplikasi yang Telah Diselesaikan	10 Aplikasi	16 Aplikasi	160	100	100	85	80

Indikator ini untuk mengukur jumlah aplikasi yang telah diselesaikan atau dikembangkan oleh Badan Urusan Administrasi baik dalam bentuk peningkatan fungsi dan modul (peningkatan versi) maupun pengembangan baru. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebanyak 10 aplikasi dengan realisasi sebanyak 16 aplikasi terdiri dari:

Triwulan	Pengembangan
I	Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Perkara MA Terintegrasi (SIAP MA TERINTEGRASI) untuk pencatatan permohonan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Pengembangan SIPP versi 5.5.0

II	Pengembangan SIPP versi 5.5.1
	Pengembangan SIPP versi 5.5.2
	Pengembangan SPPT-TI dalam hal uji coba enkripsi dan deskripsi dan swagger
	Pengembangan Deteksi Dini Perkara
	Pengembangan e-Court Upaya Hukum Kasasi
III	Pengembangan e-Court Upaya Hukum Peninjauan Kembali
	Pengembangan SIPP versi 5.6.0
	Pengembangan e-Court versi 6.0.0
IV	Pengembangan Simari-PNBP versi 2.3.0
	Pengembangan SPPT-TI
	Pengembangan e-BERPADU Tingkat Banding
	Pengembangan SIPP Tingkat Banding
	Pengembangan SIPP Kepailitan dan PKPU
	Pengembangan e-Court Kepailitan dan PKPU

Ketersediaan Infrastruktur Data center di Mahkamah Agung menjadi salah satu faktor keberhasilan pencapaian ini., khususnya dalam hal:

- **Konektifitas Internet.** Koneksi internet dengan bandwidth yang tinggi dan stabil baik untuk komunikasi antar server maupun untuk akses pengguna aplikasi dari berbagai lokasi mendukung pengembangan aplikasi berbasis web yang memerlukan konektivitas real-time.
- **Ketersediaan Server:** Infrastruktur data center yang mumpuni memberikan ketersediaan server yang memadai untuk mendukung pengembangan dan pengujian aplikasi.
- **Virtualisasi:** Dengan memanfaatkan teknologi virtualisasi, sumber daya fisik data center dapat dioptimalkan sehingga biaya operasional berkurang.
- **Keamanan Data:** Infrastruktur data center yang memenuhi standar keamanan memberikan jaminan

terhadap perlindungan data aplikasi yang dikembangkan.

- **Kapasitas Penyimpanan:** Tersedianya storage yang memadai memungkinkan pengelolaan data aplikasi, termasuk log sistem dan data pengguna, secara efisien.
- **Skalabilitas:** Kemampuan data center untuk menangani peningkatan jumlah aplikasi dan pengguna menjadi kunci keberlanjutan pengembangan.
- **Ketersediaan Disaster Recovery Center(DRC).** DRC menjadi elemen krusial dalam memastikan keberlanjutan operasional aplikasi dan infrastruktur data center. DRC merupakan fasilitas cadangan yang dirancang untuk menampung data-data kritikal dari aplikasi, termasuk hasil backup data secara terstruktur, guna menjaga kelangsungan layanan saat terjadi bencana atau gangguan besar pada data center utama

Sasaran 4 - Indikator kinerja ke-2

Jumlah Berita tentang Mahkamah Agung yang Dimuat Media

Indikator ini untuk mengukur jumlah berita tentang kebijakan ataupun kegiatan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya yang telah disampaikan kepada masyarakat melalui media internal (Website MA) dan Pengelolaan Media Sosial (Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok, Youtube Humas MA) untuk mendukung

program pemerintah dalam hal keterbukaan informasi publik.

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 800 berita dengan perbandingan capaian tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini

Tabel 3.55
Jumlah Berita tentang Mahkamah Agung yang Dimuat Media

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah Berita tentang Mahkamah Agung yang Dimuat Media	800 Berita	1.471 Berita	183,88	514,35	913,48	500	425

Realisasi pada tahun 2024 sebanyak 1.471 berita lebih banyak dari realisasi tahun 2023 sebanyak 1.183 berita. Capaian tahun 2024 lebih rendah dari beberapa tahun sebelumnya dikarenakan terjadi revisi target yang semula

hanya 230 berita menjadi 800 berita. Revisi tersebut diperlukan, karena realisasi yang terlampau tinggi melebihi target sejak tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.56
Daftar berita yang dimuat di Media Internal Tahun 2022-2024

TAHUN	JUMLAH BERITA DI WEBSITE MA	JUMLAH BERITA DI MEDIA SOSIAL (IG, FB, TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE)	TOTAL BERITA DI MEDIA INTERNAL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	225	1651	2.101	230	2.101	913,48 %
2023	204	979	1.183	230	1.183	514,35%
2024	215	1.256	1.471	800	1.471	183,875%

Berita tentang Mahkamah Agung dilakukan melalui dua cara yaitu melalui Media Intemal (Website Mahkamah Agung) dan Pengelolaan Media Sosial (Instagram, Twitter, Facebook.

Tiktok dan Youtube Humas Mahkamah Agung) yang secara intens memberitakan kegiatan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Sasaran 4 - Indikator kinerja ke-3

Jumlah Pengguna aplikasi e-Library

Perpustakaan Mahkamah Agung sampai saat ini masih melakukan peningkatan layanan kepada pemustaka baik di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya serta masyarakat luas pada umumnya. Selain layanan yang bersifat fisik (peminjaman bahan pustaka dan baca ditempat), saat ini Perpustakaan Mahkamah Agung telah menyediakan layanan yang bersifat digital yang dapat diakses oleh pemustaka pada website Perpustakaan Mahkamah Agung (*e-library*), yang terdiri dari koleksi buku digital (*e-book*), Majalah Mahkamah Agung Online yang diterbitkan setiap 4 bulan sekali, serta katalog (*Online*

Public Access Catalog) bahan Pustaka untuk melakukan pencarian bahan pustaka yang terdapat di Perpustakaan Mahkamah Agung guna meningkatkan pelayanan prima pada Perpustakaan Mahkamah Agung yang berbasis teknologi informasi.

Indikator ini untuk mengukur jumlah pemustaka/pengguna yang memanfaatkan layanan digital Perpustakaan Mahkamah Agung dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebanyak 15.000 pengguna dengan perbandingan capaian tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.57

Jumlah Pengguna aplikasi e-Library

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah Pengguna aplikasi e-Library	10.000 pengguna	10.627 pengguna	106,27	267,84	195,71	160	88

Capaian kinerja pada tahun 2024 ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Jumlah pengguna aplikasi *e-library* sebanyak 10.627 pengunjung dengan capaian kinerja 106,27%. Penghitungan pengguna aplikasi *e-library* pada Perpustakaan Mahkamah Agung RI menggunakan Google Analytics terhadap pengguna yang mengakses situs web Perpustakaan Mahkamah Agung. Hal ini dapat terjadi karena pengembangan aplikasi perpustakaan yang terus dilakukan

serta penyebaran informasi tentang keberadaan layanan yang ada pada website perpustakaan yang dapat diakses secara luas oleh pemustaka. Untuk meningkatkan akurasi target dan relevansi pengukuran indikator kinerja di tahun 2024, indikator kinerja “jumlah pengguna aplikasi *e-library* jumlah pengguna yang hanya mengunjungi halaman depan situs web Perpustakaan Mahkamah Agung akan dikecualikan dari pengukuran.

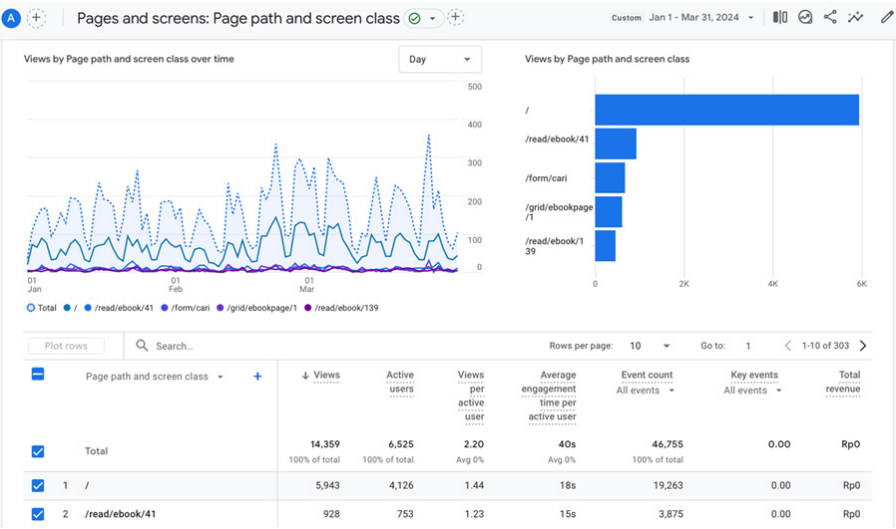
Tabel 3.58

Jumlah Pengguna Aplikasi e-Library Tahun 2024 (Per Triwulan)

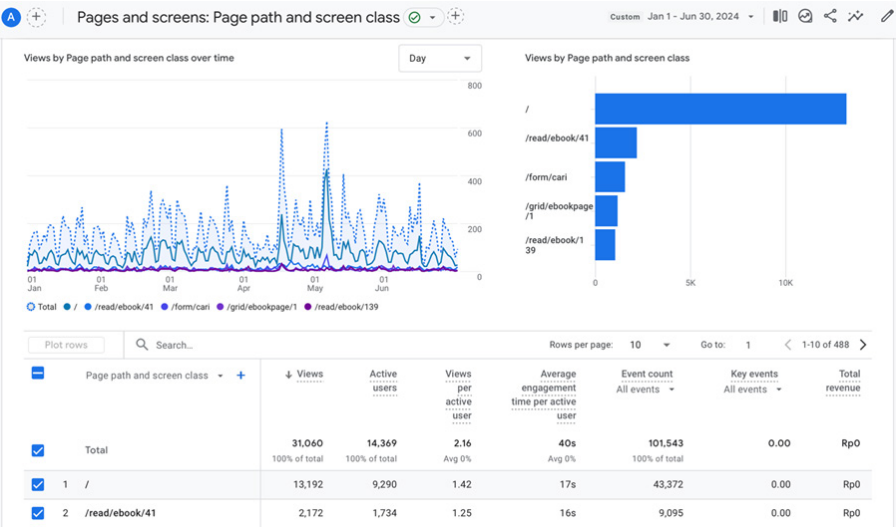
Indikator Kinerja	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pengguna aplikasi <i>e-library</i>	2.400	2.494	103,9%	5.000	5.279	105,6%	7.300	7.371	101%	10.000	10.627	106,3%

Hasil Penghitungan Pengguna Aplikasi *e-library* Tahun 2024 (per triwulan) menggunakan *google analytics*.

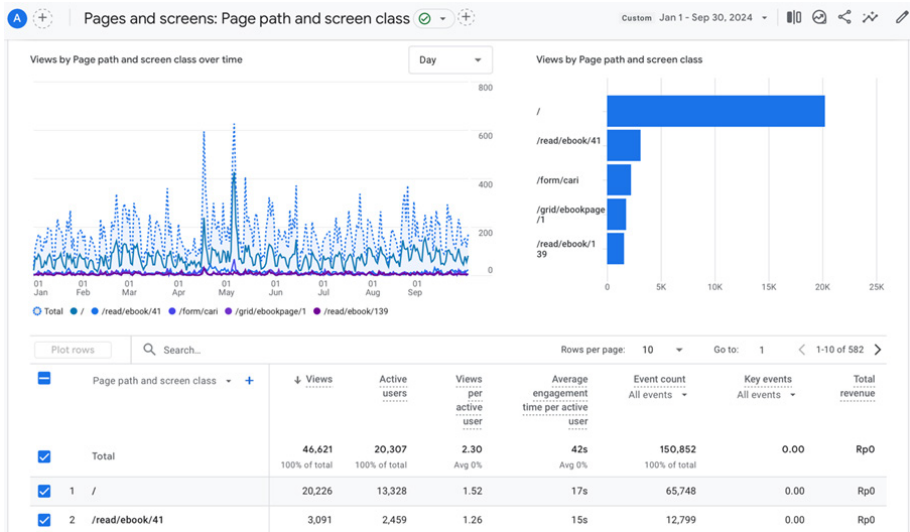
Triwulan I (Januari – Maret)



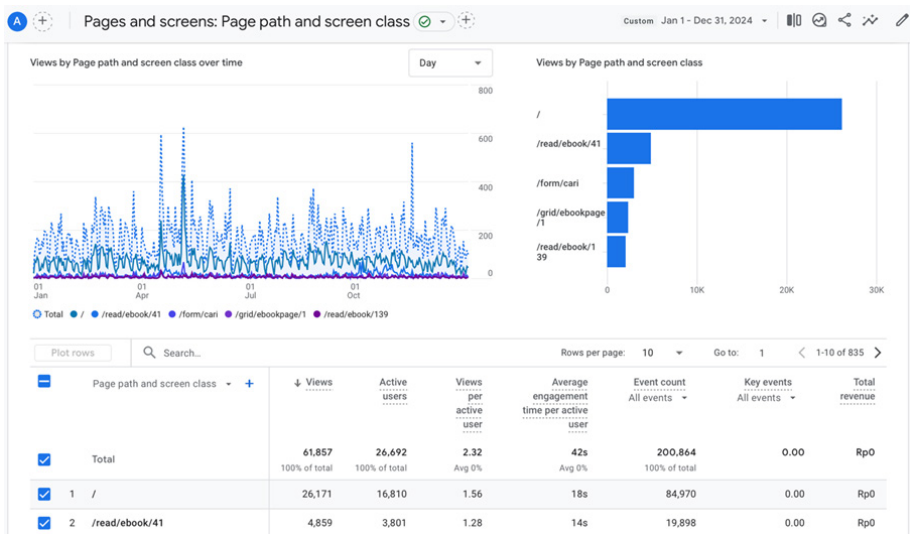
Triwulan II (April – Juni)



Triwulan III (Juli – September)



Triwulan IV (Oktober – Desember)



Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan oleh peningkatan aplikasi perpustakaan serta semakin beragamnya informasi yang tersedia dan akan terus dilakukan peningkatan secara berkala dan berkesinambungan. Sebagai upaya yang

dilakukan Perpustakaan Mahkamah Agung untuk meningkatkan capaian kinerja ini adalah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan digital dalam hal ini adalah melakukan penambahan koleksi digital yang berasal dari penerbitan umum karena saat ini

koleksi digital masih terbatas pada koleksi terbitan Mahkamah Agung. Program atau kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah dengan promosi perpustakaan kepada masyarakat

melalui pameran perpustakaan, pemberian souvenir, serta penyebaran informasi bahan koleksi dan layanan yang tersedia kepada masyarakat melalui media sosial.

Sasaran 4 - Indikator kinerja ke-4

Persentase Pengadilan yang Mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengamanatkan bahwa salah satu arah kebijakan pembangunan hukum dan HAM dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas adalah mendorong keterpaduan sistem peradilan pidana yang diimplementasikan melalui pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman dan lembaga penegak hukum yang juga berperan dalam pertukaran data secara terpadu melalui SPPT-TI.

Indikator ini untuk mengukur jumlah Satker Pengadilan yang telah berhasil melakukan pertukaran data sesuai dengan pedoman pertukaran data dalam rangka pelaksanaan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi Informasi.

Formulasi realisasi yang dipergunakan untuk mengukur kinerja ini adalah jumlah satker Pengadilan yang telah melakukan pertukaran data SPPT TI, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2024 sejumlah 405 Satker Pengadilan yang terdiri dari 405 Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama.

Tabel 3.59

Persentase Pengadilan yang Mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Pengadilan yang Mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	100%	100%	100	100	100	100	100

Sebagai upaya yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas untuk mencapai target kinerja dalam pemanfaatan dan pertukaran ini adalah melakukan koordinasi dengan

para Aparat Penegak Hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham melalui Ditjen PAS, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sedangkan dari sisi kebijakan dan hal-hal di luar kegiatan pertukaran data,

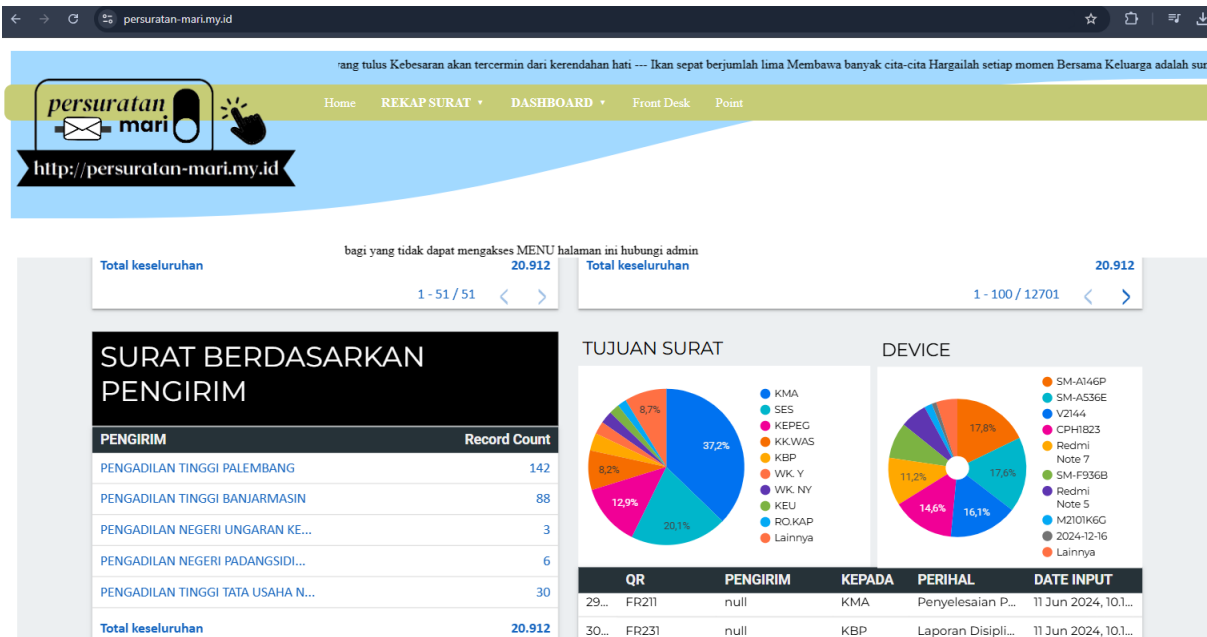
Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Republik Indonesia. Dan dari sisi penerapan teknologi informasi pada sistem SPPT-TI, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas secara berkala melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKomInfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN-RI).

Sasaran 4 - Indikator Kinerja ke-5
Persentase Penyelesaian Distribusi Surat

Salah satu tugas Bagian Tata Usaha Mahkamah Agung adalah melaksanakan urusan tata usaha di lingkungan Mahkamah Agung, salah satu fungsinya adalah pelaksanaan urusan surat menyurat. Semua urusan surat masuk di Mahkamah Agung melalui Bagian Tata Usaha, pengelolaan surat masuk yang pada awalnya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi

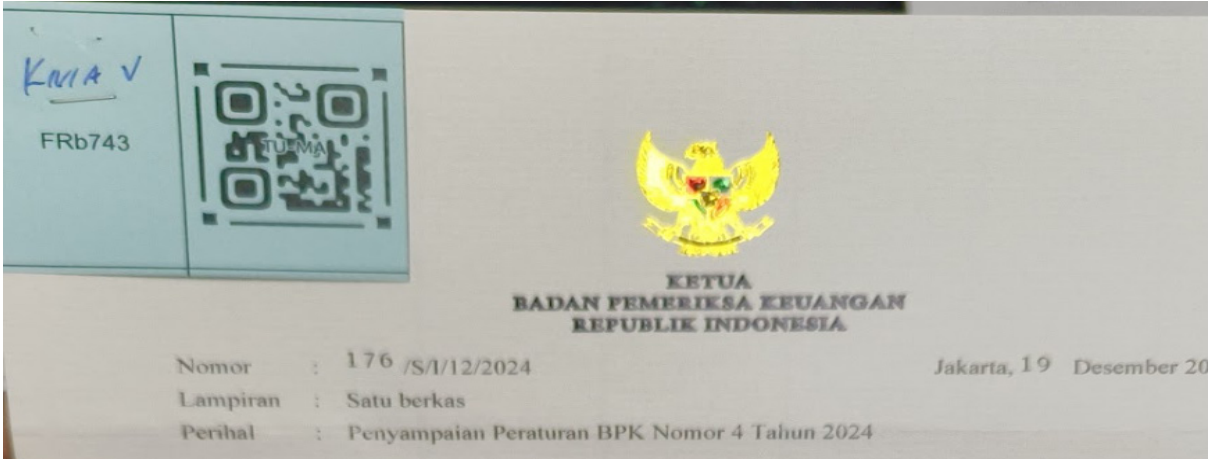
Persuratan Mahkamah Agung (SIPMA) sekarang dikarenakan aplikasi SIPMA sudah tidak dapat digunakan, sembari menunggu perbaikan/ update dari aplikasi SIPMA, maka dibuatlah aplikasi bantu untuk mencatat surat berupa aplikasi berbasis website dengan alamat <https://persuratan-mari.my.id> (masih dalam tahap pengembangan).



Gambar 3.3 Aplikasi Persuratan MARI

Website digunakan untuk mencatat surat-surat dinas, surat laporan bulanan, surat pribadi, surat rahasia, surat dari pencari keadilan, surat yang berkaitan dengan teknis perkara (surat ditujukan kepada kepaniteraan). Surat - surat tersebut dicatat oleh Sub Bagian Persuratan dengan menggunakan kode QR (*Quick*

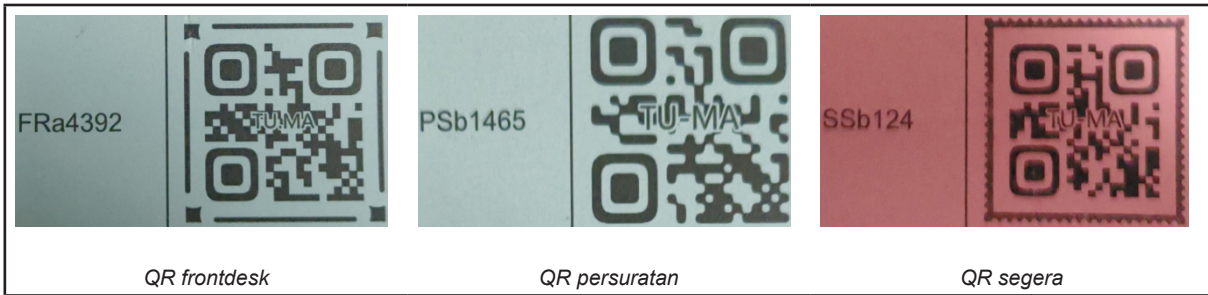
Response Code) yang dicantumkan di pojok kiri surat yang digunakan untuk penelusuran surat. QR tersebut dibubuhi keterangan tujuan serta agenda wilayah oleh pengarah surat. Penggunaan kode QR dimaksudkan untuk memudahkan dalam penatausahaan surat.



Gambar 3.4 Letak Quick Response Code (Kode QR)

Kode QR surat yang digunakan ada tiga jenis, QR surat dengan kode awalan FRXXXXXX disebut juga QR frontdesk diperuntukan untuk surat – surat yang diterima oleh Frontdesk meja informasi di bagian penerima tamu, QR surat dengan kode awalan PSXXXXXX disebut juga QR persuratan digunakan untuk

surat – surat yang berasal dari PO.BOX 1020 kantor Pos Indonesia, sedangkan QR surat berwarna Merah Muda dengan kode awalan SSXXXXXX disebut juga QR segera digunakan untuk surat berkategori segera, maupun untuk surat rahasia.



Gambar 3.5 Tiga jenis Kode QR

Kegiatan Penerimaan surat dilakukan di Sub Bagian Persuratan, sedangkan penomoran agenda, cetak Lembar Disposisi dan distribusi surat dilaksanakan oleh Sub Bagian Agenda dan Pengiriman.

Surat masuk di klasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu surat dinas, surat pribadi dan surat berbentuk laporan kemudian dikelompokan dalam 6 wilayah agenda yaitu wilayah agenda I Pengadilan Tingkat Banding sewilayah Sumatera, wilayah agenda II Pengadilan Tingkat Banding sewilayah Jawa, wilayah agenda III Pengadilan Tingkat Banding yang ada di Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, wilayah agenda IV Pengadilan Tingkat Banding yang ada di Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, wilayah agenda V surat dinas dari Kementerian/Lembaga, wilayah agenda VI surat rahasia.

Tabel 3.60
Rekapitulasi Berdasarkan Jenis Surat

BULAN JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
	SURAT DINAS	3333	3253	2072	1942	3399	2842	3491	3285	2645	3021	2687	2180
SURAT LAPORAN	748	525	315	90	146	345	68	148	120	90	99	77	2771
SURAT PRIBADI	149	127	146	84	224	118	250	240	150	279	223	130	2120
TOTAL	4230	3905	2533	2116	3769	3305	3809	3673	2915	3390	3009	2387	39041

Selanjutnya setelah diklasifikasikan kedalam tiga jenis surat, maka tahapan administrasi surat berikutnya yaitu mengelompokkan surat ke dalam 6 wilayah agenda. Berikut disampaikan data rekapitulasi surat dinas dalam wilayah agenda berjumlah paling banyak terdapat di wilayah agenda II sebanyak 11.186 surat, dengan surat paling banyak ada di bulan Juli sebanyak 1.323 surat dan paling sedikit di bulan April sebanyak 591 surat, sedangkan surat dinas berjumlah paling sedikit ada pada wilayah agenda VI

Rekapitulasi total surat yang masuk pada Tahun 2024 sebanyak 39.041 surat. terdiri dari 34.150 surat dinas yang mengalami jumlah tertinggi dibulan Juli sebanyak 3.491 dan jumlah surat paling sedikit dibulan April sebanyak 1.942, kemudian surat berbentuk Laporan sebanyak 2.771 surat yang mengalami kenaikan jumlah surat pada bulan Januari sebanyak 748 surat dan paling sedikit dibulan Juli sebanyak 68 surat, lalu surat Pribadi sebanyak 2.120 dengan jumlah paling banyak dibulan Oktober sebanyak 279 surat dan paling sedikit dibulan April sebanyak 84 surat sebagaimana ditampilkan dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 3.61
Rekapitulasi Surat Dinas Berdasarkan Wilayah Agenda

BULAN WILAYAH	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
AGENDA I	707	531	431	471	691	630	702	690	590	693	769	439	7344
AGENDA II	816	813	693	561	1149	928	1285	813	1021	921	783	697	10480
AGENDA III	343	267	234	200	343	280	405	338	338	375	293	284	3700
AGENDA IV	432	308	263	283	436	316	453	372	308	302	393	307	4173
AGENDA V	1007	1287	402	404	741	655	602	1032	339	686	417	421	7993
AGENDA VI	28	47	49	23	39	33	44	40	49	44	32	32	460
TOTAL	3333	3253	2072	1942	3399	2842	3491	3285	2645	3021	2687	2180	34150

Rekapitulasi surat berbentuk Laporan dalam wilayah agenda berjumlah paling banyak terdapat di wilayah agenda I sebanyak 825 surat, dengan jumlah terbanyak di bulan Januari sebanyak 240 surat dan paling sedikit di bulan Desember sebanyak 15 surat, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3.62
Rekapitulasi Surat berbentuk Laporan Bulanan berdasarkan Wilayah Agenda

BULAN WILAYAH	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
	AGENDA I	240	120	120	30	30	90	0	60	45	30	45	15
AGENDA II	180	150	105	30	41	30	38	44	8	36	15	29	706
AGENDA III	225	135	30	15	30	105	15	44	31	24	39	15	708
AGENDA IV	103	120	60	15	45	120	15	0	36	0	0	18	532
AGENDA V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGENDA VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	748	525	315	90	146	345	68	148	120	90	99	77	2771

Distribusi surat dilakukan oleh Sub Bagian Agenda dan Pengiriman setelah Lembar Disposisi surat serta lembar tanda terima dicetak sesuai dengan wilayah agenda. Tanda terima sebagai bukti, bahwa surat telah terdistribusi. Beberapa surat keluar dari Biro Umum yang ditujukan kepada Instansi luar (kepada ANRI) ada yang sudah menggunakan SRIKANDI dari ANRI sebagai syarat penerapan kearsipan digital menggunakan aplikasi SRIKANDI.

Indikator persentase penyelesaian distribusi surat digunakan untuk mengukur seberapa besar surat dapat didistribusikan dengan baik, membandingkan antara jumlah surat yang telah didistribusikan dengan jumlah surat yang masuk.

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 100% dengan perbandingan capaian tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.63
Persentase Penyelesaian Distribusi Surat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Penyelesaian Distribusi Surat	100%	100%	100	100	100	125	125

Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%, terealisasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Penggunaan kode QR surat membantu memudahkan dalam proses penatausahaan surat, dalam rencana pengembangan website persuratan ke depan diharapkan QR surat sudah dapat

terintegrasi dengan kegiatan pengagendaan dan pendistribusian surat yang mana pada saat ini masih menggunakan sistem manual yaitu agendaris mencatatkan agenda surat ke dalam komputer masing-masing yang dapat dipergunakan untuk mencari data surat maupun agenda surat dimaksud.

Sasaran 4 - Indikator Kinerja ke-6

Persentase Tindaklanjut Surat pada Kesekretariatan Pimpinan dengan Tepat Waktu

Indikator ini untuk mengukur kinerja administrasi persuratan dalam konteks memproses semua surat yang berasal dari pengirim atau unit pengaju dan diterima masing sub bagian kesekretariatan pimpinan. Yang dimaksud surat ditindaklanjuti tepat waktu pada indikator ini adalah:

Surat yg diterima dari pengirim atau unit pengaju pada jam kerja dan ditindaklanjuti (diteruskan ke pimpinan, dikoreksi dan dikembalikan ke pengaju atau diarsipkan) di hari kerja yg sama.

Surat yg sudah ditandatangani atau disposisi

oleh pimpinan dan diterima sekretariat di jam kerja, kemudian distribusi di hari kerja yang sama.

Secara singkat kinerja yang diukur adalah yang secara penuh kendalinya ada di Biro Sekretariat Pimpinan dalam hal ini sub bagian kesekretariatan masing-masing pimpinan. Formulasi perhitungan yang dipergunakan untuk mengukur realisasi indikator ini adalah:

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan perbandingan capaian tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.64
Persentase Tindaklanjut Surat pada Kesekretariatan Pimpinan dengan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Persentase Tindaklanjut Surat pada Kesekretariatan Pimpinan dengan Tepat Waktu	100%	100%	100	100	100	100	100

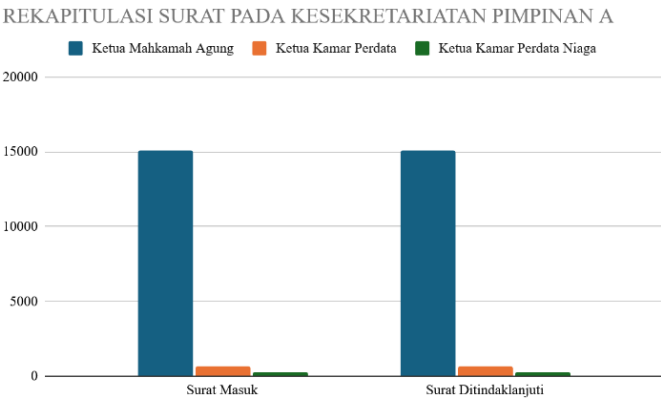
Keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi. Penggunaan aplikasi persuratan telah dimanfaatkan dengan optimal untuk mendukung pencapaian kinerja. Aplikasi telah membantu mengatasi permasalahan efisiensi pola komunikasi dan koordinasi akibat dari area kerja masing-masing sekretariat pimpinan yang terpisah dan

mendukung dalam penyesuaian bisnis proses sehingga dapat memenuhi kebutuhan kerja pimpinan. Selain itu dengan adanya penambahan jumlah SDM pada beberapa sub bagian sekretariat pimpinan juga mendukung kecepatan dalam penanganan surat. Berikut ini data rekapitulasi persuratan pada masing-masing sekretariat pimpinan:

REKAPITULASI SURAT PADA BAGIAN KESEKRETARIATAN PIMPINAN A

Tabel 3.65
Rekapitulasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan A

NO	SUB BAGIAN	Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan A	Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu pada Kesekretariatan Pimpinan A
1.	Ketua Mahkamah Agung	15.064	15.064
2.	Ketua Kamar Perdata	648	648
3.	Ketua Kamar Perdata Khusus	280	280



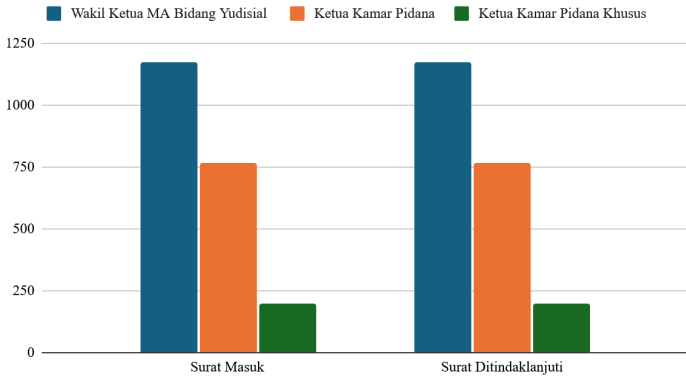
REKAPITULASI SURAT PADA BAGIAN KESEKRETARIATAN PIMPINAN B

Tabel 3.66

Tabel Rekapitulasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan B

NO	SUB BAGIAN	Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan B	Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat waktu pada Kesekretariatan Pimpinan B
1.	Wakil Ketua Bidang Yudisial	1.171	1.171
2.	Ketua Kamar Pidana	765	765
3.	Ketua Kamar Pidana Khusus	199	199

REKAPITULASI SURAT PADA KESEKRETARIATAN PIMPINAN B



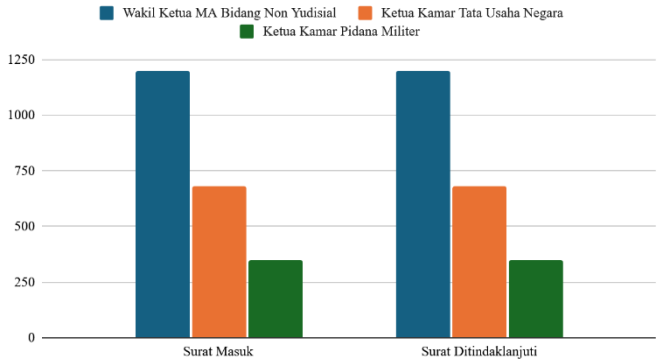
REKAPITULASI SURAT PADA BAGIAN KESEKRETARIATAN PIMPINAN C

Tabel 3.67

Rekapitulasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan C

NO	SUB BAGIAN	Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan C	Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat waktu pada Kesekretariatan Pimpinan C
1.	Wakil Ketua Bidang Non Yudisial	1198	1198
2.	Ketua Kamar Tun	680	680
3.	Ketua Kamar Pidana Militer	362	362

REKAPITULASI SURAT PADA KESEKRETARIATAN PIMPINAN C



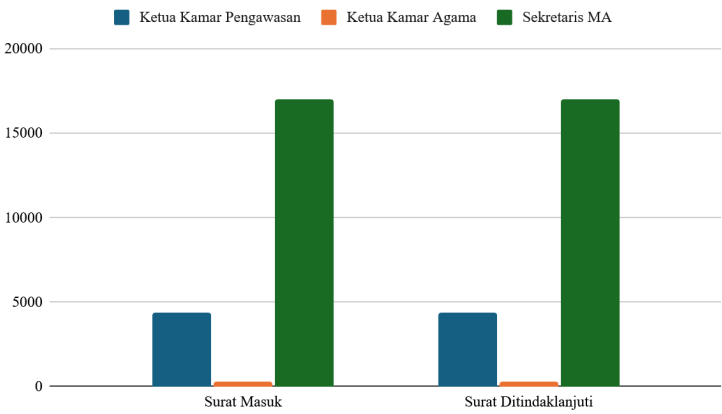
REKAPITULASI SURAT PADA BAGIAN KESEKRETARIATAN PIMPINAN D

Tabel 3.68

Klasifikasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan D

NO	SUB BAGIAN	Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan D	Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat waktu pada Kesekretariatan Pimpinan D
1.	Ketua Kamar Pengawasan	4322	4322
2.	Ketua Kamar Agama	312	312
3.	Sekretaris MA	17.018	17.018

REKAPITULASI SURAT PADA KESEKRETARIATAN PIMPINAN D

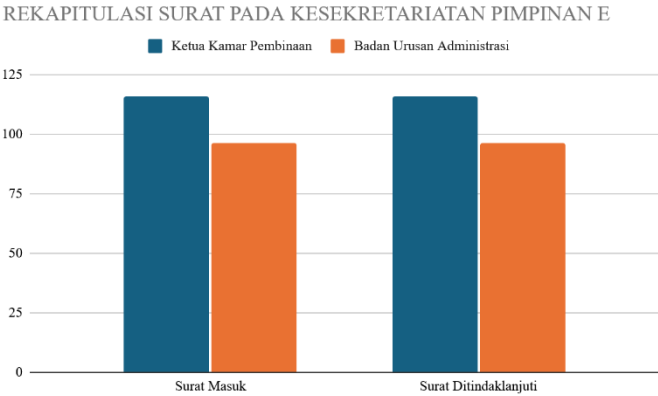


REKAPITULASI SURAT PADA BAGIAN KESEKRETARIATAN PIMPINAN E

Tabel 3.69

Klasifikasi Surat pada Kesekretariatan Pimpinan E

NO	SUB BAGIAN	Jumlah Surat Masuk pada	Jumlah Surat yang
		Kesekretariatan Pimpinan E	Ditindaklanjuti Tepat Waktu pada Kesekretariatan Pimpinan E
1.	Ketua Kamar Pembinaan	116	116
2.	Kesekretariatan BUA	96	96



Sasaran 4 - Indikator kinerja ke-7

Jumlah Dukungan Keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung

Indikator ini untuk mengukur jumlah kegiatan keprotokolan dan pengamanan pimpinan Mahkamah Agung yang sumber datanya berasal dari surat tugas, undangan, surat korespondensi, dan laporan kegiatan. Target

yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 160 kegiatan dengan perbandingan capaian tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.70

Jumlah Dukungan Keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah Dukungan Keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung	160 Kegiatan	162 Kegiatan	101,25	116,25	158,67	-	-

Secara umum, Biro Umum sebagai petugas Keprotokolan dan Keamanan telah melakukan 162 kegiatan. yang terdiri dari kegiatan Pelayanan Pimpinan, Pengamanan Unjuk Rasa, Protokoler dan Keamanan

Pimpinan. Dari Pelaksanaan Indikator Kinerja ini dilaksanakan melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga capaiannya sebesar 101%

Tabel 3.71

Jumlah Dukungan Keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Kegiatan
1.	Januari	11
2.	Februari	12
3.	Maret	15
4.	April	8
5.	Mei	15
6.	Juni	20
7.	Juli	13
8.	Agustus	13
9.	September	15
10.	Oktober	17
11.	November	15
12.	Desember	8
Total Kegiatan		162

Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Umum sebagai pendukung kegiatan Keprotokolan dan Keamanan juga melakukan pembinaan ke beberapa daerah dengan membuat survei kuesioner di setiap kegiatannya, untuk menilai pelayanan yang telah dilaksanakan oleh keprotokolan dan keamanan Mahkamah Agung. Dari hasil survei tersebut kita mendapatkan hasil kepuasan dengan sangat baik dalam memberikan pelayanan keprotokolan mahkamah agung.

Adapun beberapa indikator keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan diterapkan oleh keprotokolan dan keamanan terdiri dari beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu:

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan mengacu kepada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan pada setiap acara kunjungan pimpinan pusat ke daerah;
2. Petugas/staf Protokol Mahkamah Agung yang berkompeten; dan
3. Koordinasi dengan instansi terkait setiap kegiatan pelayanan pimpinan pusat kunjungan ke daerah.

Dalam hal menunjang pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan keamanan masih terdapat kekurangan dalam kegiatan pelayanan pimpinan pusat kunjungan ke daerah yaitu:

1. Pemahaman pejabat daerah terhadap pimpinan pusat sesuai dengan

- kedudukan jabatan, misal; tata tempat, tata upacara dan tata kehormatan

2. Kurangnya pelatihan khusus dari Satuan Kerja Pusat, Daerah maupun dari instansi/ Lembaga lain tentang keprotokolan bagi pegawai yang telah dikader untuk menjadi petugas protokol yaitu dengan melakukan pemetaan pegawai yang
- memiliki kompetensi dan/atau potensi kompetensi keprotokolan untuk dapat direkrut menjadi tim petugas protokol di daerah; dan

3. Perlunya menyusun Buku Pedoman tentang Keprotokolan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Sasaran 4 - Indikator kinerja ke-8

Jumlah Dukungan Layanan Kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung

Indikator ini untuk mengukur Jumlah Dukungan Layanan Kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung yang sumber datanya berasal dari data kunjungan pasien di Klinik Pratama Mahkamah Agung

dan Klinik Pratama Sekretariat Mahkamah Agung. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 11.000 orang sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.72

Jumlah Dukungan Layanan Kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah Dukungan Layanan Kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung	11.000 Orang	11.884 Orang	108,04	241,42	191,27	-	-

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terdapat penurunan pada indikator ini dikarenakan adanya revisi target pada tahun 2024. Target pada tahun 2022 – 2023 sebesar 4.800 orang, namun dikarenakan capaian yang terlampau tinggi selama 2 tahun tersebut, sehingga direvisi pada tahun 2024 menjadi 11.000 orang. Pelaksanaan layanan kesehatan di Klinik Pratama Mahkamah Agung

telah menggunakan aplikasi sehingga mempermudah dalam memberikan pelayanan serta mempermudah dalam menganggarkan kebutuhan obat-obatan dan membantu mempercepat pelaksanaan kegiatan pada Klinik Pratama Mahkamah Agung.

Sasaran 4 - Indikator kinerja ke-9

Jumlah Laporan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Mahkamah Agung, diperlukan dukungan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang memadai. Pengelolaan sarana dan prasarana penting dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan dengan baik dan maksimal. Ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana di Mahkamah Agung meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pemanfaatan, inventarisasi, dan penghapusan. Sarana dan Prasarana di Mahkamah Agung yang dikelola dengan

baik, dapat diukur dengan indikator jumlah dokumen pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Untuk memastikan capaian kinerja pada Biro Umum akurat, andal, dan berkualitas, Biro Umum melakukan reviu atas Indikator Kinerja dan target capaian pada tahun 2024. dengan adanya reviu tersebut, diharapkan capaian kinerja Biro Umum dalam bidang pengelolaan sarana dan prasarana dapat terukur secara tepat dan reliabel.

Tabel 3.73

Reviu Indikator Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target 2024	Penjelasan
Jumlah Dokumen Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-	-	146 Dokumen	Target tahun 2024 dihitung berdasarkan dokumen kegiatan
Sebelumnya					
Jumlah Laporan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung	291	476 Laporan	163.57%	-	-

Untuk mengukur capaian kinerja pada indikator ini sumber data yang digunakan berasal dari dokumen pengadaan barang/ jasa, pemeliharaan/perawatan, dan penatausahaan BMN. Pengelolaan sarana dan prasarana di Mahkamah Agung yang

telah dilaksanakan Biro Umum mencakup kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan dan perawatan, serta penatausahaan BMN dengan rincian realisasi kegiatan sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.74
Realisasi Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

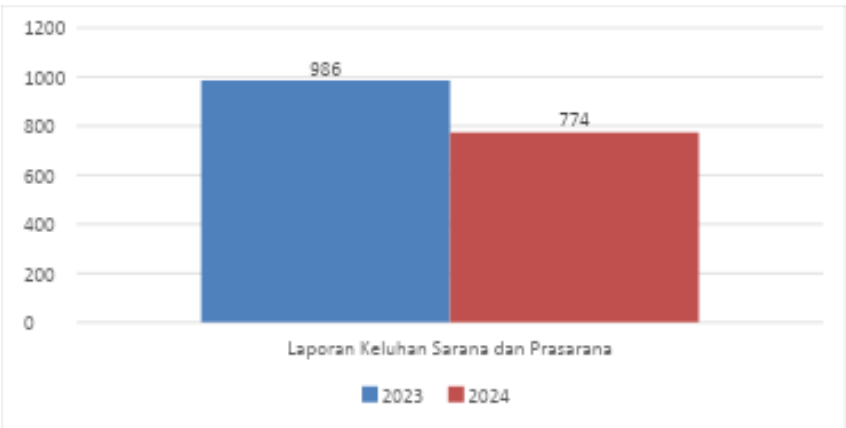
Kegiatan	Realisasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana	40 Kegiatan
Pemeliharaan dan Perawatan	149 Kegiatan
Penatausahaan BMN	17 Kegiatan
Jumlah	206 Kegiatan

Target kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2024 adalah sebesar 146 dokumen pengelolaan sarana dan prasarana dan telah terealisasi sebesar 206 dokumen (141,10%) sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.75
Jumlah Laporan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah Laporan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung	146 Laporan	206 Laporan	141,10	163,57	107,22	-	-

Capaian pada indikator kinerja sebesar 141,10% ini menunjukkan bahwa Biro Umum memiliki komitmen yang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan sarana dan prasarana dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh aparaturnya di lingkungan Mahkamah Agung. Disamping itu, pada tahun 2024 terdapat penurunan tingkat keluhan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kantor dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini.



Gambar 3.6 Jumlah Laporan Keluhan Penggunaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2023-2024

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung secara umum merasa puas atas penggunaan sarana dan prasarana

yang ada. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja Biro Umum dalam mengelola sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

B. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja pada Badan Urusan Administrasi telah dievaluasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Nomor Kepala Badan Pengawasan Nomor 1186/BP/PW1.1.1/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Badan Urusan Administrasi. Evaluasi tersebut dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang

meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja.
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Badan Urusan Administrasi memperoleh nilai sebesar 79,70 dengan predikat BB (Sangat Baik) pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.75
Nilai Laporan Hasil Evaluasi AKIP BUA 2020 & 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,10	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	23,40
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			79,10	79,70
			BB (SANGAT BAIK)	BB (SANGAT BAIK)

Hasil evaluasi tersebut menunjukan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja pada Badan Urusan Administrasi pada Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke Unit Eseon III. Namun demikian, terdapat

beberapa hal yang direkomendasikan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan telah ditindaklanjuti oleh Badan Urusan Administrasi sebagai berikut:

Revisi Rencana Aksi Tahun 2024 dengan menguraikan aksi-aksi yang menunjang masing-masing indikator kinerja untuk menggambarkan kontribusinya dalam mencapai indikator kinerja yang diperjanjikan.

Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang menunjang tercapainya masing-masing indikator dengan menguraikan progress pelaksanaan, permasalahan dan tindak lanjutnya.

Menyusun Pohon Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 yang sudah disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung untuk menggambarkan kinerja Badan Urusan Administrasi yang selaras di setiap level organisasi secara berjenjang.

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan

Urusan Administrasi Tahun 2024 tanggal 25 November dengan agenda pembahasan salah satunya adalah penyesuaian target kinerja yang tidak *achievable* ataupun target kinerja yang ekstrim.

Revisi Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2024 berdasarkan hasil Rapat Koordinasi tersebut.

Tim Penyusun dan Pereviu Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi telah mengikuti Pelatihan SAKIP yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung Tahun 2024.

C. REALISASI ANGGARAN

Badan Urusan Administrasi pada tahun 2024 mendapatkan anggaran sebesar Rp3,698,950,937,000,00 (tiga triliun enam ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang kemudian didistribusikan kepada 7 (tujuh) Unit Eselon II di Lingkungan Badan Urusan Administrasi. Dari jumlah tersebut, terealisasi sebesar Rp3,550,913,279,523,00 (tiga triliun lima

ratus lima puluh miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) atau 96.03% sehingga sisa yang tidak terserap adalah Rp148.037.657.477,00 (serratus empat puluh delapan juta tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 3,97 %, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.76
Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi Tahun 2024

Kegiatan	Alokasi	Realisasi	Realisasi (%)
1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	60,173,951,000	58,946,304,274	98.15
1065 - Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	7,718,881,000	7,429,883,895	96.28
1066 - Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3,304,923,693,000	3,168,699,213,739	95.9

1067 - Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	13,962,927,000	12,592,382,723	90.72
1068 - Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	5,964,602,000	5,791,429,360	97.7
1069 - Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	23,681,438,000	22,630,024,025	95.56
1070 - Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung	220,108,186,000	219,911,872,772	99.91
1071 - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	62,417,259,000	54,912,168,735	87.98
TOTAL	3,698,950,937,0000	3,550,913,279,523	96.03

Sedangkan perbandingan capaian realisasi anggaran dari tahun 2020-2024, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.77
Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi Tahun 2020-2024

Tahun	Pagu	Realisasi	
		(Rp)	(%)
2020	2.964.740.024.000	2.722.211.061.725	91,82%
2021	2.837.768.339.000	2.800.005.698.206	98,67%
2022	3.476.457.303.000	3.426.842.510.044	98,57%
2023	3.650.528.048.000	3.513.620.437.834	96,25%
2024	3,698,950,937,0000	3,550,913,279,523	96,03%

Capaian realisasi anggaran tahun 2024 (96,03%) dibandingkan tahun 2023 (96,25 %) mengalami penurunan sebesar (0,22%), hal ini disebabkan oleh:

- 1. Rasio realisasi secara *year on year* mengalami penurunan sebesar 0,22%
- 2. Penurunan diikuti oleh beberapa kebijakan pada akhir tahun yaitu *self blocking* terkait penghematan belanja perjalanan dinas

Bab IV Penutup

Bab IV
Penutup

Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Kendala dan permasalahan terkait indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis hendaknya menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang dengan melibatkan seluruh Unit Eselon II Badan Urusan Administrasi melalui berbagai upaya kerjasama dan koordinasi yang lebih intensif.

Sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi Badan Urusan Administrasi dalam rangka mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang dievaluasi dan dianalisis dalam Laporan Kinerja ini, belum sepenuhnya dapat tercapai, hal ini dikarenakan adanya saling keterkaitan antara Unit Eselon II di bawah Badan Urusan Administrasi sehingga terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum maksimal.

Rata-rata capaian kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2024 sebesar 116,47%, lebih rendah dari rata-rata capaian kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 146,55%, dengan 4 (empat) sasaran kinerja dan 30 (tiga puluh) indikator Sasaran Strategis Badan Urusan Administrasi terdiri dari:

1. Mewujudkan Manajemen Sumber Daya Manusia yang Profesional dan

Berkesinambungan;

2. Meningkatnya Layanan Perencanaan, Keuangan dan BMN yang Akuntabel;
3. Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Baik;
4. Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan yang Prima.

Sasaran strategis dengan capaian yang terlampaui tinggi yaitu sasaran strategis “Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Baik” dengan capaian sebesar 125,35% yang disebabkan capaian indikator “Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun” terlampaui tinggi yaitu sebesar 171,43%. Sebanyak 6 (enam) indikator memperoleh capaian terlampaui tinggi dan capaian tertinggi diperoleh dari indikator “Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun” dengan realisasinya sebesar 12 regulasi (171,43%) dan indikator “Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media” dengan realisasi 1.471 Berita (183,88%). Di sisi lain, capaian terendah diperoleh dari Indikator “Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan” dengan capaian sebesar 83,81%.

Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp3,550,913,279,523,00 (tiga triliun lima ratus lima puluh miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) atau 96.03% dari pagu anggaran sebesar Rp3,698,950,937,000,00 (tiga triliun enam ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga sisa yang tidak

terserap adalah Rp148.037.657.477,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 3,97%.

Berdasarkan hasil capaian tersebut, Badan Urusan Administrasi akan menindaklanjuti indikator-indikator yang jauh melampaui

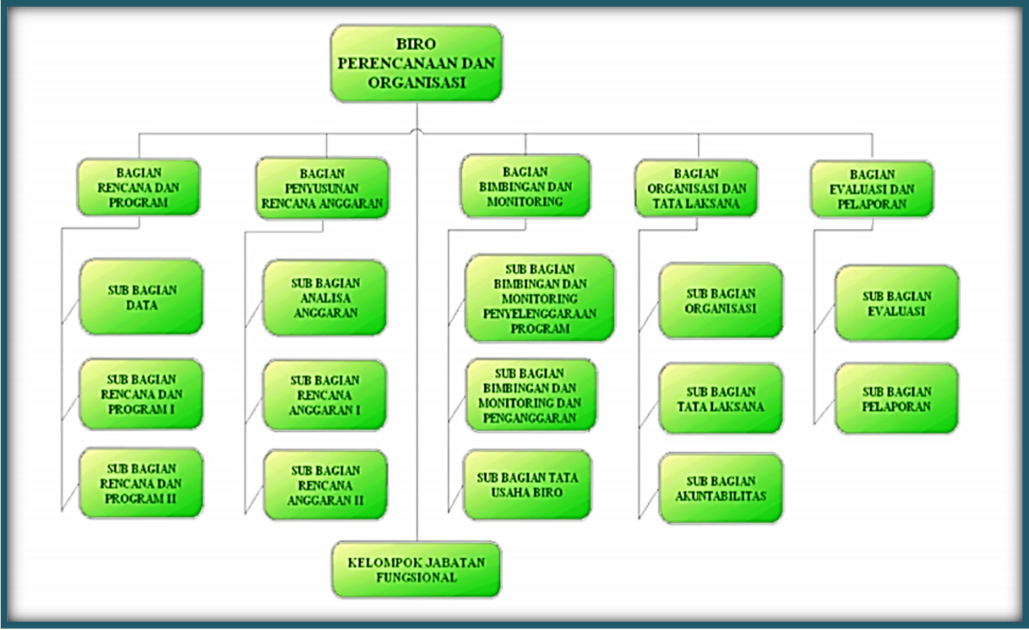
target tersebut dan/atau indikator yang capaiannya belum maksimal dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, dengan mereviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Badan Urusan Administrasi serta meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap Unit Eselon II pada Badan Urusan Administrasi.

LAMPIRAN

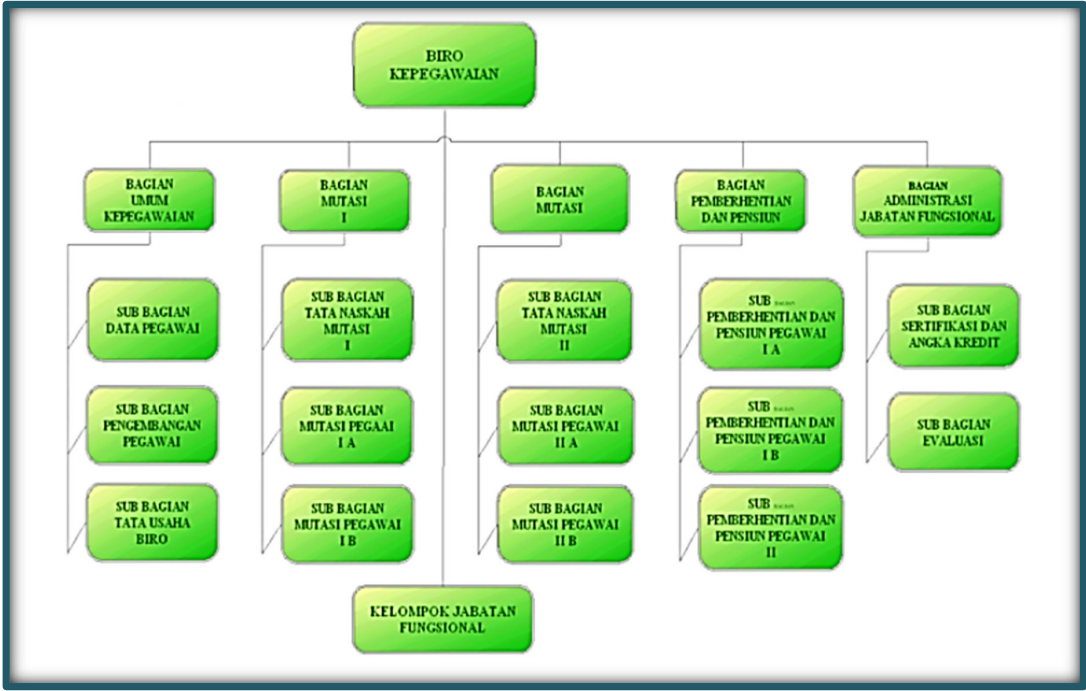
1. STRUKTUR ORGANISASI BADAN URUSAN ADMINISTRASI



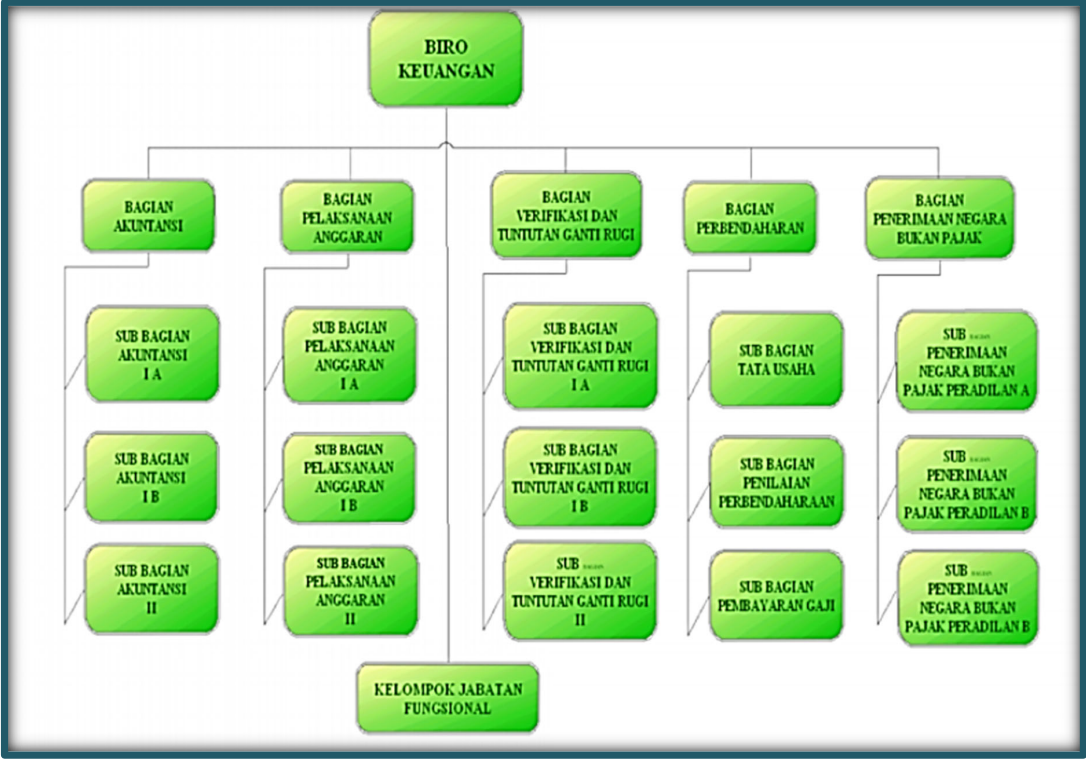
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI



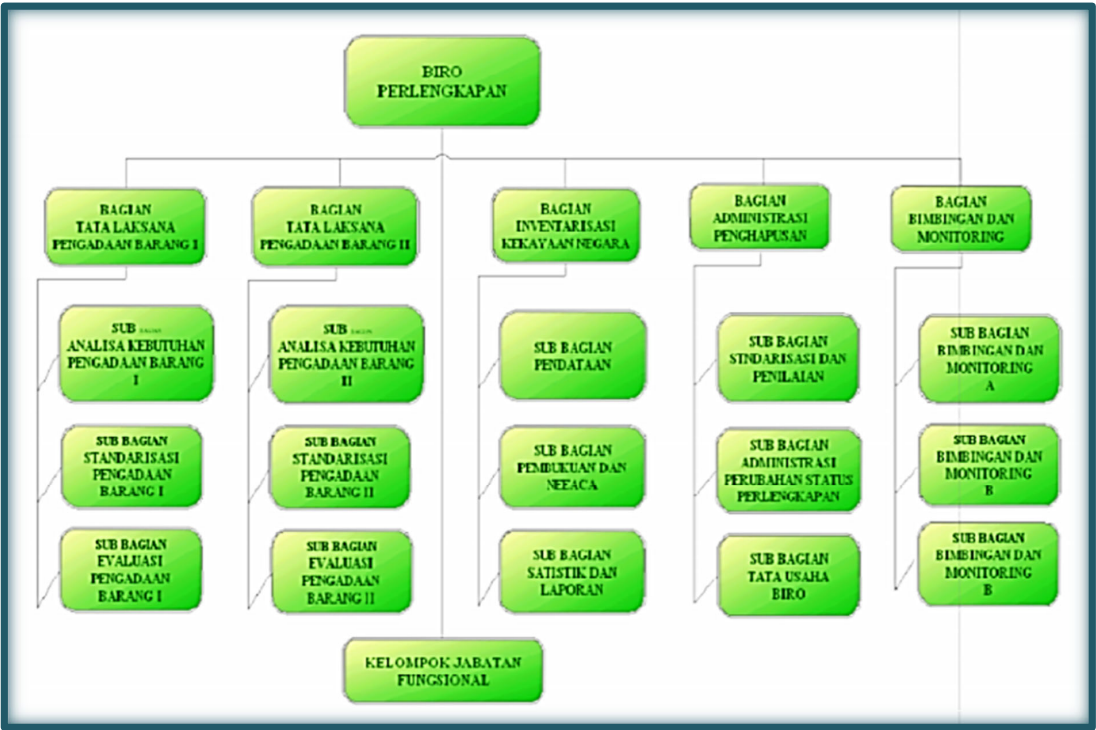
BIRO KEPEGAWAIAN



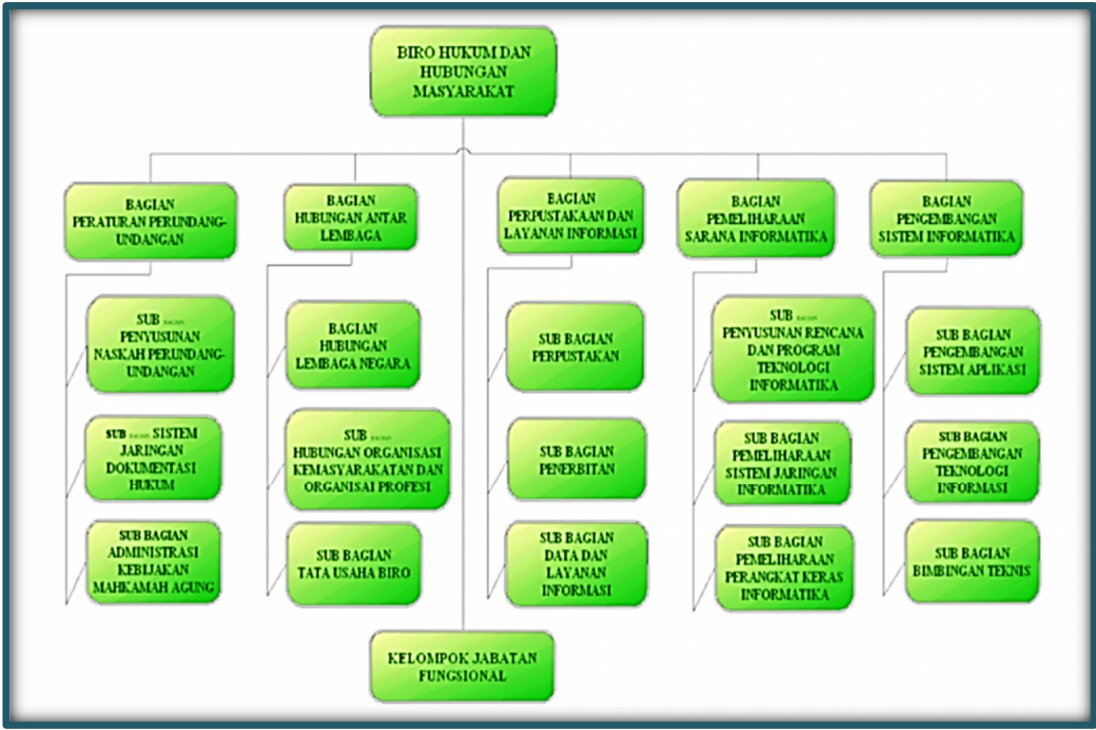
BIRO KEUANGAN



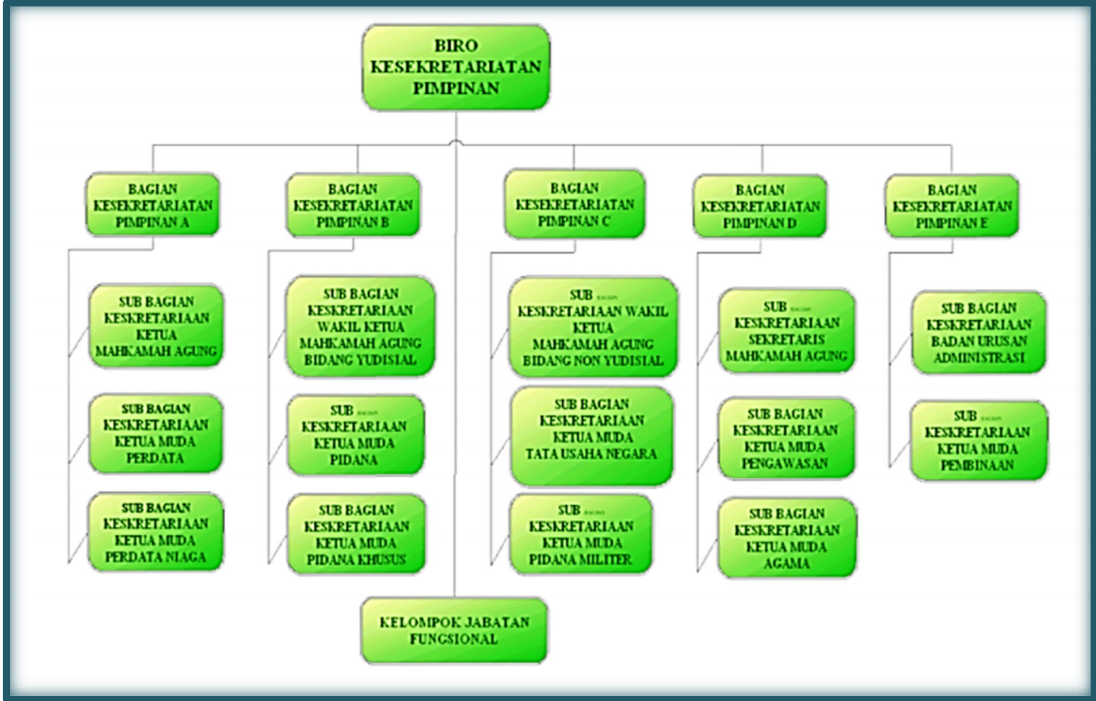
BIRO PERLENGKAPAN



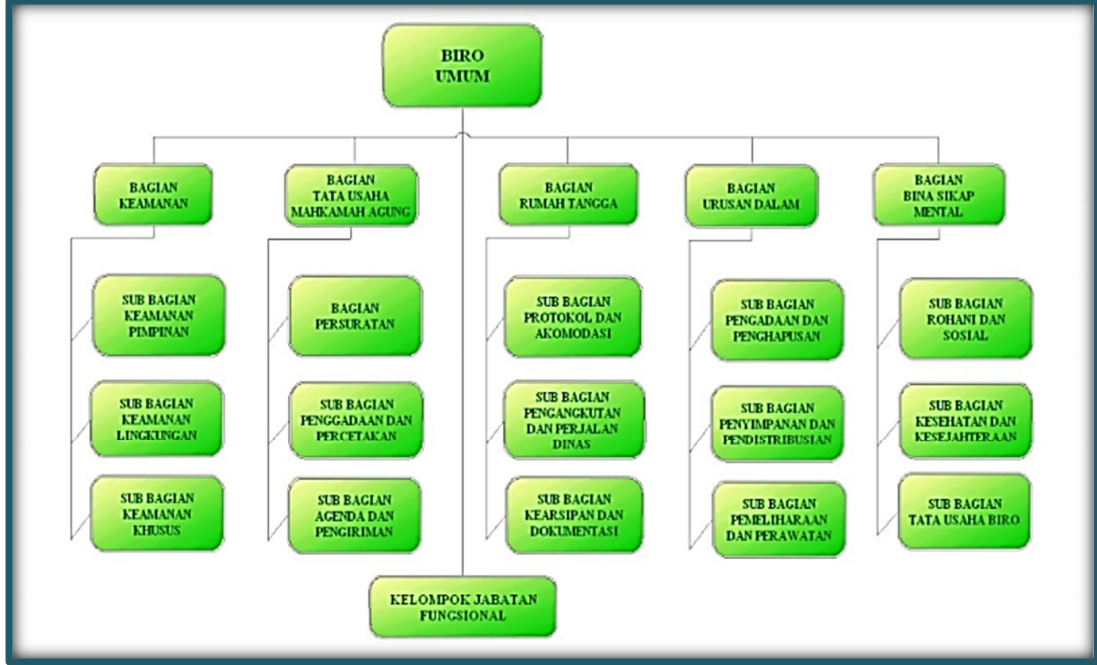
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN



BIRO UMUM



2. MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN 2020 – 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia profesional dan berkesinambungan	a. Persentase pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	100%	250%	250%	250%	250%	Biro Kepegawaian
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	90%	90%	90%	90%	90%	Biro Kepegawaian
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat otomatis dan pengusulan pensiun otomatis tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Kepegawaian
2.	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	a. Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	70%	70%	70%	70%	70%	Biro Perencanaan dan Organisasi
		b. Jumlah kesesuaian antara rencana kerja dengan RKAKL	910 Satker	910 Satker	910 Satker	910 Satker	910 Satker	Biro Perencanaan dan Organisasi
		c. Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	350 Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen	Biro Perencanaan dan Organisasi
		d. Opini WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Biro Keuangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
		e. Persentase penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara	93,13%	93,13%	93,13%	93,13%	93,13%	Biro Keuangan
		f. Persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak Mahkamah Agung	85,31%	85,31%	85,31%	85,31%	85,31%	Biro Keuangan
		g. Persentase realisasi anggaran belanja mahkamah Agung	99,51%	99,51%	99,51%	99,51%	99,51%	Biro Keuangan
		h. Persentase tanah/bangunan pinjam pakai yang sudah diselesaikan	10%	12%	14%	16%	18%	Biro Perlengkapan
		i. Jumlah usulan penghapusan BMN yang ditindaklanjuti tepat waktu	140 Usulan	150 Usulan	155 Usulan	160 Usulan	170 Usulan	Biro Perlengkapan
		j. Persentase nilai aset yang telah dilaksanakan Penetapan Status Pengguna (PSP)	60%	62%	65%	68%	70%	Biro Perlengkapan
		k. Persentase usulan RKBMN melalui aplikasi SIMAN yang disetujui	15%	17%	20%	24%	28%	Biro Perlengkapan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
3	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	5 Regulasi	5 Regulasi	5 Regulasi	5 Regulasi	5 Regulasi	Biro Perencanaan dan Organisasi
		b. Jumlah satker yang mendapatkan nilai LKjIP “BB”	592 Satker	592 Satker	592 Satker	592 Satker	592 Satker	Biro Perencanaan dan Organisasi
		c. Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan	60 Rancangan	72 Rancangan	84 Rancangan	95 Rancangan	110 Rancangan	Biro Hukum dan Humas
		d. Persentase gugatan kepada Mahkamah Agung yang telah diputus	12%	15%	18%	21%	25%	Biro Hukum dan Humas
		e. Persentase standarisasi layanan publik bagi instansi / lembaga publik	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Hukum dan Humas
4	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	a. Persentase pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi terintegrasi termasuk pilot Project SPPT (382 Satker)	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Hukum dan Humas
		b. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	20 Aplikasi	20 Aplikasi	20 Aplikasi	20 Aplikasi	20 Aplikasi	Biro Hukum dan Humas
		c. Jumlah kapasitas bandwith yang memadai	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	Biro Hukum dan Humas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
		d. Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	100 Berita	100 Berita	100 Berita	100 Berita	100 Berita	Biro Hukum dan Humas
		e. Jumlah Pengguna aplikasi e-library	11.000 Pengguna	11.000 Pengguna	12.000 Pengguna	12.000 Pengguna	12.000 Pengguna	Biro Hukum dan Humas
		f. Jumlah kerjasama antar instansi pemerintah / lembaga terakit	100 Kerjasama	100 Kerjasama	100 Kerjasama	100 Kerjasama	100 Kerjasama	Biro Hukum dan Humas
		g. Jumlah data layanan informasi hukum dan peradilan	1.500 Data	1.650 Data	1.820 Data	2.000 Data	2.000 Data	Biro Hukum dan Humas
		h. Jumlah layanan bantuan hukum internal Mahkamah Agung	8 Layanan	10 Layanan	12 Layanan	14 Layanan	17 Layanan	Biro Hukum dan Humas
		i. Persentase Pemenuhan data dan informasi bagi aparaturn penegak hukum dan pencari keadilan	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Hukum dan Humas
		j. Persentase penyelesaian distribusi surat	80%	83%	87%	91%	95%	Biro Umum
		k. Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Biro Perencanaan dan Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
		l. Persentase tidaklanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Kesekretariatan Pimpinan
		m. Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dngan mudah dan tepat waktu	80%	83%	87%	91%	95%	Biro Umum
		n. Persentase aspirasi pengunjung rasa yang tersalurkan	80%	83%	87%	91%	95%	Biro Umum

3. SK TIM PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2024 BADAN URUSAN ADMINISTASI



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 2/SEK/SK/1/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN 2024

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Mahkamah Agung yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

- MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN 2024.
- KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA

: Tim Penyusunan menjalankan tugas sesuai arahan Sekretaris Mahkamah Agung dan Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2/SEK/SK/1/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
TAHUN 2024

NO.	JABATAN	NAMA	
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Mahkamah Agung RI	
2.	Koordinator Validasi Data	Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Urusan Administrasi	
3.	Ketua	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	
4.	Sekretariat	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	
5.	Tim Penyusun Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan Kinerja dan Bab IV Penutup	Penanggung Jawab	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
		Ketua	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan
		Angota: Biro Perencanaan dan Organisasi	1. Kepala Bagian Rencana dan Program
			2. Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran
6.	Tim Penyusun Bab III Akuntabilitas Kinerja	Angota: Biro Perencanaan dan Organisasi	3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
			4. Kepala Sub Bagian Pelaporan
			5. Kepala Sub Bagian Evaluasi
			6. Rina Alprini (Perencana Ahli Muda)
7.			7. Achmad Sandy Persada (Pranata Komputer Ahli Pertama)
			8. Seluruh Pelaksana pada Bagian Evaluasi dan Pelaporan
8.			

			5. Kepala Sub Bagian Evaluasi 6. Rina Aprini (Perencana Ahli Muda) 7. Achmad Sandy Persada (Pranata Komputer Ahli Pertama)
	Penanggung Jawab		Kepala Biro Keuangan
	Ketua		Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran
	Angota: Biro Keuangan		1. Kepala Bagian PNB 2. Kepala Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi 3. Kepala Bagian Perbendaharaan 4. Kepala Bagian Akutansi
	Penanggung Jawab		Kepala Biro Kepegawaian
	Ketua		Kepala Bagian Umum
	Angota : Biro Kepegawaian		1. Kepala Bagian Mutasi I 2. Kepala Bagian Mutasi II 3. Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun 4. Kepala Bagian Administrasi Jabatan Fungsional
	Penanggung Jawab		Kepala Biro Hukum dan Humas
	Ketua		Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika
	Angota : Biro Hukum dan Humas		1. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga 2. Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi 3. Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika 4. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan
	Penanggung Jawab		Kepala Biro Perlengkapan
	Ketua		Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring

		Angota : Biro Perlengkapan	1. Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara 2. Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang I 3. Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang II 4. Kepala Bagian Administrasi Penghapusan
	Penanggung Jawab		Kepala Biro kesekretariatan Pimpinan
	Ketua		Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan E
	Angota: Biro Kesekretariatan Pimpinan		1. Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan A 2. Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan B 3. Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan C 4. Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan D
	Penanggung Jawab		Kepala Biro Umum
	Ketua		Kepala Bagian Urusan Dalam
	Angota : Biro Umum		1. Kepala Bagian Tata Usaha Mahkamah Agung 2. Kepala Bagian Bina Sikap Mental 3. Kepala Bagian Rumah Tangga 4. Kepala Bagian Keamanan
7.	Tim Pereviu Laporan Kinerja		1. El Damara (Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring) 2. Rustimah (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Organisasi) 3. Indah Wahyuni (Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring Penyelenggaraan Program)

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2/SEK/SK/1/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

TUGAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN 2024

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2024
2.	Koordinasi Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi c. Mengkordinasikan pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi kepada Tim Pereviu
4.	Sekretaris	a. Membantu pelaksanaan tugas penanggungjawab, Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja; b. Membantu Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja dalam berkoordinasi dengan seluruh Tim pada masing-masing Unit Eselon II; c. Sebagai koordinator dalam penyusunan teknis Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi.
5.	Tim Penyusun Laporan Kinerja	Mengukur capaian kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing indikator kinerja pengampu.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas Laporan Kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIYANTO

4. RENCANA KINERJA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan	1 Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	7 JPT
		2 Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	3.000 Pegawai
		3 Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	100%
		4 Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%
		5 Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70
2	Meningkatkan layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	1 Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam Pagu Indikatif	60
		2 Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKAKL	100%
		3 Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	360
		4 Opini WTP	WTP
		5 Persentase kerugian negara yang di kembalikan ke kas negara	100%
		6 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100%
		7 Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	89%
		8 Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan negara	100%
		9 Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	100%
		10 Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada	85%
		11 Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%
		12 Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA		TARGET
3	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1	Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	5 Regulasi
		2	Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “BB”	592 Satker
		3	Jumlah Perancangan dan Harmonisasi Kebijakan MA yang telah diselesaikan	72
		4	Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus	15%
4	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang prima	1	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi
		2	Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	230 Berita
		3	Jumlah pengguna aplikasi eLibrary	15.000
		4	Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	100%
		5	Persentase penyelesaian distribusi surat	100%
		6	Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan Pimpinan dengan tepat waktu	100%
		7	Jumlah dukungan keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung	160
		8	Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung	4.800
		9	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	301

5. REVISI RENCANA KINERJA BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Mewujudkan Manajemen Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berkesinambungan	1	Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	14.270 Orang
		2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	1.500 Orang
		3	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	99,6%
		4	Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%
		5	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70 Pegawai
2	Meningkatkan Layanan Perencanaan, Keuangan dan BMN yang Akuntabel	1	Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam Pagu Indikatif	70%
		2	Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKAKL	100%
		3	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	500 Dokumen
		4	Opini WTP	WTP
		5	Persentase kerugian negara yang di kembalikan ke kas negara	95%
		6	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100%
		7	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	95%
		8	Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan negara	80%

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		9	Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	100%
		10	Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada	85%
		11	Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%
		12	Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%
3	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1	Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	7 Regulasi
		2	Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “BB”	700 Satker
		3	Jumlah Perancangan dan Harmonisasi Kebijakan MA yang telah diselesaikan	35 Dokumen
		4	Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus	75%
4	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang prima	1	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi
		2	Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	800 Berita
		3	Jumlah pengguna aplikasi eLibary	10.000 Pengguna
		4	Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	100%
		5	Persentase penyelesaian distribusi surat	100%
		6	Persentase tindak lanjut pada surat	100%

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA		TARGET
			Kesekretariatan Pimpinan dengan tepat waktu	
		7	Jumlah dukungan keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung	160 Kegiatan
		8	Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung	11.000 Layanan
		9	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	146 Laporan

6. PERJANJIAN KINERJA BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Mewujudkan manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan	1	Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	7 JPT
		2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	3.000 Pegawai
		3	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	100%
		4	Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%
		5	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70
2	Meningkatkan layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	1	Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam Pagu Indikatif	60
		2	Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKAKL	100%
		3	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	360
		4	Opini WTP	WTP
		5	Persentase kerugian negara yang di kembalikan ke kas negara	100%
		6	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100%
		7	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	89%
		8	Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan negara	100%
		9	Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	100%
		10	Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada	85%
		11	Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%
		12	Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%
3	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1	Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	5 Regulasi
		2	Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “BB”	592 Satker

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		3	Jumlah Perancangan dan Harmonisasi Kebijakan MA yang telah diselesaikan	72
		4	Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus	15%
4	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang prima	1	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi
		2	Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	230 Berita
		3	Jumlah pengguna aplikasi eLibrary	15.000
		4	Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	100%
		5	Persentase penyelesaian distribusi surat	100%
		6	Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan Pimpinan dengan tepat waktu	100%
		7	Jumlah dukungan keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung	160
		8	Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung	4.800
		9	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	301

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN	
1	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Rp	9.742.839.761.000
2	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Rp	666.030.002.000
JUMLAH		Rp	10.408.869.763.000

7. REVISI PERJANJIAN KINERJA BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Mewujudkan Manajemen Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berkesinambungan	1	Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	14.270 Orang
		2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	1.500 Orang
		3	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	99,6%
		4	Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%
		5	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70 Pegawai
2	Meningkatkan Layanan Perencanaan, Keuangan dan BMN yang Akuntabel	1	Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam Pagu Indikatif	70%
		2	Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKAKL	100%
		3	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	500 Dokumen
		4	Opini WTP	WTP
		5	Persentase kerugian negara yang di kembalikan ke kas negara	95%
		6	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100%
		7	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	95%
		8	Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan	80%

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA		TARGET
			pertanggungjawaban keuangan negara	
		9	Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	100%
		10	Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada	85%
		11	Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%
		12	Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%
3	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1	Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	7 Regulasi
		2	Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “BB”	700 Satker
		3	Jumlah Perancangan dan Harmonisasi Kebijakan MA yang telah diselesaikan	35 Dokumen
		4	Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus	75%
4	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang prima	1	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi
		2	Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	800 Berita
		3	Jumlah pengguna aplikasi eLibary	10.000 Pengguna
		4	Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	100%

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		5	Persentase penyelesaian distribusi surat	100%
		6	Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan Pimpinan dengan tepat waktu	100%
		7	Jumlah dukungan keprotokolan dan Keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung	160 Kagiatan
		8	Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung	11.000 Layanan
		9	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	146 Laporan

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Rp 10.074.933.107.000
2	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Rp 1.067.012.524.000
JUMLAH		Rp 11.141.945.631.000

7. INVENTARISIR DATA KINERJA BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target	JANUARI		Unit Eselon II
					Realisasi	Capaian	
1	Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan	1	Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	14.270 Orang		0%	Biro Kepegawaian
		2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	1.500 Pegawai	5 Pegawai	0,33%	
		3	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	99,60%	100%	100,40%	
			Jumlah Data Pegawai yang Valid		31.995		
			Jumlah Seluruh Data Pegawai Mahkamah Agung		31.995		
		4	Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%	0	0	
			Jumlah Layanan Kepegawaian yang Tepat Waktu				
			Jumlah Layanan Kepegawaian				
		5	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70 Pegawai		0%	Biro Umum
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis I					20,15%
2	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	1	Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	70%	0	0	Biro Perencanaan dan Organisasi
			Jumlah usulan pagu indikatif				
			Jumlah usulan Rencana Kerja				
		2	Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dan RKA K/L	100%	0	0	
			Jumlah Program dan Kegiatan yang Tersusun dalam Aplikasi KRISNA				
			Jumlah Program dan kegiatan yang tersusun dalam aplikasi SAKTI				

		3	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	500 Dokumen		0%	Biro Keuangan
		4	Opini WTP	WTP	WTP	100%	
		5	Persentase kerugian Negara yang dikembalikan ke kas Negara	95,00%	99,80%	105,06%	
			Jumlah kerugian negara yang telah disetor ke kas negara		Rp29.844.408.037		
			Jumlah kerugian negara		Rp29.903.432.263		
		6	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100%	Rp9.032.992.356	10%	
			Jumlah realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung		9.032.992.356		
			Target PNPB MA		86.905.618.000		
		7	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	95%	5%	6%	
			Jumlah realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung		Rp646.079.926.044		
			Jumlah alokasi Anggaran		Rp11.924.242.498.000		
		8	Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan Negara	80%	0,00%	0,00%	
			Satker yang Sudah Patuh terhadap Regulasi				
			Jumlah Seluruh Satker				
		9	Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	100%	0%	0%	Biro Perlengkapan
			Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui				
			Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Diusulkan melalui RKBMN				
		10	Persentase sarana dan prasarana	85%	0	0	

			pengadilan sesuai standarisasi yang ada				
			Jumlah Pengadlan yang Telah Sesuai Standarisasi				
			Jumlah Seluruh Pengadilan				
		11	Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%	0	0	
			Jumlah Nilai Penatausahaan BMN yang Ditetapkan				
			Jumlah Nilai BMN Keseluruhan				
		12	Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%	0	0	
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan				
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Dlusulkan				
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II					
3	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1	Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	7 Regulasi		0%	Biro Perencanaan dan Organisasi
		2	Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "BB"	700 Satker		0%	
		3	Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan	35 Perancangan	4 Perancangan	11%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		4	Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus	75%	20%	27%	
			Jumlah Bantuan Hukum yang Telah Putus dalam 1 Tahun		1		
			Jumlah Bantuan Hukum yang Masuk dalam 1 Tahun		5		
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III					
4	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	1	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi	1 Aplikasi	10%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		2	Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	800 Berita	65 Berita	8%	

		3	Jumlah Pengguna Aplikasi e-Library	10.000 Pengguna	828 Pengguna	8%	
		4	Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	100%	100%	100%	
			Jumlah Realisasi Satuan Kerja		405		
			Jumlah Target Satuan Kerja		405		
		5	Persentase penyelesaian distribusi surat	100%	100%	100%	Biro Umum
			Jumlah surat yang telah didistribusikan		4.230		
			Jumlah surat yang masuk pada Tata Usaha		4.230		
		6	Persentase tindaklanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	Biro Sekretariat Pimpinan
			Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat waktu		3.464		
			Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan		3.464		
		7	Jumlah dukungan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Mahkamah Agung	160	11	7%	Biro Umum
		8	Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung	11.000	1238	11%	
		9	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	146 Laporan	2	1%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis IV					38,43%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target	FEBRUARI		Unit Eselon II
					Realisasi	Capaian	
1	Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan	1	Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	14.270 Orang		0%	Biro Kepegawaian
		2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	1.500 Pegawai	5 Pegawai	0%	
		3	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	99,60%	100%	100,40%	
			Jumlah Data Pegawai yang Valid		31.982		
			Jumlah Seluruh Data Pegawai Mahkamah Agung		31.982		
		4	Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%	0	0	
			Jumlah Layanan Kepegawaian yang Tepat Waktu				
			Jumlah Layanan Kepegawaian				
		5	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70 Pegawai		0%	Biro Umum
		Rata-Rata Capaian Sasaran Srategis I			20,15%		
2	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	1	Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	70%	0	0	Biro Perencanaan dan Organisasi
			Jumlah usulan pagu indikatif				
			Jumlah usulan Rencana Kerja				
		2	Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dan RKA K/L	100%	0	0	
			Jumlah Program dan Kegiatan yang Tersusun dalam Aplikasi KRISNA				
			Jumlah Program dan kegiatan yang tersusun dalam aplikasi SAKTI				
		3	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	500 Dokumen		0%	

		4	Opini WTP	WTP	WTP	100%	Biro Keuangan	
		5	Persentase kerugian Negara yang dikembalikan ke kas Negara	95,00%	99,80%	105,06%		
			Jumlah kerugian negara yang telah disetor ke kas negara		Rp29.846.608.037			
			Jumlah kerugian negara		Rp29.905.632.263			
		6	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100%	Rp8.180.644.560	20%		
			Jumlah realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung		17.213.636.916			
			Target PNPB MA		86.905.618.000			
		7	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	95%	13%	14%		
			Jumlah realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung		Rp1.547.697.703.852			
			Jumlah alokasi Anggaran		Rp11.924.242.498.000			
		8	Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan Negara	80%	20,00%	25,00%		
			Satker yang Sudah Patuh terhadap Regulasi					
			Jumlah Seluruh Satker					
		9	Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	100%	0%	0%	Biro Perlengkapan	
			Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui					
			Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Diusulkan melalui RKBMN					
		10	Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada	85%	0	0		
			Jumlah Pengadilan yang Telah Sesuai Standarisasi					

			Jumlah Seluruh Pengadilan					
		11	Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%	0	0		
			Jumlah Nilai Penatausahaan BMN yang Ditetapkan					
			Jumlah Nilai BMN Keseluruhan					
		12	Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%	0	0		
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan					
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Diusulkan					
		Rata-Rata Capaian Sasaran Srategis II				021,96%		
		3	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1	Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	7 Regulasi		0%
2	Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "BB"			700 Satker		0%		
3	Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijkan MA yang telah diselesaikan			35 Perancangan	7 Perancangan	20%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	
4	Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus			75%	33%	44%		
	Jumlah Bantuan Hukum yang Telah Putus dalam 1 Tahun				2			
	Jumlah Bantuan Hukum yang Masuk dalam 1 Tahun				6			
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III				16,11%				
4	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	1	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi	2 Aplikasi	20%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	
		2	Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	800 Berita	212 Berita	27%		
		3	Jumlah Pengguna Aplikasi e-Library	10.000 Pengguna	1.612 Pengguna	16%		
		4	Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-	100%	100%	100%		

			Teknologi Informasi (SPPT-TI)					
			Jumlah Realisasi Satuan Kerja		405			
			Jumlah Target Satuan Kerja		405			
		5	Persentase penyelesaian distribusi surat	100%	100%	100%	Biro Umum	
			Jumlah surat yang telah didistribusikan		8.135			
			Jumlah surat yang masuk pada Tata Usaha		8.135			
		6	Persentase tindakanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	Biro Sekretariat Pimpinan	
			Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat waktu		6.098			
			Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan		6.098			
		7	Jumlah dukungan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Mahkamah Agung	160	23	14%	Biro Umum	
		8	Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung	11.000	2158	20%		
		9	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	146 Laporan	10	7%		
		Rata-Rata Capaian Sasaran Srategis IV			44,83%			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target	MARET		Unit Eselon II	
					Realisasi	Capaian		
1	Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan	1	Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	14.270 Orang		0%	Biro Kepegawaian	
		2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	1.500 Pegawai	5 Pegawai	0%		
		3	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	99,60%	100%	100,40%		
			Jumlah Data Pegawai yang Valid		31.923			
			Jumlah Seluruh Data Pegawai Mahkamah Agung		31.923			
		4	Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%	98%	98%		
			Jumlah Layanan Kepegawaian yang Tepat Waktu		3.035			
			Jumlah Layanan Kepegawaian		3.082			
		5	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70 Pegawai		0%	Biro Umum	
		Rata-Rata Capaian Sasaran Stratis I				39,84%		
2	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	1	Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	70%	0	0	Biro Perencanaan dan Organisasi	
			Jumlah usulan pagu indikatif					
			Jumlah usulan Rencana Kerja					
		2	Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dan RKA K/L	100%	0	0		
			Jumlah Program dan Kegiatan yang Tersusun dalam Aplikasi KRISNA					
			Jumlah Program dan kegiatan yang tersusun dalam aplikasi SAKTI					

		3	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	500 Dokumen		0%	Biro Keuangan	
		4	Opini WTP	WTP	WTP	100%		
		5	Persentase kerugian Negara yang dikembalikan ke kas Negara	95,00%	99,80%	105,06%		
			Jumlah kerugian negara yang telah disetor ke kas negara		Rp29.846.608.037			
			Jumlah kerugian negara		Rp29.905.632.263			
		6	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100%	Rp7.289.410.952	28%		
			Jumlah realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung		24.503.047.868			
			Target PNBP MA		86.905.618.000			
		7	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	95%	25%	26%		
			Jumlah realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung		Rp2.921.818.898.027			
			Jumlah alokasi Anggaran		Rp11.924.242.498.000			
		8	Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawab an keuangan Negara	80%	20,00%	25,00%		
			Satker yang Sudah Patuh terhadap Regulasi					
			Jumlah Seluruh Satker					
		9	Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	100%	0%	0%	Biro Perlengkapan	
			Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui					
			Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Diusulkan melalui RKBMN					

		10	Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada	85%	0	0			
			Jumlah Pengadlan yang Telah Sesuai Standarisasi						
			Jumlah Seluruh Pengadilan						
		11	Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%	0	0			
			Jumlah Nilai Penatausahaan BMN yang Ditetapkan						
			Jumlah Nilai BMN Keseluruhan						
		12	Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%	0	0			
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan						
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Diusulkan						
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II				23,67%			
		3	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1	Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	7 Regulasi		0%	Biro Perencanaan dan Organisasi
				2	Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "BB"	700 Satker		0%	
3	Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan			35 Perancang an	8 Perancangan	23%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat		
4	Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus			75%	44%	59%			
	Jumlah Bantuan Hukum yang Telah Putus dalam 1 Tahun				4				
	Jumlah Bantuan Hukum yang Masuk dalam 1 Tahun				9				
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III				20,53%					
4	Mewujudkan pelayanan	1	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi	2 Aplikasi	20%	Biro Hukum dan		

kesekretariatan yang prima	2	Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	800 Berita	280 Berita	35%	Hubungan Masyarakat
	3	Jumlah Pengguna Aplikasi e-Library	10.000 Pengguna	2.494 Pengguna	25%	
	4	Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	100%	100%	100%	
		Jumlah Realisasi Satuan Kerja		405		
		Jumlah Target Satuan Kerja		405		
	5	Persentase penyelesaian distribusi surat	100%	100%	100%	Biro Umum
		Jumlah surat yang telah didistribusikan		10.668		
		Jumlah surat yang masuk pada Tata Usaha		10.668		
	6	Persentase tindaklanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	Biro Sekretariat Pimpinan
		Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat waktu		10.655		
		Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan		10.655		
	7	Jumlah dukungan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Mahkamah Agung	160	38	24%	Biro Umum
	8	Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung	11.000	3039	28%	
	9	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	146 Laporan	22	15%	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis IV			49,60%			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target	APRIL		Unit Eselon II
					Realisasi	Capaian	
1	Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan	1	Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	14.270 Orang		0%	Biro Kepegawaian
		2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	1.500 Pegawai		0%	
		3	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	99,60%	100%	100,40 %	
			Jumlah Data Pegawai yang Valid		31.789		
			Jumlah Seluruh Data Pegawai Mahkamah Agung		31.789		
		4	Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%	0	0	
			Jumlah Layanan Kepegawaian yang Tepat Waktu				
			Jumlah Layanan Kepegawaian				
		5	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70 Pegawai		0%	Biro Umum
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis I				20,68%	
2	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	1	Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	70%	0	0	Biro Perencanaan dan Organisasi
			Jumlah usulan pagu indikatif				
			Jumlah usulan Rencana Kerja				
		2	Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dan RKA K/L	100%	0	0	
			Jumlah Program dan Kegiatan yang Tersusun dalam Aplikasi KRISNA				
			Jumlah Program dan kegiatan yang tersusun dalam aplikasi SAKTI				
		3	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan	500 Dokumen		0%	

			hibah yang telah disahkan				
	4	Opini WTP	WTP	WTP	100%	Biro Keuangan	
	5	Persentase kerugian Negara yang dikembalikan ke kas Negara	95,00%	99,89%	105,15 %		
		Jumlah kerugian negara yang telah disetor ke kas negara		Rp29.884.109.430			
		Jumlah kerugian negara		Rp29.916.874.757			
	6	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100%	Rp9.782.134.127	39%		
		Jumlah realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung		34.285.181.995			
		Target PNPB MA		86.905.618.000			
	7	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	95%	32%	33%		
		Jumlah realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung		Rp3.785.379.489.962			
		Jumlah alokasi Anggaran		Rp11.924.242.498.000			
	8	Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan Negara	80%	28,00%	35,00%	Biro Perlengkapan	
		Satker yang Sudah Patuh terhadap Regulasi					
		Jumlah Seluruh Satker					
	9	Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	100%	0%	0%		
		Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui					
		Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Diusulkan melalui RKBMN					
	10	Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada	85%	0	0		

			Jumlah Pengadilan yang Telah Sesuai Standarisasi				
			Jumlah Seluruh Pengadilan				
		11	Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%	0	0	
			Jumlah Nilai Penatausahaan BMN yang Ditetapkan				
			Jumlah Nilai BMN Keseluruhan				
		12	Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%	0	0	
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan				
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Diusulkan				
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II				26,08%	
3	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1	Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	7 Regulasi		0%	Biro Perencanaan dan Organisasi
		2	Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "BB"	700 Satker		0%	
		3	Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan	35 Perancangan	15 Perancangan	43%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		4	Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus	75%		0%	
			Jumlah Bantuan Hukum yang Telah Putus dalam 1 Tahun		6		
			Jumlah Bantuan Hukum yang Masuk dalam 1 Tahun		9		
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III					10,71%
4	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	1	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi	5 Aplikasi	50%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		2	Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	800 Berita	405 Berita	51%	
		3	Jumlah Pengguna Aplikasi e-Library	10.000 Pengguna	3.473 Pengguna	35%	
		4	Persentase pengadilan yang	100%	100%	100%	

			mendapatkan Peningkatkan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)				
			Jumlah Realisasi Satuan Kerja		405		
			Jumlah Target Satuan Kerja		405		
		5	Persentase penyelesaian distribusi surat	100%	100%	100%	Biro Umum
			Jumlah surat yang telah didistribusikan		12.784		
			Jumlah surat yang masuk pada Tata Usaha		12.784		
		6	Persentase tindaklanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	Biro Sekretariat Pimpinan
			Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat waktu		15.121		
			Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan		15.121		
		7	Jumlah dukungan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Mahkamah Agung	160	46	29%	Biro Umum
		8	Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung	11.000	3787	34%	
		9	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	146 Laporan	36	25%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis IV		58,13%			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target	MEI		Unit Eselon II
					Realisasi	Capaian	
1	Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan	1	Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	14.270 Orang		0%	Biro Kepegawaian
		2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	1.500 Pegawai	100	7%	
		3	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	99,60%	100%	100,40%	
			Jumlah Data Pegawai yang Valid		33.385		
			Jumlah Seluruh Data Pegawai Mahkamah Agung		33.385		
		4	Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%	0	0	
			Jumlah Layanan Kepegawaian yang Tepat Waktu				
			Jumlah Layanan Kepegawaian				
		5	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70 Pegawai		0%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis I				21,41%	
2	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	1	Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	70%	0	0	Biro Perencanaan dan Organisasi
			Jumlah usulan pagu indikatif				
			Jumlah usulan Rencana Kerja				
		2	Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dan RKA K/L	100%	0	0	
			Jumlah Program dan Kegiatan yang Tersusun dalam Aplikasi KRISNA				
			Jumlah Program dan kegiatan yang tersusun dalam aplikasi SAKTI				
		3	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	500 Dokumen		0%	

		4	Opini WTP	WTP	WTP	100%	Biro Keuangan
		5	Persentase kerugian Negara yang dikembalikan ke kas Negara	95,00%	99,89%	105,15%	
			Jumlah kerugian negara yang telah disetor ke kas negara		Rp29.885.358.596		
			Jumlah kerugian negara		Rp29.916.874.757		
		6	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100%	Rp8.768.975.464	50%	
			Jumlah realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkmah Agung		43.054.157.459		
			Target PNPB MA		86.905.618.000		
		7	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	95%	38%	40%	
			Jumlah realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung		Rp4.583.071.380.230		
			Jumlah alokasi Anggaran		Rp11.924.242.498.000		
		8	Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan Negara	80%	44,00%	55,00%	
			Satker yang Sudah Patuh terhadap Regulasi				
			Jumlah Seluruh Satker				
		9	Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	100%	0%	0%	Biro Perlengkapan
			Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui				
			Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Diusulkan melalui RKBMN				
		10	Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada	85%	0	0	
			Jumlah Pengadilan yang Telah Sesuai Standarisasi				

			Jumlah Seluruh Pengadilan				
		11	Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%	0	0	
			Jumlah Nilai Penatausahaan BMN yang Ditetapkan				
			Jumlah Nilai BMN Keseluruhan				
		12	Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%	0	0	
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan				
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Diusulkan				
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II				29,18%			
3	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1	Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	7 Regulasi		0%	Biro Perencanaan dan Organisasi
		2	Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "BB"	700 Satker		0%	
		3	Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan	35 Perancangan	18 Perancangan	51%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		4	Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus	75%		0%	
			Jumlah Bantuan Hukum yang Telah Putus dalam 1 Tahun		7		
			Jumlah Bantuan Hukum yang Masuk dalam 1 Tahun		9		
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III					12,86%		
4	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	1	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi	6 Aplikasi	60%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		2	Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	800 Berita	504 Berita	63%	
		3	Jumlah Pengguna Aplikasi e-Library	10.000 Pengguna	4.516 Pengguna	45%	
		4	Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatkan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-	100%	100%	100%	

			Teknologi Informasi (SPPT-TI)				
			Jumlah Realisasi Satuan Kerja		405		
			Jumlah Target Satuan Kerja		405		
		5	Persentase penyelesaian distribusi surat	100%	100%	100%	Biro Umum
			Jumlah surat yang telah didistribusikan		16.553		
			Jumlah surat yang masuk pada Tata Usaha		16.553		
		6	Persentase tindaklanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	Biro Sekretariat Pimpinan
			Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat waktu		18.293		
			Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan		18.293		
		7	Jumlah dukungan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Mahkamah Agung	160	61	38%	Biro Umum
		8	Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung	11.000	4732	43%	
		9	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	146 Laporan	53	36%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran Srategis IV		65,07%			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target	JUNI		Unit Eselon II
					Realisasi	Capaian	
1	Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan	1	Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	14.270 Orang		0%	Biro Kepegawaian
		2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	1.500 Pegawai	169	11%	
		3	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	99,60%	100%	100,40%	
			Jumlah Data Pegawai yang Valid		33.372		
			Jumlah Seluruh Data Pegawai Mahkamah Agung		33.372		
		4	Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%	98%	98%	
			Jumlah Layanan Kepegawaian yang Tepat Waktu		6.326		
			Jumlah Layanan Kepegawaian		6.477		
		5	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70 Pegawai	70	100%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis I				61,87%	
2	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	1	Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	70%	0	0	Biro Perencanaan dan Organisasi
			Jumlah usulan pagu indikatif				
			Jumlah usulan Rencana Kerja				
		2	Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dan RKA K/L	100%	0	0	
			Jumlah Program dan Kegiatan yang Tersusun dalam Aplikasi KRISNA				
			Jumlah Program dan kegiatan yang tersusun dalam aplikasi SAKTI				
		3	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	500 Dokumen	187	37%	

		4	Opini WTP	WTP	WTP	100%	Biro Keuangan
		5	Persentase kerugian Negara yang dikembalikan ke kas Negara	95,00%	99,90%	105,16%	
			Jumlah kerugian negara yang telah disetor ke kas negara		Rp29.890.607.762		
			Jumlah kerugian negara		Rp29.920.874.757		
		6	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100%	Rp7.699.151.513	58%	
			Jumlah realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung		50.753.308.972		
			Target PNBPA MA		86.905.618.000		
		7	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	95%	51%	54%	
			Jumlah realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung		Rp6.074.740.205.269		
			Jumlah alokasi Anggaran		Rp11.924.242.498.000		
		8	Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawabannya keuangan Negara	80%	56,00%	70,00%	
			Satker yang Sudah Patuh terhadap Regulasi				
			Jumlah Seluruh Satker				
		9	Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	100%	0%	0%	Biro Perlengkapan
			Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui				
			Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Diusulkan melalui RKBMN				
		10	Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada	85%	0	0	
			Jumlah Pengadilan yang Telah Sesuai Standarisasi				

			Jumlah Seluruh Pengadilan				
		11	Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%	0	0	
			Jumlah Nilai Penatausahaan BMN yang Ditetapkan				
			Jumlah Nilai BMN Keseluruhan				
		12	Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%	0	0	
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan				
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Diusulkan				
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II				35,83%			
3	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1	Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	7 Regulasi		0%	Biro Perencanaan dan Organisasi
		2	Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "BB"	700 Satker		0%	
		3	Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan	35 Perancangan	22 Perancangan	63%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		4	Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus	75%		0%	
			Jumlah Bantuan Hukum yang Telah Putus dalam 1 Tahun		8		
			Jumlah Bantuan Hukum yang Masuk dalam 1 Tahun		10		
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III				15,71%	
4	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	1	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi	8 Aplikasi	80%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		2	Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	800 Berita	584 Berita	73%	
		3	Jumlah Pengguna Aplikasi e-Library	10.000 Pengguna	5.279 Pengguna	53%	
		4	Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem	100%	100%	100%	

			Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)				
			Jumlah Realisasi Satuan Kerja		405		
			Jumlah Target Satuan Kerja		405		
		5	Persentase penyelesaian distribusi surat	100%	100%	100%	Biro Umum
			Jumlah surat yang telah didistribusikan		19.858		
			Jumlah surat yang masuk pada Tata Usaha		19.858		
		6	Persentase tindaklanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	Biro Sekretariat Pimpinan
			Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat waktu		21.465		
			Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan		21.465		
		7	Jumlah dukungan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Mahkamah Agung	160	81	51%	Biro Umum
		8	Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung	11.000	5620	51%	
		9	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	146 Laporan	69	47%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran Srategis IV				72,75%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target	JULI		Unit Eselon II
					Realisasi	Capaian	
1	Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan	1	Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	14.270 Orang		0,0%	Biro Kepegawaian
		2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	1.500 Pegawai	318 Pegawai	21%	
		3	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	99,60%	100%	100,40 %	
			Jumlah Data Pegawai yang Valid		33.189		
			Jumlah Seluruh Data Pegawai Mahkamah Agung		33.189		
		4	Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%	0	0	
			Jumlah Layanan Kepegawaian yang Tepat Waktu				
			Jumlah Layanan Kepegawaian				
		5	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70 Pegawai		0%	Biro Umum
		Rata-Rata Capaian Sasaran Srategis I				23,32%	
2	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	1	Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	70%	0	0	Biro Perencanaan dan Organisasi
			Jumlah usulan pagu indikatif				
			Jumlah usulan Rencana Kerja				
		2	Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dan RKA K/L	100%	0	0	
			Jumlah Program dan Kegiatan yang Tersusun dalam Aplikasi KRISNA				
			Jumlah Program dan kegiatan yang tersusun dalam aplikasi SAKTI				
		3	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan	500 Dokumen		0%	

			hibah yang telah disahkan				
		4	Opini WTP	WTP	WTP	100%	Biro Keuangan
		5	Persentase kerugian Negara yang dikembalikan ke kas Negara	95,00%	99,90%	105,16 %	
			Jumlah kerugian negara yang telah disetor ke kas negara		29.892.306.928		
			Jumlah kerugian negara		29.921.324.757		
		6	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100%	11.714.835.877	72%	
			Jumlah realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung		62.468.144.849		
			Target PNBPN MA		86.905.618.000		
		7	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	95%	58%	61%	
			Jumlah realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung		6.931.846.369.105,00		
			Jumlah alokasi Anggaran		11.925.492.498.000,00		
		8	Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan Negara	80%	54%	67%	
			Satker yang Sudah Patuh terhadap Regulasi		1.000		
			Jumlah Seluruh Satker		1.853		
		9	Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	100%	0%	0%	Biro Perlengkapan
			Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui				
			Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Diusulkan melalui RKBMN				
		10	Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada	85%	0	0	
			Jumlah Pengadilan yang Telah Sesuai Standarisasi				

			Jumlah Seluruh Pengadilan				
		11	Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%	0	0	
			Jumlah Nilai Penatausahaan BMN yang Ditetapkan				
			Jumlah Nilai BMN Keseluruhan				
		12	Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%	0	0	
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan				
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Dlusulkan				
Rata-Rata Capaian Sasaran Stratis II					33,81%		
3	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1	Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	7 Regulasi		0%	Biro Perencanaan dan Organisasi
		2	Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "BB"	700 Satker		0%	
		3	Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan	35 Perancangan	24 Perancangan	69%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		4	Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus	75%	91%	121%	
			Jumlah Bantuan Hukum yang Telah Putus dalam 1 Tahun		10		
			Jumlah Bantuan Hukum yang Masuk dalam 1 Tahun		11		
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III				47,45%	
4	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	1	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi	9 Aplikasi	90%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		2	Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	800 Berita	666 Berita	83%	
		3	Jumlah Pengguna Aplikasi e-Library	10.000 Pengguna	6.015 Pengguna	60%	

		4	Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	100%	100%	100%	
			Jumlah Realisasi Satuan Kerja		405		
			Jumlah Target Satuan Kerja		405		
		5	Persentase penyelesaian distribusi surat	100%	100%	100%	Biro Umum
			Jumlah surat yang telah didistribusikan		23.667		
			Jumlah surat yang masuk pada Tata Usaha		23.667		
		6	Persentase tindaklanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	Biro Sekretariat Pimpinan
			Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat waktu		24.710		
			Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan		24.710		
		7	Jumlah dukungan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Mahkamah Agung	160	94	59%	Biro Umum
		8	Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung	11.000	6718	61%	
		9	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	146 Laporan	89	61%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis IV		79,35%			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target	AGUSTUS		Unit Eselon II	
					Realisasi	Capaian		
1	Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan	1	Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	14.270 Orang		0%	Biro Kepegawaian	
		2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	1.500 Pegawai	393 Pegawai	26%		
		3	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	99,60%	100%	100,40%		
			Jumlah Data Pegawai yang Valid		33.082			
			Jumlah Seluruh Data Pegawai Mahkamah Agung		33.082			
		4	Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%	0	0		
			Jumlah Layanan Kepegawaian yang Tepat Waktu					
			Jumlah Layanan Kepegawaian					
		5	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70 Pegawai		0%		Biro Umum
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis I				25,32%		
		2	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	1	Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	70%	0	0
Jumlah usulan pagu indikatif								
Jumlah usulan Rencana Kerja								
2	Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dan RKA K/L			100%	0	0		
	Jumlah Program dan Kegiatan yang Tersusun dalam Aplikasi KRISNA							

		Jumlah Program dan kegiatan yang tersusun dalam aplikasi SAKTI				
	3	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	500 Dokumen		0%	
	4	Opini WTP	WTP	WTP	100%	Biro Keuangan
	5	Persentase kerugian Negara yang dikembalikan ke kas Negara	95,00%	99,91%	105,17%	
		Jumlah kerugian negara yang telah disetor ke kas negara		29.899.006.094		
		Jumlah kerugian negara		29.926.774.757		
	6	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100%	Rp10.169.520.229	84%	
		Jumlah realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung		72.637.665.078		
		Target PNPB MA		86.905.618.000		
	7	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	95%	65%	68%	
		Jumlah realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung		7.741.976.338.528,00		
		Jumlah alokasi Anggaran		11.925.492.498.000,00		
	8	Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan Negara	80%	12,00%	15,00%	
		Satker yang Sudah Patuh terhadap Regulasi				
		Jumlah Seluruh Satker				
	9	Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	100%	0%	0%	Biro Perlengkapan
		Jumlah Usulan Perencanaan				

			Kebutuhan BMN yang Disetujui					
			Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Diusulkan melalui RKBMN					
		10	Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada	85%	0	0		
			Jumlah Pengadlan yang Telah Sesuai Standarisasi					
			Jumlah Seluruh Pengadilan					
		11	Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%	0	0		
			Jumlah Nilai Penatausahaan BMN yang Ditetapkan					
			Jumlah Nilai BMN Keseluruhan					
		12	Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%	0	0		
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan					
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Dlusulkan					
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II			31,01%			
	3	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1	Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	7 Regulasi		0%	Biro Perencanaan dan Organisasi
			2	Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "BB"	700 Satker		0%	
			3	Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan	35 Perancangan	28 Perancangan	80%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
			4	Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus	75%	92%	122%	
				Jumlah Bantuan Hukum yang Telah Putus dalam 1 Tahun		11		

			Jumlah Bantuan Hukum yang Masuk dalam 1 Tahun		12		
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III				50,56%			
4	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	1	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi	10 Aplikasi	100%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		2	Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	800 Berita	885 Berita	111%	
		3	Jumlah Pengguna Aplikasi e-Library	10.000 Pengguna	6.640 Pengguna	66%	
		4	Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	100%	100%	100%	
		Jumlah Realisasi Satuan Kerja			405		
		Jumlah Target Satuan Kerja			405		
		5	Persentase penyelesaian distribusi surat	100%	100%	100%	Biro Umum
			Jumlah surat yang telah didistribusikan		27.340		
			Jumlah surat yang masuk pada Tata Usaha		27.340		
		6	Persentase tindaklanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	Biro Sekretariat Pimpinan
			Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat waktu		28.591		
			Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan		28.591		
		7	Jumlah dukungan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Mahkamah Agung	160	107	67%	Biro Umum
		8	Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di	11.000	7839	71%	

			lingkungan Mahkamah Agung				
		9	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	146 Laporan	106	73%	
Rata-Rata Capaian Sasaran Srategis IV				87,53%			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target	SEPTEMBER		Unit Eselon II	
					Realisasi	Capaian		
1	Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan	1	Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	14.270 Orang		0%	Biro Kepegawaian	
		2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	1.500 Pegawai	432 Pegawai	29%		
		3	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	99,60%	100%	100,40%		
			Jumlah Data Pegawai yang Valid		32.973			
			Jumlah Seluruh Data Pegawai Mahkamah Agung		32.973			
		4	Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%	97%	97%		
			Jumlah Layanan Kepegawaian yang Tepat Waktu		6.931			
			Jumlah Layanan Kepegawaian		7.156			
		5	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70 Pegawai		0%	Biro Umum	
		Rata-Rata Capaian Sasaran Stratis I				45,21%		
2	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	1	Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	70%	0	0	Biro Perencanaan dan Organisasi	
			Jumlah usulan pagu indikatif					
			Jumlah usulan Rencana Kerja					
		2	Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dan RKA K/L	100%	0	0		
			Jumlah Program dan Kegiatan yang Tersusun dalam Aplikasi KRISNA					
			Jumlah Program dan kegiatan yang tersusun dalam aplikasi SAKTI					
		3	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	500 Dokumen	370	74%		

		4	Opini WTP	WTP	WTP	100%	Biro Keuangan	
		5	Persentase kerugian Negara yang dikembalikan ke kas Negara	95,00%	99,99%	105,25%		
			Jumlah kerugian negara yang telah disetor ke kas negara		29.923.027.260			
			Jumlah kerugian negara		29.926.774.757			
		6	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100%	Rp7.580.024.015	92%		
			Jumlah realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung		80.217.689.093			
			Target PNPB MA		86.905.618.000			
		7	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	95%	72%	76%		
			Jumlah realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung		8.566.752.058.328,00			
			Jumlah alokasi Anggaran		11.925.492.498.000,00			
		8	Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan Negara	80%	4,00%	5,00%		
			Satker yang Sudah Patuh terhadap Regulasi					
			Jumlah Seluruh Satker					
		9	Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	100%			Biro Perlengkapan	
			Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui					
			Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Diusulkan melalui RKBMN					
		10	Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada	85%				

			Jumlah Pengadilan yang Telah Sesuai Standarisasi					
			Jumlah Seluruh Pengadilan					
		11	Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%				
			Jumlah Nilai Penatausahaan BMN yang Ditetapkan					
			Jumlah Nilai BMN Keseluruhan					
		12	Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%				
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan					
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Diusulkan					
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II				41,11%		
		3	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1	Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	7 Regulasi		0%
2	Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "BB"	700 Satker			0%			
		3	Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan	35 Perancangan	28 Perancangan	80%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	
	4	Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus	75%	100%	133%			
		Jumlah Bantuan Hukum yang Telah Putus dalam 1 Tahun		14				
		Jumlah Bantuan Hukum yang Masuk dalam 1 Tahun		14				
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III				53,33%				
4	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	1	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi	11 Aplikasi	110%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	
		2	Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	800 Berita	1.071 Berita	134%		
		3	Jumlah Pengguna Aplikasi e-Library	10.000 Pengguna	7.371 Pengguna	74%		

		4	Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	100%	100%	100%	
			Jumlah Realisasi Satuan Kerja		405		
			Jumlah Target Satuan Kerja		405		
		5	Persentase penyelesaian distribusi surat	100%	100%	100%	Biro Umum
			Jumlah surat yang telah didistribusikan		30.255		
			Jumlah surat yang masuk pada Tata Usaha		30.255		
		6	Persentase tindaklanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	Biro Sekretariat Pimpinan
			Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat waktu		31.962		
			Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan		31.962		
		7	Jumlah dukungan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Mahkamah Agung	160	122	76%	Biro Umum
		8	Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung	11.000	8780	80%	
		9	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	146 Laporan	121	83%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis IV				95,17%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target	OKTOBER		Unit Eselon II	
					Realisasi	Capaian		
1	Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan	1	Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	14.270 Orang		0%	Biro Kepegawaian	
		2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	1.500 Pegawai	560 Pegawai	37%		
		3	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	99,60%	100%	100,40%		
			Jumlah Data Pegawai yang Valid		32.948			
			Jumlah Seluruh Data Pegawai Mahkamah Agung		32.948			
		4	Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%	0	0		
			Jumlah Layanan Kepegawaian yang Tepat Waktu					
			Jumlah Layanan Kepegawaian					
		5	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70 Pegawai		0%	Biro Umum	
		Rata-Rata Capaian Sasaran Srategis I				27,55%		
2	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	1	Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	70%	0	0	Biro Perencanaan dan Organisasi	
			Jumlah usulan pagu indikatif					
			Jumlah usulan Rencana Kerja					
		2	Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dan RKA K/L	100%	0	0		
			Jumlah Program dan Kegiatan yang Tersusun dalam Aplikasi KRISNA					
			Jumlah Program dan kegiatan yang tersusun dalam aplikasi SAKTI					
		3	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan	500 Dokumen		0%		

		4	Opini WTP	WTP	WTP	100%	Biro Keuangan
		5	Persentase kerugian Negara yang dikembalikan ke kas Negara	95,00%	99,99%	105,25%	
			Jumlah kerugian negara yang telah disetor ke kas negara		29.929.076.426		
			Jumlah kerugian negara		29.931.574.757		
		6	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100%	Rp8.769.373.429	102%	
			Jumlah realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkmah Agung		88.987.062.522		
			Target PNPB MA		86.905.618.000		
		7	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	95%	79%	84%	
			Jumlah realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung		9.474.021.046.712,00		
			Jumlah alokasi Anggaran		11.925.492.498.000,00		
		8	Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan Negara	80%	20,00%	25,00%	
			Satker yang Sudah Patuh terhadap Regulasi				
			Jumlah Seluruh Satker				
		9	Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	100%	0%	0%	Biro Perlengkapan
			Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui				
			Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Diusulkan melalui RKBMN				
		10	Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi yang ada	85%	0	0	
			Jumlah Pengadilan yang Telah Sesuai Standarisasi				

			Jumlah Seluruh Pengadilan					
		11	Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%	0	0		
			Jumlah Nilai Penatausahaan BMN yang Ditetapkan					
			Jumlah Nilai BMN Keseluruhan					
		12	Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%	0	0		
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan					
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Dlusulkan					
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II				34,69%				
3	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1	Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	7 Regulasi		0%	Biro Perencanaan dan Organisasi	
		2	Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "BB"	700 Satker		0%		
		3	Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan	35 Perancangan	31 Perancangan	89%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	
		4	Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus	75%	100%	133%		
		Jumlah Bantuan Hukum yang Telah Putus dalam 1 Tahun			14			
		Jumlah Bantuan Hukum yang Masuk dalam 1 Tahun			14			
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III				55,48%		
4	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	1	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi	13 Aplikasi	130%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	
		2	Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	800 Berita	1.224 Berita	153%		
		3	Jumlah Pengguna Aplikasi e-Library	10.000 Pengguna	8.597 Pengguna	86%		
		4	Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	100%	100%	100%		

			Jumlah Realisasi Satuan Kerja		405		
			Jumlah Target Satuan Kerja		405		
		5	Persentase penyelesaian distribusi surat	100%	100%	100%	Biro Umum
			Jumlah surat yang telah didistribusikan		33.645		
			Jumlah surat yang masuk pada Tata Usaha		33.645		
		6	Persentase tindaklanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	Biro Sekretariat Pimpinan
			Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat waktu		35.849		
			Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan		35.849		
		7	Jumlah dukungan keprotokol dan keamanan di lingkungan Mahkamah Agung	160	139	87%	Biro Umum
		8	Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung	11.000	9789	89%	
		9	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	146 Laporan	147	101%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis IV					105,06%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target	NOVEMBER		Unit Eselon II
					Realisasi	Capaian	
1	Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan	1	Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	14.270 Orang		0%	Biro Kepegawaian
		2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	1.500 Pegawai	1.695 Pegawai	113%	
		3	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	99,60%	100%	100,40%	
			Jumlah Data Pegawai yang Valid		32.829		
			Jumlah Seluruh Data Pegawai Mahkamah Agung		32.829		
		4	Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%	0	0	
			Jumlah Layanan Kepegawaian yang Tepat Waktu				
			Jumlah Layanan Kepegawaian				
		5	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70 Pegawai		0%	Biro Umum
		Rata-Rata Capaian Sasaran Stratis I					
2	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	1	Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	70%	0	0	Biro Perencanaan dan Organisasi
			Jumlah usulan pagu indikatif				
			Jumlah usulan Rencana Kerja				
		2	Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dan RKA K/L	100%	0	0	
			Jumlah Program dan Kegiatan yang Tersusun dalam Aplikasi KRISNA				
			Jumlah Program dan kegiatan yang tersusun dalam aplikasi SAKTI				
		3	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan	500 Dokumen		0%	

			hibah yang telah disahkan					Biro Keuangan
	4	Opini WTP	WTP	WTP	100%			
	5	Persentase kerugian Negara yang dikembalikan ke kas Negara	95,00%	100,00%	105,26%			
		Jumlah kerugian negara yang telah disetor ke kas negara		29.930.325.592				
		Jumlah kerugian negara		29.931.574.757				
	6	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100%	Rp8.426.883.343	112%			
		Jumlah realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung		97.413.945.865				
		Target PNBP MA		86.905.618.000				
	7	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	95%	87%	92%			
		Jumlah realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung		10.431.841.111.486,00				
		Jumlah alokasi Anggaran		11.925.492.498.000,00				
	8	Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan Negara	80%	24,00%	30,00%			
		Satker yang Sudah Patuh terhadap Regulasi						
		Jumlah Seluruh Satker						
	9	Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	100%	0%	0%			Biro Perlengkapan
		Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui						
		Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Diusulkan melalui RKBMN						
	10	Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai	85%	0	0			

			standarisasi yang ada				
			Jumlah Pengadlan yang Telah Sesuai Standarisasi				
			Jumlah Seluruh Pengadilan				
		11	Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%	0	0	
			Jumlah Nilai Penatausahaan BMN yang Ditetapkan				
			Jumlah Nilai BMN Keseluruhan				
		12	Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%	0	0	
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan				
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Dlusulkan				
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II				36,62%	
3	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1	Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	7 Regulasi		0%	Biro Perencanaan dan Organisasi
		2	Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "BB"	700 Satker		0%	
		3	Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan	35 Perancangan	33 Perancangan	94%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		4	Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus	75%	82%	110%	
			Jumlah Bantuan Hukum yang Telah Putus dalam 1 Tahun		14		
			Jumlah Bantuan Hukum yang Masuk dalam 1 Tahun		17		
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III				51,02%	
4	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	1	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi	16 Aplikasi	160%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		2	Jumlah berita tentang Mahkamah	800 Berita	1.330 Berita	166%	

			Agung yang dimuat media				
		3	Jumlah Pengguna Aplikasi e-Library	10.000 Pengguna	9.729 Pengguna	97%	
		4	Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	100%	100%	100%	
			Jumlah Realisasi Satuan Kerja		405		
			Jumlah Target Satuan Kerja		405		
		5	Persentase penyelesaian distribusi surat	100%	100%	100%	Biro Umum
			Jumlah surat yang telah didistribusikan		36.654		
			Jumlah surat yang masuk pada Tata Usaha		36.654		
		6	Persentase tindakanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	Biro Sekretariat Pimpinan
			Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat waktu		39.377		
			Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan		39.377		
		7	Jumlah dukungan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Mahkamah Agung	160	154	96%	Biro Umum
		8	Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung	11.000	10909	99%	
		9	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	146 Laporan	181	124%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis IV			115,88%		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target	DESEMBER		Unit Eselon II
					Realisasi	Capaian	
1	Mewujudkan Manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan	1	Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan	14.270 Orang	11.959 Orang	83,81%	Biro Kepegawaian
		2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai	1.500 Pegawai	1.695 Pegawai	113,00%	
		3	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	99,60%	100,00%	100,40%	
			Jumlah Data Pegawai yang Valid		32.731		
			Jumlah Seluruh Data Pegawai Mahkamah Agung		32.731		
		4	Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu	100%	96,69%	96,69%	
			Jumlah Layanan Kepegawaian yang Tepat Waktu		8.212		
			Jumlah Layanan Kepegawaian		8.493		
		5	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental	70 Pegawai	100	142,86%	Biro Umum
		Rata-Rata Capaian Sasaran Stratis I				107,35%	
2	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan BMN yang akuntabel	1	Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif	70%	59,66%	85,23%	Biro Perencanaan dan Organisasi
			Jumlah usulan pagu indikatif		12.152.558.495.000		
			Jumlah usulan Rencana Kerja		20.369.794.180.000		
		2	Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dan RKA K/L	100%	100%	100%	
			Jumlah Program dan Kegiatan yang Tersusun dalam Aplikasi KRISNA		36		
			Jumlah Program dan kegiatan yang tersusun dalam aplikasi SAKTI		36		
		3	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan	500 Dokumen	649	129,80%	

			hibah yang telah disahkan				
		4	Opini WTP	WTP	WTP	100%	Biro Keuangan
		5	Persentase kerugian Negara yang dikembalikan ke kas Negara	95,00%	100,00%	105,26%	
			Jumlah kerugian negara yang telah disetor ke kas negara		29.935.174.758		
			Jumlah kerugian negara		29.935.174.757		
		6	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100%	121,75%	121,75%	
			Jumlah realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung		105.803.612.870		
			Target PNBP MA		86.905.618.000		
		7	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	95%	97,37%	102,50%	
			Jumlah realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung		11.611.923.187.337,00		
			Jumlah alokasi Anggaran		11.925.492.498.000,00		
		8	Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan Negara	80%	92,00%	115,00%	
			Satker yang Sudah Patuh terhadap Regulasi		23		
			Jumlah Seluruh Satker		25		
		9	Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui	100%	98,28%	98,28%	
			Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Disetujui		123.481		
			Jumlah Usulan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Diusulkan melalui RKBMN		125.645		
		10	Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai	85%	80,57%	94,79%	Biro Perlengkapan

			standarisasi yang ada				
			Jumlah Pengadilan yang Telah Sesuai Standarisasi		2.231		
			Jumlah Seluruh Pengadilan		2.769		
		11	Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti	85%	100%	117,65%	
			Jumlah Nilai Penatausahaan BMN yang Ditetapkan		2.368.263.870.260		
			Jumlah Nilai BMN Keseluruhan		2.368.263.870.260		
		12	Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan	85%	100%	117,65%	
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Ditetapkan		222.941.100.997		
			Jumlah Nilai Pengelolaan BMN yang Dlusulkan		222.941.100.997		
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II				107,32%	
3	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	1	Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun	7 Regulasi	12 Regulasi	171,43%	Biro Perencanaan dan Organisasi
2		Jumlah satker yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "BB"	700 Satker	784 Satker	112,00%		
3		Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan	35 Perancangan	40 Perancangan	114,29%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	
4		Persentase bantuan hukum kepada Mahkamah Agung yang telah putus	75%	77,78%	103,70%		
		Jumlah Bantuan Hukum yang Telah Putus dalam 1 Tahun		14			
		Jumlah Bantuan Hukum yang Masuk dalam 1 Tahun		18			
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III				125,35%			
4	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima	1	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	10 Aplikasi	16 Aplikasi	160,00%	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
2		Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media	800 Berita	1.471 Berita	183,88%		

		3	Jumlah Pengguna Aplikasi e-Library	10.000 Pengguna	10.627 Pengguna	106,27%	
		4	Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI)	100%	100%	100%	
			Jumlah Realisasi Satuan Kerja		405		
			Jumlah Target Satuan Kerja		405		
		5	Persentase penyelesaian distribusi surat	100%	100%	100%	
			Jumlah surat yang telah didistribusikan		39.041		
			Jumlah surat yang masuk pada Tata Usaha		39.041		
		6	Persentase tindaklanjut surat pada kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	Biro Sekretariat Pimpinan
			Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat waktu		42.231		
			Jumlah Surat Masuk pada Kesekretariatan Pimpinan		42.231		
		7	Jumlah dukungan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Mahkamah Agung	160	162	101,25%	Biro Umum
		8	Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung	11.000	11.884	108,04%	
		9	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung	146 Laporan	206	141,10%	
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis IV					122,28%

8. PREDIKAT WTP MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023



Lampiran 1

Perincian Opini atas LKKL dan LKBUN							
No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ⁽¹⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional ⁽¹⁾	WTP	WTP	WDP	⁽¹⁾	⁽¹⁾
30.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	051	Badan Siber dan Sandi Negara ⁽¹⁾	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
35.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

9. DAFTAR UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH NILAI SAKIP MINIMAL BB

No	Nama Satker	Tahun 2023 (Penilaian Tahun 2024)		No	Nama Satker	Tahun 2023 (Penilaian Tahun 2024)	
1.	Pengadilan Tinggi Jakarta	84,95	A	58.	Pengadilan Agama Tegal	80,75	A
2.	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	82,00	A	59.	Pengadilan Agama Semarang	85,25	A
3.	Pengadilan Tinggi Riau	84,70	A	60.	Pengadilan Agama Salatiga	81,90	A
4.	Pengadilan Tinggi Agama Padang	83,35	A	61.	Pengadilan Agama Purwodadi	80,45	A
5.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	80,50	A	62.	Pengadilan Agama Pati	80,60	A
6.	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	82,90	A	63.	Pengadilan Agama Kudus	82,20	A
7.	Pengadilan Negeri Bale Bandung	80,20	A	64.	Pengadilan Agama Jepara	80,15	A
8.	Pengadilan Negeri Depok	81,60	A	65.	Pengadilan Agama Rembang	80,10	A
9.	Pengadilan Negeri Tegal	83,60	A	66.	Pengadilan Agama Magelang	81,80	A
10.	Pengadilan Negeri Pati	87,45	A	67.	Pengadilan Agama Temanggung	81,00	A
11.	Pengadilan Negeri Kendal	87,30	A	68.	Pengadilan Agama Wonosobo	82,40	A
12.	Pengadilan Negeri Jepara	80,80	A	69.	Pengadilan Agama Kebumen	82,20	A
13.	Pengadilan Negeri Temanggung	84,90	A	70.	Pengadilan Agama Klaten	82,20	A
14.	Pengadilan Negeri Surakarta	88,35	A	71.	Pengadilan Agama Boyolali	84,00	A
15.	Pengadilan Negeri Karanganyar	82,70	A	72.	Pengadilan Agama Sragen	81,25	A
16.	Pengadilan Negeri Klaten	83,50	A	73.	Pengadilan Agama Wonogiri	80,60	A
17.	Pengadilan Negeri Mungkid	81,80	A	74.	Pengadilan Agama Kajen	80,50	A
18.	Pengadilan Negeri Rantau Prapat	86,40	A	75.	Pengadilan Negeri Batam	80,50	A
19.	PENGADILAN NEGERI PARINGIN	80,90	A	76.	Pengadilan Agama Mamuju	80,30	A
20.	Pengadilan Negeri Batulicin	80,30	A	77.	Pengadilan Agama Denpasar	80,60	A
21.	Pengadilan Negeri Bangli	80,60	A	78.	Pengadilan Agama Singaraja	82,10	A

22.	Pengadilan Agama Pangkajene	83,45	A	79.	Pengadilan Agama Bangli	80,80	A
23.	Pengadilan Agama Maros	83,15	A	80.	Pengadilan Agama Negara	80,60	A
24.	Pengadilan Agama Makassar	84,10	A	81.	Pengadilan Agama Karangasem	82,60	A
25.	Pengadilan Agama Watampone	85,35	A	82.	Pengadilan Agama Tabanan	83,00	A
26.	Pengadilan Agama Watan Soppeng	82,30	A	83.	Pengadilan Agama Klungkung	80,80	A
27.	Pengadilan Agama Bantaeng	83,40	A	84.	Pengadilan Agama Gianyar	80,60	A
28.	Pengadilan Agama Sinjai	82,55	A	85.	Pengadilan Agama Badung	80,60	A
29.	Pengadilan Agama Pinrang	84,95	A	86.	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang	87,90	A
30.	Pengadilan Agama Sidenreng	81,35	A	87.	Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak	80,10	A
31.	Pengadilan Agama Malili	84,20	A	88.	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	80,10	A
32.	Pengadilan Agama Majalengka	80,30	A	89.	Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda	85,20	A
33.	Pengadilan Agama Karawang	81,70	A	90.	Pengadilan Agama Wonosari	80,20	A
34.	Pengadilan Agama Ngamprah	80,20	A	91.	Pengadilan Agama Jambi	81,85	A
35.	Pengadilan Negeri Wates	82,60	A	92.	Pengadilan Agama Muara Bungo	81,55	A
36.	Pengadilan Negeri Bantul	82,60	A	93.	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	80,75	A
37.	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	81,00	A	94.	Pengadilan Agama Bangko	80,60	A
38.	Pengadilan Agama Jakarta Utara	80,40	A	95.	Pengadilan Agama Muara Bulian	82,15	A
39.	Mahkamah Syar'iyah Takengon	80,80	A	96.	Pengadilan Agama Sarolangun	80,90	A
40.	Pengadilan Agama Binjai	87,80	A	97.	Pengadilan Agama Muara Sabak	80,85	A
41.	Pengadilan Agama Kabanjahe	86,60	A	98.	Pengadilan Agama Muara Tebo	81,40	A
42.	Pengadilan Agama Medan	85,50	A	99.	Pengadilan Agama Sengeti	82,70	A
43.	Pengadilan Agama Tanjung Balai	83,00	A	100.	Pengadilan Agama Metro	80,60	A

44.	Pengadilan Agama Tebing Tinggi	84,00	A	101.	Pengadilan Agama Kodya Palu	80,70	A
45.	Pengadilan Agama Sidikalang	80,30	A	102.	PENGADILAN AGAMA AMPANA	80,10	A
46.	Pengadilan Agama Pematang Siantar	82,80	A	103.	Pengadilan Agama Donggala	80,25	A
47.	Pengadilan Agama Balige	81,70	A	104.	Pengadilan Agama Bungku	80,90	A
48.	Pengadilan Agama Kisaran	83,85	A	105.	Pengadilan Agama Banggai	80,50	A
49.	Pengadilan Agama Lubuk Pakam	84,80	A	106.	Pengadilan Agama Parigi	81,35	A
50.	Pengadilan Agama Simalungun	84,00	A	107.	Pengadilan Agama Atambua	83,50	A
51.	Pengadilan Agama Stabat	85,65	A	108.	Pengadilan Militer I - 05 Pontianak	80,80	A
52.	Pengadilan Agama Panyabungan	80,10	A	109.	Pengadilan Militer III - 12 Surabaya	84,40	A
53.	Pengadilan Agama Padang	80,05	A	110.	Pengadilan Militer III - 13 Madiun	82,10	A
54.	Pengadilan Agama Bukittinggi	81,00	A	111.	Pengadilan Militer III - 17 Manado	85,35	A
55.	Pengadilan Agama Ambon	81,55	A	112.	Pengadilan Militer III - 18 Ambon	82,10	A
56.	Pengadilan Agama Pekalongan	84,20	A	113.	Pengadilan Militer III - 15 Kupang	82,70	A
57.	Pengadilan Agama Pemalang	80,40	A	114.	Pengadilan Militer III - 19 Jayapura	82,10	A

No.	Nama Satker	Tahun 2023 (Penilaian Tahun 2024)		No.	Nama Satker	Tahun 2023 (Penilaian Tahun 2024)	
115.	Kepaniteraan	76,40	BB	450.	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	72,00	BB
116.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79,70	BB	451.	Pengadilan Negeri Metro	75,00	BB
117.	Pengadilan Tinggi Bandung	73,40	BB	452.	Pengadilan Negeri Kotabumi	73,00	BB
118.	Pengadilan Tinggi Semarang	74,45	BB	453.	Pengadilan Negeri Kalianda	76,00	BB
119.	Pengadilan Tinggi Surabaya	75,55	BB	454.	Pengadilan Negeri Gedong Tataan	73,00	BB
120.	Pengadilan Tinggi Medan	72,25	BB	455.	Pengadilan Negeri Kota Agung	72,00	BB
121.	Pengadilan Tinggi Padang	77,90	BB	456.	Pengadilan Negeri Liwa	73,00	BB
122.	Pengadilan Tinggi Palembang	79,25	BB	457.	Pengadilan Negeri Menggala	73,00	BB
123.	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	74,85	BB	458.	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	73,00	BB
124.	Pengadilan Tinggi Manado	70,70	BB	459.	Pengadilan Negeri Sukadana	73,00	BB
125.	Pengadilan Tinggi Ambon	75,20	BB	460.	Pengadilan Negeri Blambangan Umpu	71,00	BB
126.	Pengadilan Tinggi Denpasar	73,50	BB	461.	Pengadilan Negeri Pekanbaru	79,90	BB
127.	Pengadilan Tinggi Agama Makassar	73,15	BB	462.	Pengadilan Negeri Bengkalis	76,00	BB
128.	Pengadilan Tinggi Agama Bandung	74,20	BB	463.	Pengadilan Negeri Rengat Indragiri Hulu	74,25	BB
129.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	76,70	BB	464.	Pengadilan Negeri Tembilahan	77,00	BB
130.	Pengadilan Tinggi Jayapura	76,10	BB	465.	Pengadilan Negeri Bangkinang	74,00	BB
131.	Pengadilan Tinggi Kupang	73,80	BB	466.	Pengadilan Negeri Dumai	80,00	BB
132.	Pengadilan Tinggi Pontianak	74,70	BB	467.	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	75,20	BB
133.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	79,00	BB	468.	Pengadilan Negeri Pelalawan	79,35	BB
134.	Pengadilan Tinggi Palangka Raya	77,60	BB	469.	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	77,00	BB
135.	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	77,00	BB	470.	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	73,30	BB
136.	Pengadilan Tinggi Jambi	77,15	BB	471.	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	77,00	BB
137.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	77,65	BB	472.	Pengadilan Negeri Jambi	78,50	BB

138.	Pengadilan Tinggi Samarinda	74,00	BB	473.	Pengadilan Negeri Muara Bungo	77,60	BB
139.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	73,00	BB	474.	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	77,60	BB
140.	Pengadilan Tinggi Kendari	72,55	BB	475.	Pengadilan Negeri Sungai Penuh	76,70	BB
141.	Pengadilan Tinggi Mataram	74,60	BB	476.	Pengadilan Negeri Bangko	77,60	BB
142.	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	71,65	BB	477.	Pengadilan Negeri Muara Bulian	76,70	BB
143.	Mahkamah Syar'iyah Aceh	77,30	BB	478.	Pengadilan Negeri Tebo	76,70	BB
144.	Pengadilan Tinggi Agama Medan	74,25	BB	479.	Pengadilan Negeri Sarolangun	77,60	BB
145.	Pengadilan Tinggi Agama Palembang	79,40	BB	480.	Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	78,50	BB
146.	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	71,30	BB	481.	Pengadilan Negeri Sengeti	78,50	BB
147.	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	73,45	BB	482.	Pengadilan Negeri Bengkulu	76,95	BB
148.	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak	75,80	BB	483.	Pengadilan Negeri Curup	74,35	BB
149.	Pengadilan Tinggi Agama Manado	74,70	BB	484.	Pengadilan Negeri Manna	71,45	BB
150.	Pengadilan Tinggi Agama Ambon	72,75	BB	485.	Pengadilan Negeri Arga Makmur	76,15	BB
151.	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	75,75	BB	486.	Pengadilan Negeri Mukomuko	76,15	BB
152.	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	73,60	BB	487.	Pengadilan Negeri Bintuhan	70,20	BB
153.	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	70,10	BB	488.	Pengadilan Negeri Tais	74,05	BB
154.	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	76,00	BB	489.	Pengadilan Negeri Kepahiang	74,50	BB
155.	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya	73,30	BB	490.	Pengadilan Negeri Tubei	70,20	BB
156.	Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung	79,15	BB	491.	Pengadilan Negeri Tanah Grogot	70,80	BB
157.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	77,15	BB	492.	Pengadilan Negeri Palu	74,50	BB
158.	Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara	71,20	BB	493.	Pengadilan Negeri Toli-Toli	74,20	BB
159.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	70,60	BB	494.	Pengadilan Negeri Luwuk	74,15	BB
160.	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	77,10	BB	495.	Pengadilan Negeri Poso	73,15	BB
161.	Pengadilan Tinggi Agama Jambi	79,25	BB	496.	Pengadilan Negeri Donggala	73,00	BB

162.	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	76,55	BB	497.	Pengadilan Negeri Buol	73,75	BB
163.	Pengadilan Tinggi Agama Palu	74,15	BB	498.	Pengadilan Negeri Parigi	74,25	BB
164.	Pengadilan Tinggi Agama Kendari	70,90	BB	499.	Pengadilan Negeri Kendari	76,85	BB
165.	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	79,25	BB	500.	Pengadilan Negeri Bau-Bau	71,55	BB
166.	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	79,10	BB	501.	Pengadilan Negeri Raha	72,90	BB
167.	Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan Dan Latihan Hukum Dan Peradilan	74,40	BB	502.	Pengadilan Negeri Kolaka	77,10	BB
168.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan TUN	76,10	BB	503.	Pengadilan Negeri Lasusua	74,65	BB
169.	Badan Pengawasan	78,25	BB	504.	Pengadilan Negeri Wangi Wangi	70,10	BB
170.	Badan Urusan Administrasi	79,70	BB	505.	Pengadilan Negeri Andoolo	70,50	BB
171.	Pengadilan Militer Utama	74,40	BB	506.	Pengadilan Negeri Pasarwajo	71,75	BB
172.	Pengadilan Militer Tinggi - I Medan	72,25	BB	507.	Pengadilan Negeri Selong	70,60	BB
173.	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	70,60	BB	508.	Pengadilan Negeri Praya	70,20	BB
174.	Pengadilan Tinggi Banten	73,40	BB	509.	Pengadilan Agama Jakarta Barat	79,40	BB
175.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI	75,60	BB	510.	Pengadilan Agama Jakarta Timur	77,55	BB
176.	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	73,65	BB	511.	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	78,90	BB
177.	Pengadilan Tinggi Gorontalo	71,85	BB	512.	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	70,95	BB
178.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	74,00	BB	513.	Mahkamah Syar'iyah Sabang	70,40	BB
179.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	71,00	BB	514.	Mahkamah Syar'iyah Sigli	74,40	BB
180.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	76,00	BB	515.	Mahkamah Syar'iyah Meureudu	75,80	BB
181.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	75,60	BB	516.	Mahkamah Syar'iyah Bireuen	79,50	BB
182.	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	73,00	BB	517.	Mahkamah Syar'iyah Lhok Sukon	72,70	BB
183.	Pengadilan Negeri Bandung	78,30	BB	518.	Mahkamah Syar'iyah Langsa	76,80	BB

184.	Pengadilan Negeri Sumedang	73,00	BB	519.	Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang	77,90	BB
185.	Pengadilan Negeri Garut	74,70	BB	520.	Mahkamah Syar'iyah Blangkajeren	77,60	BB
186.	Pengadilan Negeri Ciamis	78,00	BB	521.	Mahkamah Syar'iyah Meulaboh	74,40	BB
187.	Pengadilan Negeri Purwakarta	77,40	BB	522.	Mahkamah Syar'iyah Calang	77,65	BB
188.	Pengadilan Negeri Karawang	73,30	BB	523.	Mahkamah Syar'iyah Singkil	78,60	BB
189.	Pengadilan Negeri Subang	79,10	BB	524.	Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue	74,05	BB
190.	Pengadilan Negeri Bogor	75,40	BB	525.	Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam	72,50	BB
191.	Pengadilan Negeri Sukabumi	78,90	BB	526.	MS Simpang Tiga Redelong	76,80	BB
192.	Pengadilan Negeri Cianjur	75,80	BB	527.	Pengadilan Agama Rantau Prapat	79,80	BB
193.	Pengadilan Negeri Cirebon	79,10	BB	528.	Pengadilan Agama Sibolga	76,05	BB
194.	Pengadilan Negeri Indramayu	78,00	BB	529.	Pengadilan Agama Padang Sidempuan	74,20	BB
195.	Pengadilan Negeri Majalengka	76,40	BB	530.	Pengadilan Agama Gunung Sitoli	75,20	BB
196.	Pengadilan Negeri Kuningan	77,25	BB	531.	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN	79,25	BB
197.	Pengadilan Negeri Cibadak	78,50	BB	532.	Pengadilan Agama Sei Rampah	73,40	BB
198.	Pengadilan Negeri Sumber	72,80	BB	533.	Pengadilan Agama Pandan	77,65	BB
199.	Pengadilan Negeri Banjar	80,00	BB	534.	Pengadilan Agama Tarutung	80,00	BB
200.	Pengadilan Negeri Cibirong	77,30	BB	535.	Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan	79,20	BB
201.	Pengadilan Negeri Semarang	76,65	BB	536.	Pengadilan Agama Pariaman	77,90	BB
202.	Pengadilan Negeri Pekalongan	74,10	BB	537.	Pengadilan Agama Solok	77,35	BB
203.	Pengadilan Negeri Kudus	73,80	BB	538.	Pengadilan Agama Sawahlunto	77,35	BB
204.	Pengadilan Negeri Brebes	70,80	BB	539.	Pengadilan Agama Pulau Punjung	73,90	BB
205.	Pengadilan Negeri Pematang	76,80	BB	540.	Pengadilan Agama Batusangkar	77,40	BB
206.	Pengadilan Negeri Purwodadi	78,45	BB	541.	Pengadilan Agama Padang Panjang	77,25	BB
207.	Pengadilan Negeri Salatiga	75,65	BB	542.	Pengadilan Agama Sijunjung	74,00	BB

208.	Pengadilan Negeri Ungaran	74,70	BB	543.	Pengadilan Agama Koto Baru	74,35	BB
209.	Pengadilan Negeri Blora	78,50	BB	544.	Pengadilan Agama Muara Labuh	73,40	BB
210.	Pengadilan Negeri Rembang	73,10	BB	545.	Pengadilan Agama Painan	75,50	BB
211.	Pengadilan Negeri Batang	78,50	BB	546.	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping	73,40	BB
212.	Pengadilan Negeri Purworejo	78,30	BB	547.	Pengadilan Agama Talu	74,65	BB
213.	Pengadilan Negeri Magelang	77,60	BB	548.	Pengadilan Agama Maninjau	73,40	BB
214.	Pengadilan Negeri Kebumen	76,40	BB	549.	Pengadilan Agama Payakumbuh	75,05	BB
215.	Pengadilan Negeri Wonosobo	78,30	BB	550.	Pengadilan Agama Tanjung Pati	74,80	BB
216.	Pengadilan Negeri Sragen	76,85	BB	551.	Pengadilan Agama Lubuk Basung	76,70	BB
217.	Pengadilan Negeri Wonogiri	79,65	BB	552.	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	73,50	BB
218.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	74,10	BB	553.	Pengadilan Agama Martapura Plg	72,90	BB
219.	Pengadilan Negeri Boyolali	79,80	BB	554.	Pengadilan Agama Muaradua	71,25	BB
220.	Pengadilan Negeri Purwokerto	75,80	BB	555.	Pengadilan Agama Pagaram	71,25	BB
221.	Pengadilan Negeri Cilacap	76,15	BB	556.	Pengadilan Agama Prabumulih	74,70	BB
222.	Pengadilan Negeri Banyumas	75,25	BB	557.	Pengadilan Agama Palembang	72,90	BB
223.	Pengadilan Negeri Purbalingga	79,05	BB	558.	Pengadilan Agama Lahat	72,90	BB
224.	Pengadilan Negeri Banjarnegara	78,90	BB	559.	Pengadilan Agama Baturaja	72,90	BB
225.	Pengadilan Negeri Slawi	80,00	BB	560.	Pengadilan Agama Kayuagung	72,90	BB
226.	Pengadilan Negeri Surabaya	79,40	BB	561.	Pengadilan Agama Muara Enim	74,10	BB
227.	Pengadilan Negeri Bojonegoro	71,20	BB	562.	Pengadilan Agama Lubuk Linggau	72,90	BB
228.	Pengadilan Negeri Tuban	71,60	BB	563.	Pengadilan Agama Sekayu	71,40	BB
229.	Pengadilan Negeri Lamongan	77,60	BB	564.	Pengadilan Agama Marabahan	70,80	BB
230.	Pengadilan Negeri Gresik	78,00	BB	565.	Pengadilan Agama Pelaihari	71,10	BB
231.	Pengadilan Negeri Sidoarjo	70,70	BB	566.	Pengadilan Agama Kotabaru	70,20	BB

232.	Pengadilan Negeri Mojokerto	80,00	BB	567.	Pengadilan Agama Banjarmasin	72,40	BB
233.	Pengadilan Negeri Jombang	72,70	BB	568.	Pengadilan Agama Martapura	71,80	BB
234.	Pengadilan Negeri Bondowoso	74,80	BB	569.	Pengadilan Agama Rantau	70,20	BB
235.	Pengadilan Negeri Banyuwangi	77,60	BB	570.	Pengadilan Agama Kandangan	70,90	BB
236.	Pengadilan Negeri Situbondo	71,20	BB	571.	Pengadilan Agama Barabai	72,90	BB
237.	Pengadilan Negeri Kediri	79,50	BB	572.	Pengadilan Agama Amuntai	71,10	BB
238.	Pengadilan Negeri Nganjuk	73,60	BB	573.	Pengadilan Agama Tanjung	72,80	BB
239.	Pengadilan Negeri Tulungagung	77,20	BB	574.	Pengadilan Agama Negara	70,80	BB
240.	Pengadilan Negeri Blitar	75,50	BB	575.	Pengadilan Agama Banjarbaru	70,90	BB
241.	Pengadilan Negeri Malang	79,40	BB	576.	Pengadilan Agama Batulicin	70,15	BB
242.	Pengadilan Negeri Pasuruan	75,90	BB	577.	Pengadilan Agama Tenggarong	73,20	BB
243.	Pengadilan Negeri Probolinggo	70,20	BB	578.	Pengadilan Agama Samarinda	75,75	BB
244.	Pengadilan Negeri Lumajang	72,80	BB	579.	Pengadilan Agama Tanah Grogot	72,10	BB
245.	Pengadilan Negeri Bangil	71,20	BB	580.	Pengadilan Agama Balikpapan	72,15	BB
246.	Pengadilan Negeri Kraksaan	71,40	BB	581.	Pengadilan Agama Tanjung Redep	73,25	BB
247.	Pengadilan Negeri Ponorogo	72,00	BB	582.	Pengadilan Agama Penajam	71,50	BB
248.	Pengadilan Negeri Ngawi	72,40	BB	583.	Pengadilan Agama Sendawar	72,40	BB
249.	Pengadilan Negeri Magetan	75,10	BB	584.	Pengadilan Agama Bontang	75,45	BB
250.	Pengadilan Negeri Sumenep	75,00	BB	585.	Pengadilan Agama Sangatta	71,75	BB
251.	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	79,80	BB	586.	Pengadilan Agama Singkawang	76,65	BB
252.	Pengadilan Negeri Kab. Madiun	79,60	BB	587.	Pengadilan Agama Nanga Pinoh	76,40	BB
253.	Pengadilan Negeri Kepanjen	77,50	BB	588.	Pengadilan Agama Sungai Raya	78,20	BB
254.	Pengadilan Negeri Banda Aceh	70,50	BB	589.	Pengadilan Agama Pontianak	78,45	BB
255.	Pengadilan Negeri Sigli	70,30	BB	590.	Pengadilan Agama Sambas	76,40	BB

256.	Pengadilan Negeri Bireuen	76,60	BB	591.	Pengadilan Agama Ketapang	78,20	BB
257.	Pengadilan Negeri Lhok Sukon	70,55	BB	592.	Pengadilan Agama Sanggau	76,55	BB
258.	Pengadilan Negeri Takengon	70,80	BB	593.	Pengadilan Agama Sintang	79,50	BB
259.	Pengadilan Negeri Langsa	70,90	BB	594.	Pengadilan Agama Putussibau	75,70	BB
260.	Pengadilan Negeri Kuala Simpang	70,55	BB	595.	Pengadilan Agama Mempawah	78,20	BB
261.	Pengadilan Negeri Meulaboh	72,55	BB	596.	Pengadilan Agama Bengkayang	77,40	BB
262.	Pengadilan Negeri Calang	75,90	BB	597.	Pengadilan Agama Manado	73,65	BB
263.	Pengadilan Negeri Sinabang	72,80	BB	598.	Pengadilan Agama Kotamobagu	71,75	BB
264.	Pengadilan Negeri Medan	72,70	BB	599.	Pengadilan Agama Tahuna	71,40	BB
265.	Pengadilan Negeri Binjai	79,40	BB	600.	Pengadilan Agama Lolak	70,80	BB
266.	Pengadilan Negeri Tanjung Balai	77,50	BB	601.	Pengadilan Agama Bolaang Uki	70,40	BB
267.	Pengadilan Negeri Sidikalang	79,80	BB	602.	Pengadilan Agama Boroko	71,05	BB
268.	Pengadilan Negeri Kabanjahe	78,10	BB	603.	Pengadilan Agama Tutuyan	71,95	BB
269.	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	77,60	BB	604.	Pengadilan Agama Tondano	73,80	BB
270.	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	74,80	BB	605.	Pengadilan Agama Bitung	71,85	BB
271.	Pengadilan Negeri Pematang Siantar	76,70	BB	606.	Pengadilan Agama Amurang	71,15	BB
272.	Pengadilan Negeri Tarutung	72,15	BB	607.	Pengadilan Agama Tual	75,24	BB
273.	Pengadilan Negeri Padang Sidempuan	75,80	BB	608.	Pengadilan Agama Masohi	72,31	BB
274.	Pengadilan Negeri Sibolga	72,90	BB	609.	Pengadilan Agama Dataran Hunipopu	74,92	BB
275.	Pengadilan Negeri Stabat	76,60	BB	610.	Pengadilan Agama Dataran Hunimoa	72,70	BB
276.	Pengadilan Negeri Simalungun	76,90	BB	611.	Pengadilan Agama Namlea	73,01	BB
277.	Pengadilan Negeri Kisaran	79,20	BB	612.	Pengadilan Agama Mataram	71,50	BB
278.	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	79,20	BB	613.	Pengadilan Agama Sumbawa	73,85	BB
279.	Pengadilan Negeri Sei Rampah	80,00	BB	614.	Pengadilan Agama Praya	76,70	BB

280.	Pengadilan Negeri Sibuhuan	74,40	BB	615.	Pengadilan Agama Selong	73,05	BB
281.	Pengadilan Negeri Mandailing Natal	71,85	BB	616.	Pengadilan Agama Bima	74,40	BB
282.	Pengadilan Negeri Balige	75,00	BB	617.	Pengadilan Agama Dompu	72,80	BB
283.	Pengadilan Negeri Padang	77,60	BB	618.	Pengadilan Agama Giri Menang	72,30	BB
284.	Pengadilan Negeri Sawahlunto	73,30	BB	619.	Pengadilan Agama Taliwang	73,90	BB
285.	Pengadilan Negeri Batusangkar	75,00	BB	620.	Pengadilan Agama Jayapura	75,45	BB
286.	Pengadilan Negeri Solok	78,75	BB	621.	Pengadilan Agama Nabire	71,35	BB
287.	Pengadilan Negeri Pariaman	74,60	BB	622.	Pengadilan Agama Serui	71,75	BB
288.	Pengadilan Negeri Painan	74,40	BB	623.	Pengadilan Agama Merauke	77,70	BB
289.	Pengadilan Negeri Bukittinggi	77,30	BB	624.	Pengadilan Agama Sentani	72,90	BB
290.	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	73,00	BB	625.	Pengadilan Agama Mimika	78,75	BB
291.	Pengadilan Negeri Payakumbuh	74,60	BB	626.	Pengadilan Agama Paniai	73,00	BB
292.	Pengadilan Negeri Padang Panjang	77,35	BB	627.	Pengadilan Agama Brebes	79,55	BB
293.	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	70,60	BB	628.	Pengadilan Agama Batang	79,05	BB
294.	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	74,10	BB	629.	Pengadilan Agama Kendal	79,65	BB
295.	Pengadilan Negeri Kotobaru	73,20	BB	630.	Pengadilan Agama Demak	79,00	BB
296.	Pengadilan Negeri Muaro	77,20	BB	631.	Pengadilan Agama Blora	76,75	BB
297.	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	73,20	BB	632.	Pengadilan Agama Purworejo	77,60	BB
298.	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	77,80	BB	633.	Pengadilan Agama Purwokerto	79,80	BB
299.	Pengadilan Negeri Palembang	78,25	BB	634.	Pengadilan Agama Banyumas	78,65	BB
300.	Pengadilan Negeri Kayuagung	71,20	BB	635.	Pengadilan Agama Cilacap	78,45	BB
301.	Pengadilan Negeri Baturaja	76,00	BB	636.	Pengadilan Agama Purbalingga	78,50	BB
302.	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	74,80	BB	637.	Pengadilan Agama Banjarnegara	79,20	BB
303.	Pengadilan Negeri Lahat	76,70	BB	638.	Pengadilan Agama Sukoharjo	73,10	BB

304.	Pengadilan Negeri Muara Enim	79,60	BB	639.	Pengadilan Agama Karanganyar	79,30	BB
305.	Pengadilan Negeri Sekayu	76,70	BB	640.	Pengadilan Agama Surakarta	76,15	BB
306.	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	71,65	BB	641.	Pengadilan Agama Ambarawa	77,60	BB
307.	Pengadilan Negeri Prabumulih	77,85	BB	642.	Pengadilan Agama Slawi	79,45	BB
308.	Pengadilan Negeri Pagar Alam	70,10	BB	643.	Pengadilan Agama Mungkid	77,00	BB
309.	Pengadilan Negeri Banjarmasin	77,80	BB	644.	Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	74,00	BB
310.	Pengadilan Negeri Kandungan	72,90	BB	645.	Pengadilan Agama Teluk Kuantan	74,00	BB
311.	Pengadilan Negeri Kotabaru	71,20	BB	646.	Pengadilan Agama Pekanbaru	76,00	BB
312.	Pengadilan Negeri Barabai	77,00	BB	647.	Pengadilan Agama Rengat	76,00	BB
313.	Pengadilan Negeri Martapura	77,10	BB	648.	Pengadilan Agama Tembilahan	71,00	BB
314.	Pengadilan Negeri Tanjung	75,40	BB	649.	Pengadilan Agama Bangkinang	74,00	BB
315.	Pengadilan Negeri Amuntai	72,80	BB	650.	Pengadilan Agama Bengkalis	76,00	BB
316.	Pengadilan Negeri Rantau	73,70	BB	651.	Pengadilan Agama Pasir Pangarayan	75,00	BB
317.	Pengadilan Negeri Marabahan	71,80	BB	652.	Pengadilan Agama Selat Panjang	75,00	BB
318.	Pengadilan Negeri Pelaihari	74,60	BB	653.	Pengadilan Agama Dumai	75,00	BB
319.	Pengadilan Negeri Banjarbaru	77,80	BB	654.	PENGADILAN AGAMA SUKAMARA	72,10	BB
320.	Pengadilan Negeri Manado	70,60	BB	655.	PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG	77,25	BB
321.	Pengadilan Negeri Kotamubago	73,35	BB	656.	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	75,55	BB
322.	Pengadilan Negeri Tahuna	73,60	BB	657.	PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN	73,85	BB
323.	Pengadilan Negeri Bitung	70,25	BB	658.	Pengadilan Agama Palangkaraya	79,60	BB
324.	Pengadilan Negeri Airmadidi	70,30	BB	659.	Pengadilan Agama Pangkalan Bun	72,10	BB
325.	Pengadilan Negeri Pare-Pare	71,05	BB	660.	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH	73,75	BB
326.	Pengadilan Negeri Watampone	70,30	BB	661.	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	79,00	BB
327.	Pengadilan Negeri Watansopeng	70,75	BB	662.	Pengadilan Agama Sampit	71,50	BB

328.	Pengadilan Negeri Sengkang	70,25	BB	663.	Pengadilan Agama Serang	72,60	BB
329.	Pengadilan Negeri Bulukumba	71,20	BB	664.	Pengadilan Agama Tangerang	74,00	BB
330.	Pengadilan Negeri Palopo	70,60	BB	665.	Pengadilan Agama Tigaraksa	71,00	BB
331.	Pengadilan Negeri Makale	71,05	BB	666.	Pengadilan Agama Cilegon	71,60	BB
332.	Pengadilan Negeri Ambon	79,80	BB	667.	Pengadilan Agama Pangkal Pinang	74,10	BB
333.	Pengadilan Negeri Masohi	79,80	BB	668.	Pengadilan Agama Tanjung Pandan	78,95	BB
334.	Pengadilan Negeri Tual	76,20	BB	669.	Pengadilan Agama Sungailiat	77,55	BB
335.	Pengadilan Negeri Dobo	72,60	BB	670.	Pengadilan Agama Mentok	78,70	BB
336.	Pengadilan Negeri Namlea	78,80	BB	671.	Pengadilan Agama Gorontalo	75,20	BB
337.	Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu	77,50	BB	672.	Pengadilan Agama Suwawa	76,05	BB
338.	Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa	74,00	BB	673.	Pengadilan Agama Kwandang	75,00	BB
339.	Pengadilan Negeri Denpasar	70,90	BB	674.	Pengadilan Agama Limboto	74,60	BB
340.	Pengadilan Negeri Singaraja	79,40	BB	675.	Pengadilan Agama Tilamuta	74,70	BB
341.	Pengadilan Negeri Negara	77,60	BB	676.	Pengadilan Agama Marisa	76,70	BB
342.	Pengadilan Negeri Semarang	75,90	BB	677.	Pengadilan Agama Ternate	78,80	BB
343.	Pengadilan Negeri Tabanan	74,00	BB	678.	Pengadilan Agama Soa Sio	79,20	BB
344.	Pengadilan Negeri Amlapura	72,10	BB	679.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	70,30	BB
345.	Pengadilan Negeri Gianyar	75,30	BB	680.	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung	72,20	BB
346.	Pengadilan Agama Jenepono	74,40	BB	681.	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	75,80	BB
347.	Pengadilan Agama Takalar	74,05	BB	682.	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	79,40	BB
348.	Pengadilan Agama Barru	70,60	BB	683.	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	70,70	BB
349.	Pengadilan Agama Sungguminasa	76,95	BB	684.	Pengadilan Agama Tanjung Pinang	71,50	BB
350.	Pengadilan Agama Sengkang	77,75	BB	685.	Pengadilan Agama Dabo Singkep	73,60	BB

351.	Pengadilan Agama Bulukumba	72,75	BB	686.	Pengadilan Agama Batam	76,40	BB
352.	Pengadilan Agama Selayar	77,10	BB	687.	Pengadilan Agama Natuna	70,50	BB
353.	Pengadilan Agama Pare Pare	71,80	BB	688.	Pengadilan Negeri Majene	71,10	BB
354.	Pengadilan Agama Enrekang	76,95	BB	689.	Pengadilan Negeri Mamuju	71,75	BB
355.	Pengadilan Agama Palopo	72,40	BB	690.	Pengadilan Negeri Polewali	71,10	BB
356.	Pengadilan Agama Makale	71,40	BB	691.	Pengadilan Negeri Pasangkayu	70,95	BB
357.	Pengadilan Agama Belopa	73,90	BB	692.	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar	71,80	BB
358.	Pengadilan Agama Masamba	75,70	BB	693.	Pengadilan Agama Polewali	75,80	BB
359.	Pengadilan Agama Bandung	77,20	BB	694.	Pengadilan Agama Majene	75,65	BB
360.	Pengadilan Agama Ciamis	73,00	BB	695.	Pengadilan Agama Pasangkayu	74,40	BB
361.	Pengadilan Agama Tasikmalaya	72,90	BB	696.	Pengadilan Agama Sorong	70,60	BB
362.	Pengadilan Agama Bogor	70,90	BB	697.	Pengadilan Agama Manokwari	70,20	BB
363.	Pengadilan Agama Sukabumi	70,10	BB	698.	Pengadilan Agama Tarakan	77,20	BB
364.	Pengadilan Agama Cianjur	73,80	BB	699.	Pengadilan Agama Tanjung Selor	76,90	BB
365.	Pengadilan Agama Cirebon	79,50	BB	700.	Pengadilan Agama Nunukan	75,80	BB
366.	Pengadilan Agama Indramayu	74,25	BB	701.	Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	79,20	BB
367.	Pengadilan Agama Kuningan	71,20	BB	702.	Pengadilan Tata Usaha Negara Medan	78,80	BB
368.	Pengadilan Agama Bekasi	76,60	BB	703.	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	74,60	BB
369.	Pengadilan Agama Purwakarta	73,90	BB	704.	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	77,25	BB
370.	Pengadilan Agama Soreang	74,90	BB	705.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi	78,45	BB
371.	Pengadilan Agama Kota Cimahi	74,20	BB	706.	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	70,40	BB
372.	Pengadilan Agama Subang	70,40	BB	707.	Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu	70,30	BB

373.	Pengadilan Agama Cibadak	79,00	BB	708.	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin	78,20	BB
374.	Pengadilan Agama Sumber	73,70	BB	709.	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado	70,55	BB
375.	Pengadilan Agama Cibinong	71,60	BB	710.	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO	76,80	BB
376.	Pengadilan Agama Depok	74,60	BB	711.	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	75,15	BB
377.	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya	74,70	BB	712.	Pengadilan Agama Yogyakarta	80,00	BB
378.	Pengadilan Agama Kota Banjar	73,90	BB	713.	Pengadilan Agama Sleman	74,90	BB
379.	Pengadilan Agama Surabaya	71,95	BB	714.	Pengadilan Agama Wates	78,50	BB
380.	Pengadilan Agama Mojokerto	76,40	BB	715.	Pengadilan Agama Bantul	76,66	BB
381.	Pengadilan Agama Sidoarjo	71,60	BB	716.	Pengadilan Agama Sungai Penuh	79,55	BB
382.	Pengadilan Agama Jombang	76,60	BB	717.	Pengadilan Agama Gedong Tataan	76,00	BB
383.	Pengadilan Agama Bawean	77,30	BB	718.	Pengadilan Agama Pringsewu	77,00	BB
384.	Pengadilan Agama Gresik	73,15	BB	719.	Pengadilan Agama Mesuji	78,20	BB
385.	Pengadilan Agama Bojonegoro	75,35	BB	720.	Pengadilan Agama Sukadana	73,00	BB
386.	Pengadilan Agama Lamongan	80,00	BB	721.	Pengadilan Agama Tanjung Karang	75,50	BB
387.	Pengadilan Agama Jember	74,40	BB	722.	Pengadilan Agama Krui	75,65	BB
388.	Pengadilan Agama Bondowoso	76,10	BB	723.	Pengadilan Agama Kotabumi	78,80	BB
389.	Pengadilan Agama Situbondo	75,35	BB	724.	Pengadilan Agama Tulang Bawang	73,95	BB
390.	Pengadilan Agama Banyuwangi	77,75	BB	725.	Pengadilan Agama Tanggamus	75,30	BB
391.	Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	77,15	BB	726.	Pengadilan Agama Gunung Sugih	76,10	BB
392.	Pengadilan Agama Tulungagung	76,10	BB	727.	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	74,95	BB
393.	Pengadilan Agama Trenggalek	73,30	BB	728.	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	74,35	BB
394.	Pengadilan Agama Blitar	73,60	BB	729.	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	75,80	BB

395.	Pengadilan Agama Nganjuk	74,75	BB	730.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	76,10	BB
396.	Pengadilan Agama Malang	79,80	BB	731.	Pengadilan Agama Toli Toli	79,25	BB
397.	Pengadilan Agama Pasuruan	73,35	BB	732.	Pengadilan Agama Poso	75,25	BB
398.	Pengadilan Agama Bangil	74,55	BB	733.	Pengadilan Agama Luwuk	79,70	BB
399.	Pengadilan Agama Probolinggo	71,10	BB	734.	Pengadilan Agama Buol	78,70	BB
400.	Pengadilan Agama Kraksaan	72,50	BB	735.	Pengadilan Agama Kolaka	74,75	BB
401.	Pengadilan Agama Lumajang	74,60	BB	736.	Pengadilan Agama Raha	70,65	BB
402.	Pengadilan Agama Madiun	76,40	BB	737.	Pengadilan Agama Kendari	78,35	BB
403.	Pengadilan Agama Magetan	75,80	BB	738.	Pengadilan Agama Bau-Bau	76,65	BB
404.	Pengadilan Agama Ngawi	76,80	BB	739.	Pengadilan Agama Wangi Wangi	75,30	BB
405.	Pengadilan Agama Ponorogo	74,40	BB	740.	Pengadilan Agama Lasusua	75,75	BB
406.	Pengadilan Agama Pacitan	76,60	BB	741.	Pengadilan Agama Rumbia	71,85	BB
407.	Pengadilan Agama Pamekasan	75,70	BB	742.	Pengadilan Agama Unaaha	77,00	BB
408.	Pengadilan Agama Bangkalan	74,30	BB	743.	Pengadilan Agama Andoolo	76,55	BB
409.	Pengadilan Agama Sampang	74,40	BB	744.	Pengadilan Agama Pasarwajo	76,50	BB
410.	Pengadilan Agama Sumenep	71,75	BB	745.	Pengadilan Agama Kupang	75,40	BB
411.	Pengadilan Agama Kangean	76,50	BB	746.	Pengadilan Agama Soe	75,30	BB
412.	Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	70,10	BB	747.	Pengadilan Agama Kefamenanu	70,55	BB
413.	Pengadilan Agama Kediri	78,95	BB	748.	Pengadilan Agama Manna	77,10	BB
414.	Pengadilan Agama Tuban	77,65	BB	749.	Pengadilan Agama Curup	75,00	BB
415.	Pengadilan Agama Malang Kab. Malang	75,70	BB	750.	Pengadilan Agama Argamakmur	76,40	BB
416.	Pengadilan Negeri Jayapura	76,45	BB	751.	Pengadilan Agama Bengkulu	76,85	BB
417.	Pengadilan Negeri Wamena	72,00	BB	752.	Pengadilan Agama Mukomuko	73,35	BB
418.	Pengadilan Negeri Biak	70,10	BB	753.	Pengadilan Agama Bintuhan	72,60	BB

419.	Pengadilan Negeri Serui	72,70	BB	754.	Pengadilan Agama Tais	72,70	BB
420.	Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika	71,55	BB	755.	Pengadilan Agama Kepahiang	73,80	BB
421.	Pengadilan Negeri Kupang	75,00	BB	756.	Pengadilan Agama Lebong	70,05	BB
422.	Pengadilan Negeri Atambua	70,65	BB	757.	Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh	75,80	BB
423.	Pengadilan Negeri Kefamenanu	75,30	BB	758.	Pengadilan Militer I - 02 Medan	73,50	BB
424.	Pengadilan Negeri Waikabubak	76,00	BB	759.	Pengadilan Militer I - 03 Padang	78,80	BB
425.	Pengadilan Negeri Ende	70,90	BB	760.	Pengadilan Militer I - 04 Palembang	75,20	BB
426.	Pengadilan Negeri Maumere	72,60	BB	761.	Pengadilan Militer I - 06 Banjarmasin	72,30	BB
427.	Pengadilan Negeri Lantuka	76,01	BB	762.	Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan	74,00	BB
428.	Pengadilan Negeri Lembata	71,02	BB	763.	Pengadilan Militer II - 08 Jakarta	74,85	BB
429.	Pengadilan Negeri Rote Ndao	77,75	BB	764.	Pengadilan Militer II- 09 Bandung	74,40	BB
430.	Pengadilan Negeri Labuan Bajo	70,90	BB	765.	Pengadilan Militer II - 10 Semarang	76,30	BB
431.	Pengadilan Negeri Oelamasi	74,05	BB	766.	Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta	73,40	BB
432.	Pengadilan Negeri Pontianak	76,70	BB	767.	Pengadilan Militer III - 16 Makassar	71,35	BB
433.	Pengadilan Negeri Singkawang	70,30	BB	768.	Pengadilan Militer III - 14 Denpasar	78,75	BB
434.	Pengadilan Negeri Sintang	73,70	BB	769.	Pengadilan Negeri Serang	79,85	BB
435.	Pengadilan Negeri Ketapang	72,75	BB	770.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	76,70	BB
436.	Pengadilan Negeri Mompawah	75,25	BB	771.	Pengadilan Negeri Tangerang	78,40	BB
437.	Pengadilan Negeri Sanggau	73,65	BB	772.	Pengadilan Negeri Pandeglang	76,20	BB
438.	Pengadilan Negeri Putussibau	77,60	BB	773.	Pengadilan Negeri Pangkal Pinang	77,65	BB
439.	Pengadilan Negeri Sambas	71,15	BB	774.	Pengadilan Negeri Sungailiat	73,00	BB
440.	Pengadilan Negeri Bengkayang	71,50	BB	775.	Pengadilan Negeri Koba	71,60	BB
441.	Pengadilan Negeri Ngabang	72,70	BB	776.	Pengadilan Negeri Mentok	76,30	BB
442.	Pengadilan Negeri Yogyakarta	80,00	BB	777.	Pengadilan Negeri Ternate	79,45	BB

443.	Pengadilan Negeri Wonosari	80,00	BB	778.	Pengadilan Negeri Labuha	76,10	BB
444.	Pengadilan Negeri Sleman	80,00	BB	779.	Pengadilan Negeri Soasiu	70,70	BB
445.	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	77,25	BB	780.	Pengadilan Negeri Sanana	72,25	BB
446.	Pengadilan Negeri Sampit	70,40	BB	781.	Pengadilan Negeri Gorontalo	72,60	BB
447.	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	72,80	BB	782.	Pengadilan Negeri Limboto	74,60	BB
448.	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	71,00	BB	783.	Pengadilan Negeri Tilamuta	76,80	BB
449.	Pengadilan Negeri Kasongan	70,20	BB	784.	Pengadilan Negeri Marisa	71,20	BB

10. PERMINTAAN REVIU TARGET DAN CAPAIAN KINERJA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI 2024

MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI

MEMORANDUM
Nomor : 240/BUA.1/M.OT.1.6/IX/2024

Yth : Para Kepala Biro pada Badan Urusan Administrasi

Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Hal : Reviu Target Indikator Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2024

Tanggal : 3 September 2024

Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BUA Tahun 2023 dengan para Auditor dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tanggal 4 September 2024 di Ruang Rapat Media Center Gedung Mahkamah Agung RI, beberapa hal yang perlu kami sampaikan antara lain:

- Terdapat indikator kinerja yang tidak mencapai target atau terlampaui tinggi capaiannya sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2023. Indikator kinerja yang diukur dalam Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 810/SEK/SK/XII/2020 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2023.
- Belum terlihat adanya komitmen pimpinan dalam penetapan indikator kinerja berikut dengan targetnya pada masing-masing Biro.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan matriks Reviu Target Indikator Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2024 melalui link https://bit.ly/Kinerja_BUA_Tahun_2024 dan diminta kesediaannya untuk:

- Mereviu target kinerja pada masing-masing Unit Eselon II melalui link tersebut dan menyampaikan *hardcopy* yang sudah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Biro kepada Biro Perencanaan dan Organisasi paling lambat tanggal 12 September 2024.
- Mengupload evidence berupa surat undangan, notulensi dan/atau dokumentasi yang menunjukkan adanya komitmen dan keterlibatan pimpinan dalam mereviu target tersebut.

Demikian hal ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Sahwan

MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI

MEMORANDUM
Nomor : 240/BUA.1/M.OT.1.6/XII/2024

Yth : 1. Ptl. Kepala Biro Perengkapan
2. Kepala Biro Kepegawalan
3. Kepala Biro Umum
4. Ptl. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan
5. Kepala Biro Hukum dan Humas

Dari : Pih. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Hal : Permintaan Data Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Urusan Administrasi Tahun 2024

Tanggal : 24 Desember 2024

Berkenaan dengan pengukuran Capaian Kinerja Badan Urusan Administrasi (BUA) serta penyusunan Laporan Kinerja BUA Tahun 2024, yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut:

- Melengkapi Matriks Pengukuran Capaian Kinerja BUA Semester I dan Semester II Tahun 2024 termasuk kolom "Penjelasan Atas Keberhasilan dan Kegagalan, Kendala dan Strategi Capaian Kinerja" melalui tautan bit.ly/Pengukuran_Kinerja_BUA_Tahun_2024. Matriks yang telah dilengkapi kemudian ditandatangani sebelum disampaikan.
- Menyusun Konsep Bab III pada Laporan Kinerja BUA Tahun 2024 sesuai indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing Biro. Penyusunan konsep Bab III disusun mengikuti format kerangka yang telah disediakan pada tautan bit.ly/KERANGKA_BAB_III_LKJIP_BUA.
- Menyampaikan Capaian Kinerja BUA dan Konsep Bab III Laporan Kinerja BUA Tahun 2024 dengan mengunggah kedalam tautan bit.ly/LKJIP_BUA_2024 selambat-lambatnya pada Jumat, 10 Januari 2025.
- Untuk Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Biro Perencanaan dan Organisasi c.q. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pih. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi


Didik Purwanto

MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI

MEMORANDUM

MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI

MEMORANDUM
Nomor : ~~1~~9/BUA.1/M.OT.1.6/XII/2024

Yth : 1. Kepala Bagian Rencana dan Program
2. Kepala Bagian Penyusunan Anggaran
3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
4. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Hal : Permintaan Data Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan
Urusan Administrasi Tahun 2024

Tanggal : 30 Desember 2024

Berkenaan dengan pengukuran Capaian Kinerja Badan Urusan Administrasi (BUA) serta penyusunan Laporan Kinerja BUA Tahun 2024, yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut:

- Melengkapi Matriks Pengukuran Capaian Kinerja BUA Semester I dan Semester II Tahun 2024 termasuk kolom "Penjelasan Atas Keberhasilan dan Kegagalan, Kendala dan Strategi Capaian Kinerja" melalui tautan bit.ly/Pengukuran_Kinerja_BUA_Tahun_2024. Matriks yang telah dilengkapi kemudian ditandatangani sebelum disampaikan.
- Menyusun Konsep Bab III pada Laporan Kinerja BUA Tahun 2024 sesuai indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing bagian. Penyusunan konsep Bab III disusun mengikuti format kerangka yang telah disediakan pada tautan bit.ly/KERANGKA_BAB_III_LKJIP_BUA.
- Menyampaikan Capaian Kinerja BUA, Konsep Bab III, dan Konsep Realisasi Anggaran pada Laporan Kinerja BUA Tahun 2024 dengan mengunggah kedalam tautan bit.ly/LKJIP_BUA_2024 selambat-lambatnya pada Jumat, 10 Januari 2025.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Sahwan

11. FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN 2024



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 - 13 TELP. 3843348, 3810361, 3457661
TORMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Urusan Administrasi.

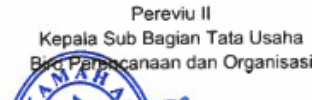
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

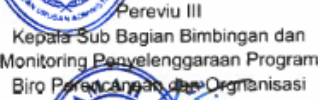
Jakarta, 13 Februari 2024
Pereviu I
Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring
Biro Perencanaan dan Organisasi


Damara

Pereviu II
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Biro Perencanaan dan Organisasi


Rustiman

Pereviu III
Kepala Sub Bagian Bimbingan dan
Monitoring Penyelenggaraan Program
Biro Perencanaan dan Organisasi


Indan Widyuni

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN 2024				
No.	Pernyataan		Check List	Catatan
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	-	Belum semua indikator menjelaskan upaya perbaikan ke depan
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓	
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓	
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓	
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓	

		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	✓	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓	
		10. IKU dan IK telah SMART	-	Perlu dilakukan reviu IKU untuk keselarasan dokumen perencanaan BUA

Jakarta, Februari 2024

Pereviu I

Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring
Biro Perencanaan dan Organisasi


El Damara

Pereviu II

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Biro Perencanaan dan Organisasi


Rustimah

Pereviu III

Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring
Penyelenggaraan Program
Biro Perencanaan dan Organisasi


Indah Wahyuni